



**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2016-2021
(REVISI)**

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA BARAT
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 ini disusun berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021. Renstra ini merupakan revisi dari renstra sebelumnya karena adanya Permendagri No. 86 Tahun 2017 dalam penyusunan revisi dari Renstra tersebut. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021. Renstra disusun melalui berbagai tahapan termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat. Dengan ada revisi ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pedoman pengembangan khususnya bidang pendidikan

Renstra ini merupakan dasar dan pedoman bagi eselon II, III, IV, UPTD dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta acuan bagi SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Padang, Oktober 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat,



Adib Alfikri, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730413 199703 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tema pembangunan Indonesia khususnya di bidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN III 2015-2019) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tema pembangunan pendidikan selama rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 terdiri dari empat tema yakni periode 2005-2009 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan. Periode 2010-2014 temanya adalah penguatan pelayanan pendidikan, sedangkan tema pembangunan pendidikan saat ini yakni periode 2015-2019 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan tema pembangunan pendidikan pada periode 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. (lihat Renstra Dikbud RI 2015-2019).

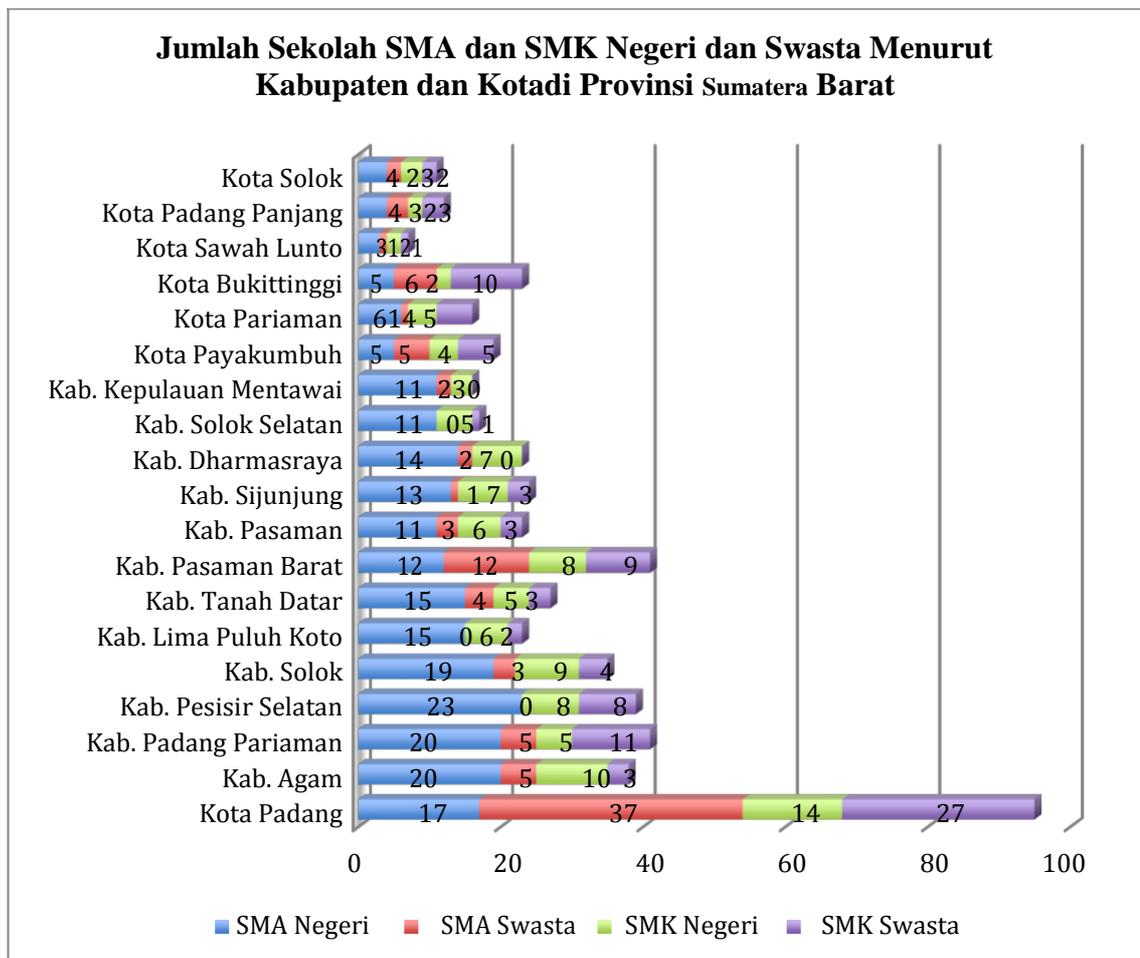
Pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan ini diarahkan oleh cara pandang (paradigma) agar sasaran yang dirumuskan dapat dicapai. Diantara paradigma pembangunan pendidikan nasional itu adalah: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Pendidikan untuk semua dimana pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan harus diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu gerakan adalah penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Pendidikan menghasilkan pembelajar adalah Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Berikutnya pendidikan membentuk karakter adalah pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian

dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Selanjutnya sekolah yang menyenangkan adalah sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Semua paradigma pembangunan pendidikan ini tentunya harus menjadi koridor dalam pembangunan pendidikan ke depannya.

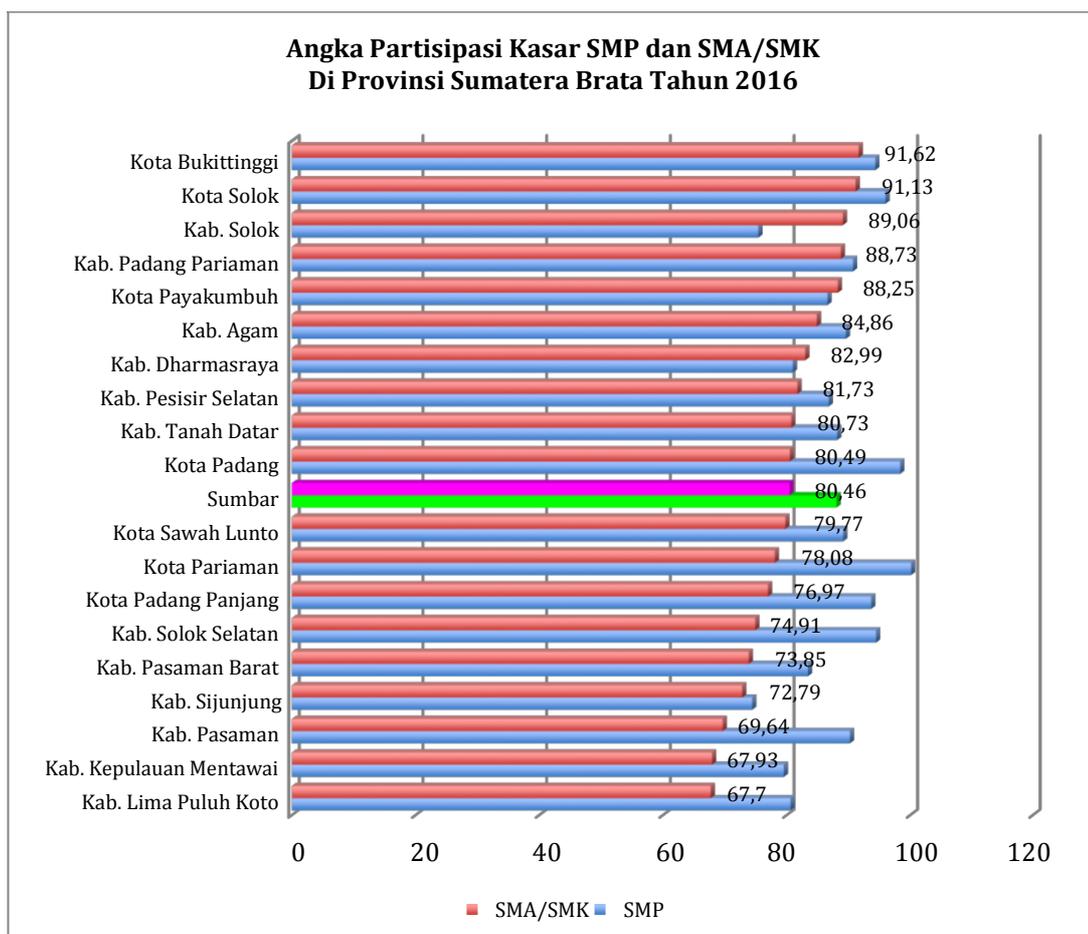
Kemampuan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan aksesibilitas pendidikan menengah atas tentunya tidak terlepas dari potensi jumlah sekolah yang dimiliki baik sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Jumlah sekolah menengah atas total adalah sebanyak 530 sekolah yang terdiri dari 320 (60,38%) SMA dan sebanyak 210 (39,62%) SMK. Dari jumlah SMA itu ternyata sebanyak 228 (71,25%) adalah SMA Negeri dan sebanyak 92 (28,75%) adalah SMA swasta. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan SMA itu didominasi oleh SMA negeri, peran sekolah swasta pada jenis SMA ini masih relative kecil. Untuk lebih detilnya lihat gambar grafik di bawah ini.



Gambar 1.1. Jumlah Sekolah SMA dan SMK Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat, Tahun 2017

Jumlah lembaga pendidikan SMK adalah sebanyak 210 unit yang terdiri dari 110 (52,38%) SMK negeri dan sebanyak 100 (47,62%) adalah SMK Swasta, data ini menunjukkan potensi sekolah menengah kejuruan ini cukup berimbang potensinya di provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari segi lokasi, maka letak sekolah yang paling banyak itu terdapat di Kota Padang sebanyak 95 (17,92%), disusul oleh kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat yang jumlahnya sama yakni sebanyak 41(7,74%). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota yang paling sedikit memiliki jumlah sekolah adalah Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padangpanjang.

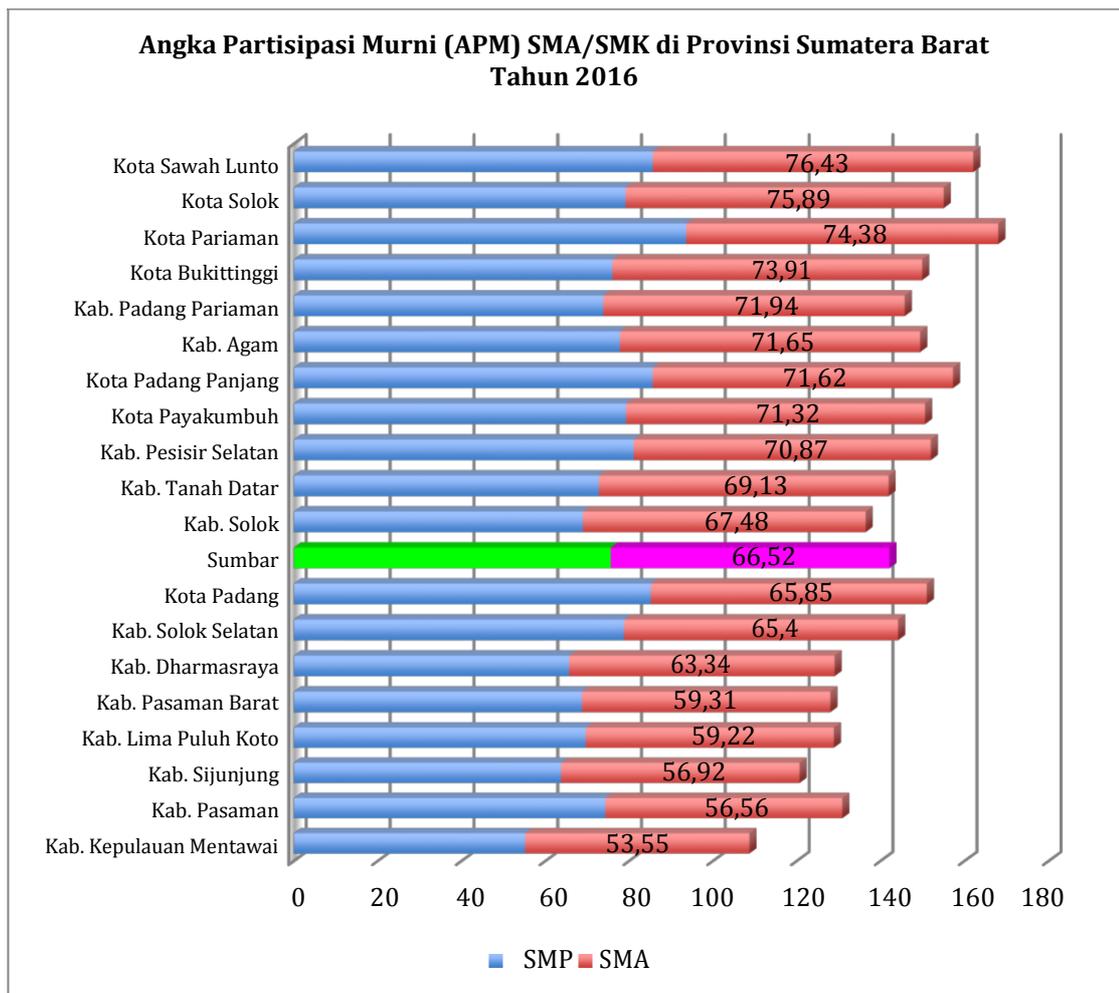
Apabila dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA dan SMK ini , maka dua wilayah Kota yakni Kota Sawahlunto dan Kota Padangpanjang ternyata memiliki angka APK berada di bawah rata-rata Sumatera Barat masing-masing secara berturut turut adalah 79.77 dan 76.97 jauh berada di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80.46. untuk lebih detilnya lihat gambar di bawah.



Gambar 1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP dan SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota

Gambar 1.2 di atas juga memperlihatkan bahwa angka APK SMA/SMK yang tertinggi itu diraih oleh Kota Bukittinggi yang mencapai 91.62 dan Kota Solok yang mencapai 91.13. sehingga terdapat empat wilayah Kota yang telah memiliki angka APK yang berada di atas rata-rata Sumatera Barat yakni disamping Kota Bukittinggi, Kota solok, juga Kota Payakumbuh dan Kota Padang, sedangkan tiga Kota lainnya yakni Kota Sawahlunto, Kota Pariman dan Kota Padangpanjang berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, terdapat 6 wilayah kabupaten yang sudah memiliki angka APK SMA/SMK diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Solok, Padang Pariaman, Agam, Dharmasraya, Pesisir Selatan dan Tanah Datar. Sedangkan terdapat 6 kabupaten yang memiliki angka APK SMA/SMK yang berada di bawah rata-rata APK Sumatera Barat yakni kabupaten Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman, Sijunjung, Mentawai dan 50 Kota.

Angka partisipasi kasar (APK) ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika angka APK mencapai 100, Ukuran APK ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep APK ini, maka belum ada kabupaten dan Kota mencapai APK SMA/SMK 100. Hal ini berimplikasi bahwa masih ada penduduk usia sekolah SMA/SMK yang belum duduk dibangku pendidikan SMA/SMK dan gejala ini dominan pada tiga kabupaten yakni, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan kabupaten 50 Kota.



Gambar 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2016

Gambar 1.3. diatas memperlihatkan angka partisipasi murni (APM) yang menggambarkan persentase penduduk usia SMA/SMK yakni 16-18 tahun yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada. Belum adanya kabupaten dan kota yang mencapai angka APM 100 berarti ada indikasi bahwa masih ada penduduk yang berusia SMA yakni 16-18 tahun yang belum berada di level pendidikan ini. APM yang tertinggi dicapai oleh Kota Sawahlunto yakni 76.43 dan Kota Solok mencapai 75,89. Artinya sebanyak 76.43 % penduduk usia SMA 16-18 tahun yang berada di sekolah menikmati bangku pendidikan, sisanya sebanyak 23.57% masih belum masuk sekolah SMA/SMK. Hal ini dapat disebabkan oleh karena keterbatasan akses terhadap pendidikan SMA/SMK juga disebabkan karena keterbatasan tempat yang tersedia atau daya tampung yang belum mencukupi, ini tentu perlu didalami lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum rencana strategi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara dengan pengaturan kepentingan pembangunan pendidikan. Dasar hukum pembangunan pendidikan yang diacu tersebut adalah:

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor. 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Dan Riau.
3. UU Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
7. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
8. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. PP No. 047 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
10. PP No. 048 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
11. PP No. 074 Tahun 2008 Tentang Guru
12. PP No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional
13. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Dan Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru
15. Permendikbud No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Dan Non Operasional SD/MI/SMP/SMA/SMK
16. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
17. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah
18. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah
19. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah
20. Permendikbud No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru
21. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah.

22. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2021
23. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat
24. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
25. Peraturan Gubernur No. 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
26. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 42 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan provinsi Sumatera Barat dimaksudkan agar Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat memiliki arah pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat
2. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2016-2019 sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2016-2019.
3. Menyusun indicator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2015-2019 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pendidikan Sumatera Barat

Bab IV Tujuan dan Sasaran,

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta

Pendanaan Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pendidikan Bab VIII Penutup

BAB II

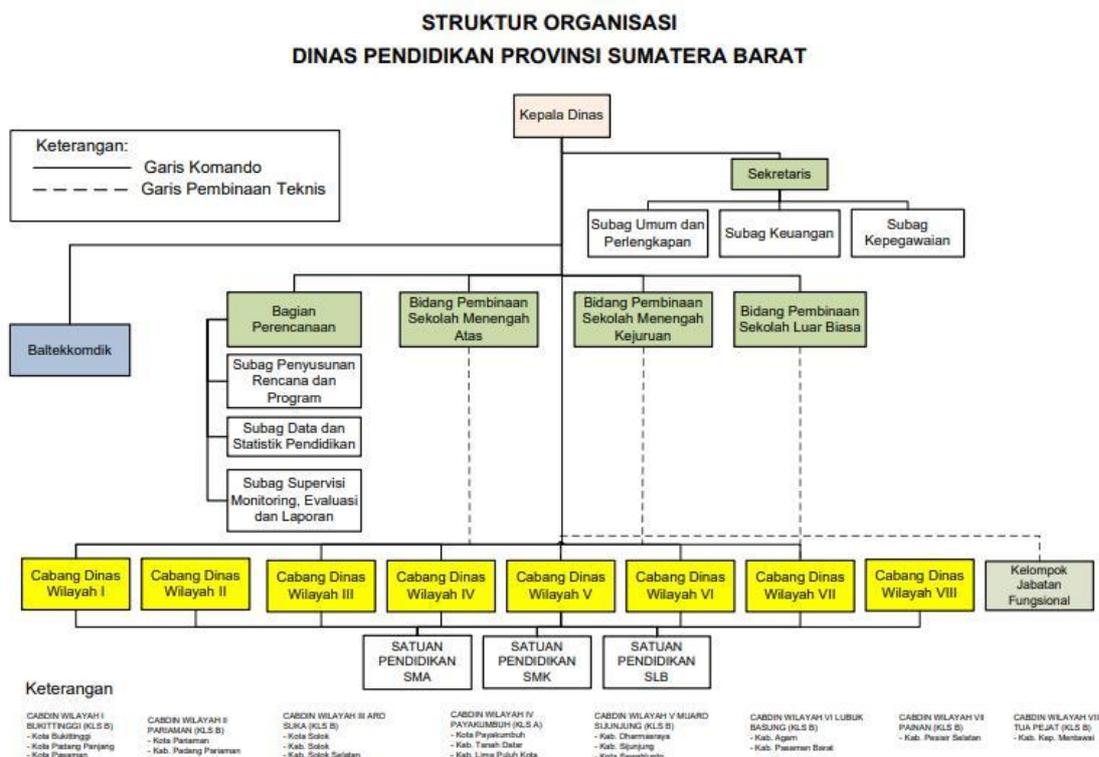
GAMBARAN PELAYANAN PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Pada bab II ini Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat dikemukakan gambaran pelayanan dinas Pendidikan serta kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat, terutama yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat.

2.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatra Barat.

Gambar 2.1.1
Bagan Struktur Organisasi
SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat



2.2. Kondisi Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kondisi pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak lepas dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan itu sendiri. Tugas pokok Dinas Pendidikan adalah melaksanakan urusan pemerintahan provinsi di bidang pendidikan (SK Gubernur No:78/Tahun 2016). Fungsi Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
3. Membina dan memfasilitasi bidang pendidikan, lingkup provinsi dan kabupaten/Kota
4. Melaksanakan kesekretariatan dan perencanaan Dinas
5. Melakukan pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) serta Sekolah Luar Biasa (SLB).
6. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan
7. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsinya.

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Tugas kepala dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Memimpin, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
2. Merumuskan dan menetapkan dokumen perencanaan di bidang pendidikan;
3. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
4. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas dan merumuskan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pendidikan;
5. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan pendidikan;
6. Menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan serta Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
7. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
8. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban(LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(LPPD)dinas serta pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi Kesekretariatan, Bagian Perencanaan, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas,Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;

- 9 Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis pendidikan;
- 10 Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan Cabang Dinas, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- 11 Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 12 Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi ini kemudian organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di susun sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang ada agar organisasi dan kelembagaan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat ini dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Susunan organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di komandoi oleh Kepala Dinas beserta Sekretaris Dinas yang dibantu oleh 4 (empat) bagian, satu cabang dinas, yakni:

1. bagian perencanaan,
2. bagian pembinaan sekolah menengah atas (SMA),
3. bagian pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK),
4. bagian pembinaan sekolah luar biasa (SLB),
5. cabang Dinas,
6. unit pelaksana teknis dinas (UPTD), dan
7. kelompok jabatan fungsional.
8. Bagian Sekretariat

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian umum dan perlengkapan, sub bagian keuangan dan sub bagian kepegawaian. Bagian Sekretariat memiliki 11 tugas pokok diantaranya melakukan pengelolaan urusan rumahtangga dinas, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, keprotokoleran, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keamanan, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok ini sekretaris Dinas memiliki sejumlah fungsi yang dapat dilihat secara detil pada SK Gubernur No. 78/2016 tentang tugas pokok dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan perlengkapan, 100 tugas pokok untuk sub bagian keuangan dan 10 tugas

pokok untuk sub bagian kepegawaian. Sehingga bagian Sekretariat memiliki 44 total tugas pokok.

Bagian Perencanaan terdiri dari 3 sub bagian yakni: sub bagian penyusunan rencana dan program, sub bagian data dan statistic pendidikan, dan sub bagian supervise, monitoring evaluasi dan laporan. Tugas pokok bagian perencanaan ini adalah menyusun rencana kerja, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis serta menyajikan data pendidikan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Rincian tugas pokok dan fungsi bagian perencanaan terdiri dari 14 tugas pokok ditambah dengan 8 tugas pokok untuk sub bagian penyusunan rencana, 14 tugas pokok untuk sub bagian data dan statistic dan 12 tugas pokok untuk sub bagian monitoring evaluasi dan laporan. Sehingga bagian perencanaan ini memiliki total tugas pokok adalah sebanyak 48 tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Menyusun rencana dan pengkajian program kerja Kesekretariatan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian;
3. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan;
4. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan, pengkajian anggaran belanja serta pengendalian administrasi belanja;
5. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan penatausahaan kelembagaan;
6. Mengkoordinir perencanaan pemanfaatan, penatalaksanaan dan pertanggung jawaban barang inventaris milik daerah;
7. Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
8. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan serta telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
9. Menyelenggarakan pembinaan administrasi kepegawaian Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah;
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
11. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah menengah atas (SMA) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 8 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok, sehingga bagian pembinaan SMA ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bagian pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SMK ini memiliki 46 total tugas pokok.

Adapun tugas pokok pendidikan menengah adalah melaksanakan, menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan diibidang kurikulum dan kesiswaan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ini, bidang pendidikan menengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian pembinaan sekolah luar biasa (SLB) terdiri dari 3 sub bagian dengan 10 tugas pokok. Seksi kurikulum dan kesiswaan terdiri dari 14 tugas pokok, seksi tenaga teknis terdiri dari 11 tugas pokok dan seksi sarana dan prasarana terdiri dari 11 tugas pokok. Sehingga bagian pembinaan SLB ini memiliki 46 total tugas pokok.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan sekolah luar biasa dan berkebutuhan khusus. Untuk melaksanan tugas pokoknya ini, maka bagian pembinaan sekolah luar biaya dan pendidikan berkebutuhan khusus ini berfungsi sebagai berikut:

1. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang kurikulum dan kesiswaan
2. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang pendidikan dan tenaga kependidikan
3. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan dibidang sarana dan prasarana
4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas Dinas dibidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini maka Cabang Dinas memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. Pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional dinas pendidikan provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari 4 bagian yakni: Sekretariat, Perencanaan, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan SLB, Cabang Dinas dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 242 tugas pokok di bidang pelayanan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

Apabila dikaitkan dengan tema pembangunan pendidikan nasional tahun 2014-2019 yang menjajapkan manusia Indonesia yang berdaya saing regional, kemudian dituangkan dalam visi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat; Terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing dengan salah satu misinya adalah Meningkatkan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, maka perlu dipertimbangkan bagian dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan yang mengurus peningkatan mutu pendidikan dan kerjasama. Hal ini tentunya sesuai pula dengan PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Upaya pemenuhan standar pendidikan nasional ini bagi pengelola SMA dan SMK tentunya menjadi suatu

keharusan. Oleh karena itu, Dinas pendidikan sebagai Pembina SMA dan SMK serta SLB tentunya perlu mengarahkan pembinaannya kepada pencapaian standar pendidikan nasional ini terutama mulai dari standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana pendidikan, bahkan sampai kepada standar pengelolaan pendidikan. Hal ini tentunya tidak dapat diberikan tugas dan tanggungjawab ini kepada lembaga penjaminan mutu pendidikan (LPMP) saja. Proses menuju kepada perolehan mutu pendidikan yang berstandar nasional tentunya bermula dari tata kelola sekolah itu sendiri. Kelembagaan LPMP lebih kepada upaya memperoleh sertifikasi sekolah karena telah menjalankan standar nasional pendidikan agar memiliki mutu nasional.

Tabel 2.2.1. Kondisi Bagian dan Sub Bagian Organisasi Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat

Organ/Bagian	Bagian/sub bagian	Tugas Pokok dan Rincian Tugas Pokok	Fungsi	Jumlah Personal
Kepala Dinas	8	12	-	1
Sekretariat	3	44	4	
Perencanaan	3	48	4	
Pembinaan SMA	3	46	4	
Pembinaan SMK	3	46	4	
Pembinaan SLB	3	46	4	
UPTD	3	-		
Kelompok Fungsional	-	-		
Cabang Dinas	8	-		
Total	-	242	-	

Berdasarkan kepada table 2.2.1. terlihat bahwa tugas pokok dan rincian Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat seluruhnya adalah 242 butir dengan 8 bidang, diantara bidang yang paling banyak tugas pokoknya adalah bidang perencanaan. Sedangkan bidang pembinaan SMA, SMK dan SLB semua sama memiliki sebanyak 46 tugas pokok, yang terdiri dari 3 seksi yakni seksi kurikulum dan kesiswaan, seksi tenaga teknis dan seksi sarana dan prasarana sekolah. Sehingga terasa penting ditambahkan seksi peningkatan mutu dan kerjasama, agar pembinaan sekolah- sekolah yang ada diarahkan kepada peningkatan daya saing regional. Hal ini sejalan dengan misi yang ketiga dalam pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat yakni peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan.

2.3. Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sumberdaya dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari sumberdaya manusia, tenaga honorer, aset/modal dan unit usaha yang berjalan. Pada saat ini jumlah pegawai dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 281 orang yang terdiri dari pejabat eselon II sebanyak satu orang, eselon III sebanyak 7 orang dan eselon IV terdiri dari 21 orang dan staf sebanyak 256 orang. Untuk lebih rinci dapat dikemukakan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.3.1. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan Struktural

No	SKPD dan UPT	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	1	5	17	197	216
2.	UPT BalteKomdik		1	3	11	15
3.	UPT BLPT		0	0	0	0
4.	Pengawas Sekolah				20	20
	Jumlah	1	7	21	256	281

Perubahan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan telah dipisahkan dengan urusan kebudayaan yang telah menjadi dinas berdiri sendiri, sehingga telah merampingkan struktur organisasi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 dan perda nomor 8 tahun 2016 dinas pendidikan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan Dinas kebudayaan setelah terpisah dari dari pendidikan menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe dinasnya B.

Jumlah pegawai berdasarkan kepada latar belakang pendidikan yang ditamatkan terlihat belum memadai, karena yang berpendidikan perguruan tinggi sangat kecil persentasenya

Tabel 2.3.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	SKPD dan UPT	S.3	S.2	S.1	D1 s/d D4	SMA	SMP	SD	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	0	41	89	7	78	0	1	216
2.	UPT Baltekomdik	0	6	5	0	4	0	0	15
3.	Pengawas Sekolah	0	10	10	0	0	0	0	20
	Jumlah	0	59	106	14	91	0	1	301

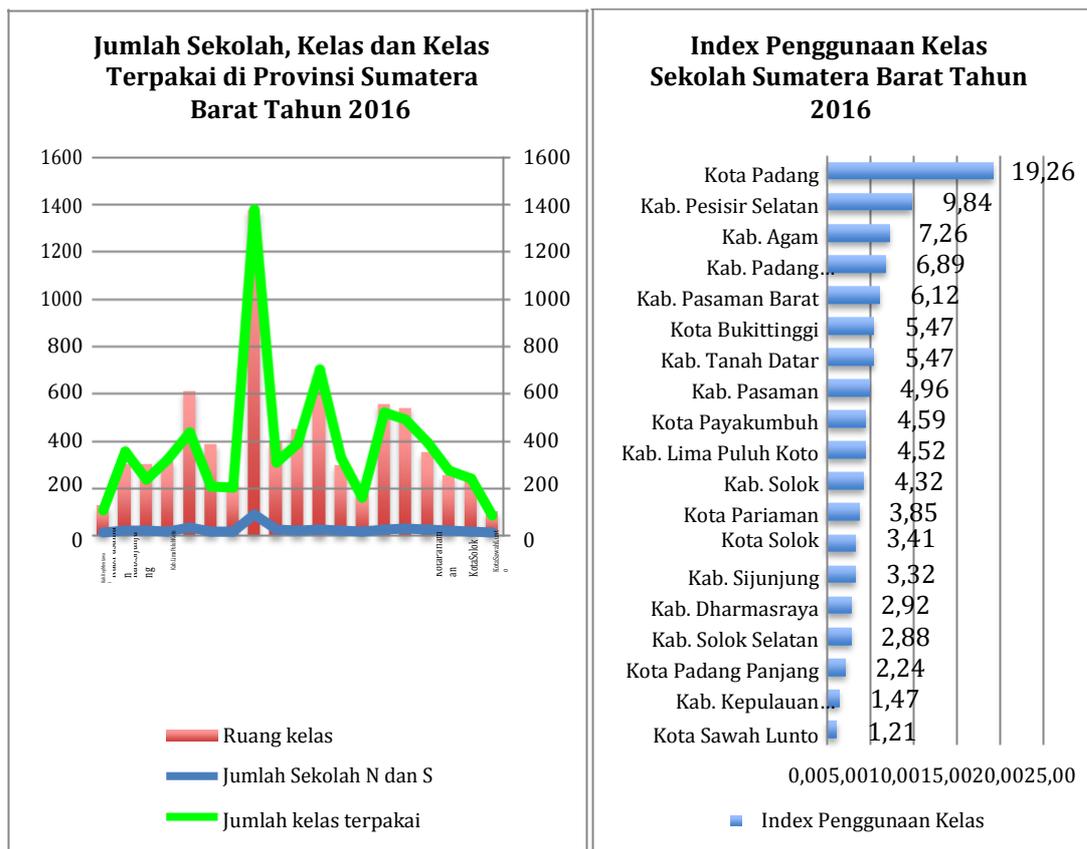
Berdasarkan kepada tabel 2.3.2 di atas terlihat bahwa potensi sumberdaya manusia dinas pendidikan Sumatera Barat sudah memadai dari segi kualitas pendidikan karena sebagian mereka berasal dari guru senior yang telah ditugas karyakan ke dinas pendidikan karena memiliki kinerja dan reputasi akademik yang baik. Sehingga dengan kondisi sumberdaya manusia yang ada, telah memungkinkan dinas pendidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Selanjutnya aset dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh dinas pendidikan Sumatera Barat adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), jumlah guru dan tenaga kependidikan dari semua sekolah menengah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan aset dan modal dalam membangun mutu pendidikan di Sumatera Barat.

Pada gambar 2.3.1 di bawah menjelaskan bahwa jumlah sekolah dan jumlah local yang tersedia pada setiap kabupaten dan kota sudah mencukupi kebutuhan daya tampung siswa baru, karena jumlah ruang kelas dan kelas yang terpakai sudah sama, kecuali di kabupaten Pasaman Barat dan Dharmasraya jumlah kelas terpakai masih jauh lebih rendah dari jumlah kelas yang ada.

Ketersediaan sekolah dengan jumlah kelasnya ini paling tinggi terdapat di Kota yakni Kota Padang yang mencapai jumlah sekolah sebanyak 90 negeri dan swasta dengan jumlah kelas total adalah sebanyak 1.377 lokal dan local yang terpakai 1.379 lokal dengan asumsi jumlah murid satu local 30 orang. Hal ini berarti sekolah di Kota Padang jumlah siswa per local melebihi 30 orang.

Berikutnya di kabupaten Pesisir Selatan dengan jumlah sekolah sebanyak 27 jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Pasaman Barat yang mencapai 35 buah dan Padang Pariaman sebanyak 33 buah sekolah, tetapi dua kabupaten terakhir kalah jumlah kelasnya dibandingkan dengan kabupaten Pesisir selatan yang mencapai 622 ruang kelas, sementara kabupaten Pasaman Barat sebesar 610 kelas dan kabupaten Padang Pariaman sebanyak 540 ruang kelas. Hal ini berarti daya tampung fisik sekolah di kabupaten Pesisir Selatan lebih tinggi di bandingkan dengan 2 kabupaten lainnya yang merupakan daerah yang memiliki ruang kelas terpakai paling tinggi di Sumatera Barat.

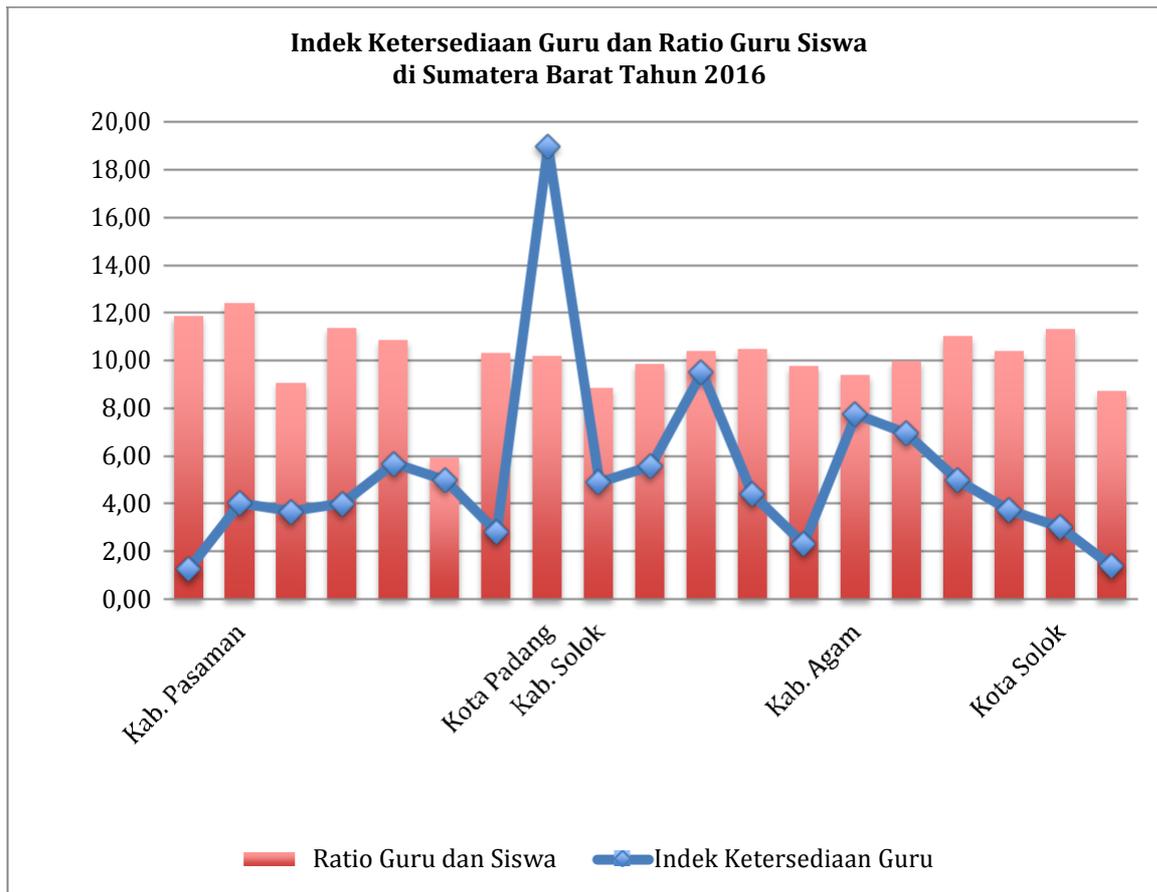


Gambar 2.3.1. Jumlah Sekolah dan Lokal Tersedia Menurut Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat

Indek penggunaan kelas optimal itu terdapat di Kota Padang sebesar 19,26 disusul oleh Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 9,84 dan Kabupaten Agam sebesar 7,26, sedangkan kabupaten Pasaman Barat sebesar 6,12. Angka indek penggunaan kelas yang paling rendah terdapat pada Kota Sawahlunto sebesar 1,21.

Gambar 2.3.2. di bawah memberikan informasi bahwa ratio guru dengan siswa sudah memperlihatkan ratio ideal, ratio paling tinggi itu terdapat pada kabupaten Pasaman dan Kepulauan Mentawai, namun indek ketersediaan gurunya masih rendah. Apabila dikaitkan dengan tingkat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) ternyata kedua kabupaten ini juga paling rendah diantara yang lainnya.

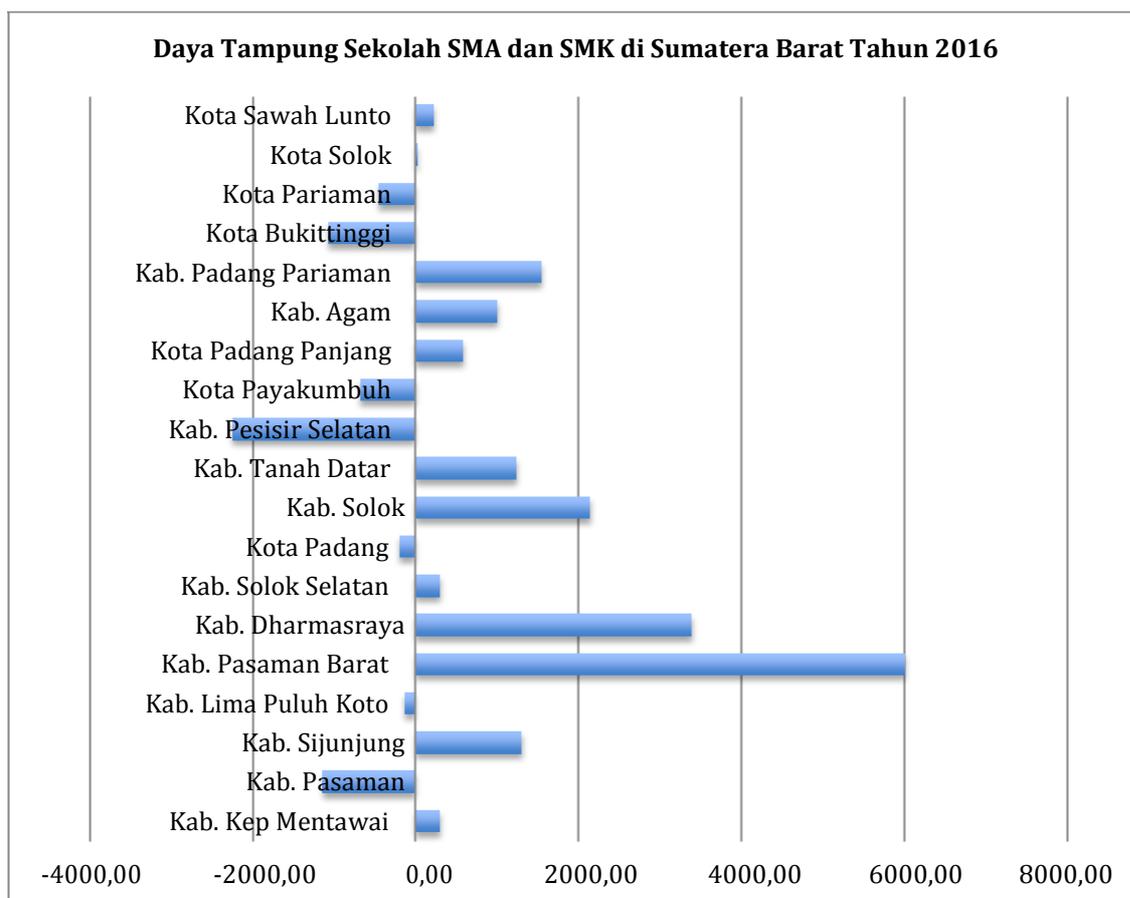
Ratio guru dan siswa paling rendah terdapat pada kabupaten Dharmasraya dan kabupaten Sijunjung, walaupun ketersediaan gurunya sudah menyamai ratio guru-siswanya, sehingga daya tampungnya sudah lebih besar dari kapasitas sekolah yang ada, dan angka partisipasi kasarnya untuk kabupaten dharmasraya sebesar 81,73 sudah di atas rata-rata APK provinsi Sumatera barat sebesar 80.46.



Gambar 2.3.2. Grafik Perbandingan Ratio Guru dan Siswa SMA/SMK dan Indek Ketersediaan Guru SMA/SMK di Provinsi Sumatera Barat

Disamping itu, indeks ketersediaan guru paling tinggi itu terdapat pada Kota Padang yang mencapai 18,98 dan paling rendah di kabupaten Kepulauan Mentawai yang mencapai 1,24 dan Kota Sawahlunto mencapai 1,40. Semakin rendahnya angka indeks tentunya kemampuan daya tampung sekolah untuk menerima murid baru semakin rendah pula, itulah sebabnya kabupaten Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto tingkat APK SMA/SMKnya sebesar 79,77 masih di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat. Artinya faktor rendahnya angka partisipasi kasar juga disebabkan oleh ketersediaan guru yang belum mencukupi di wilayah ini, disamping daya tampung yang memperlihatkan tingkat ketersediaan local yang masih rendah.

Gambar 2.3.3. di bawah memperlihatkan tingkat daya tampung sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang dihitung dari jumlah local yang tersedia, jumlah local yang terpakai dan jumlah sekolah yang ada pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terdapat 7 kabupaten dan Kota yang masih mengalami kekurangan daya tampungnya yakni 4 kota terdiri dari Kota Padang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kota Pariaman. Sedangkan terdapat 3 kabupaten yakni kabupaten Pesisir Selatan, Pasaman dan 50 Kota.



Gambar 2.3.3. Gambaran Tingkat Daya Tampung SMA dan SMK di Sumatera Barat Tahun 2016

Pada wilayah kabupaten Pesisir Selatan yang memiliki kekurangan daya tampung yang paling tinggi bersama kota Bukittinggi, ternyata ini masalah tingginya jumlah siswa yang masuk ke sekolah karena kedua wilayah ini angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) nya sudah jauh di atas rata-rata APK dan APM SMA dan SMK provinsi Sumatera Barat. Sementara indeks ketersediaan gurunya masih rendah. Oleh karena itu dapat dikemukakan bahwa apabila daya tampungnya masih rendah sedangkan angka partisipasi kasar dan murninya sudah di atas rata-rata provinsi Sumatera Barat, maka wilayah ini mengalami masalah kekurangan guru. Sebaliknya apabila daya tampungnya sudah melebihi jumlah kelas yang tersedia, sedangkan angka APK dan APMnya sudah di atas rata-rata Sumatera Barat, maka ini masalahnya terletak pada kekurangan sarana fisik sekolah seperti local yang tersedia tidak sebandingnya dengan tingginya potensi usia sekolah yang akan bersekolah di SMA dan SMK.

2.4. Kinerja Layanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat

Kinerja layanan Dinas pendidikan mengacu kepada tatakelola sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah khusus (SMK) dan sekolah luar biasa yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio dan semua para sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menunjung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2011-2015.

Tabel 2.4.1. Pencapaian kinerja Pelayann dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat Tahun 2011-2015

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A	PENDIDIKAN FORMAL																	
1	SD																	
(a)	Partisipasi Anak Bersekolah	95	98%	94.00	95.00	96.00	97.00	98.00	98.10	98.38	98.81	98.99	99.18	104.36	103.56	102.93	102.05	101.20
(b)	Angka Putus Sekolah	<1	0,4%	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
(c)	Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	92%	90.12	90.29	91.12	91.75	92.00	73.50	75.60	77.46	85.00	88.60	81.56	83.73	85.01	92.64	96.30
(d)	Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	91.65	92.75	94.16	96.89	98.00	86.50	86.90	87.06	87.10	87.17	94.38	93.69	92.46	89.90	88.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(e)	Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.11	92.79	93.17	94.25	95.00	31.59	31.80	-	-	-	34.67	34.27	0.00	0.00	0.00
(f)	Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	95	100%	96.51	97.89	98.11	99.14	100.00	95.60	96.10	96.91	98.16	98.92	99.06	98.17	98.78	99.01	98.92
(g)	Jml Siswa per Kls	30-40	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	28-32	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
(h)	Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	90.50	91.00	91.25	93.50	98.90	98.37	97.85	97.07	98.42
(i)	Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMP	95	99%	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	101.05	100.57
2 SMP																		
(a)	Partisipasi Anak Bersekolah	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.64	90.79	92.22	99.27	99.28	98.51	98.68	99.16	105.61	104.51

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(b)	Angka Putus Sekolah	<1	0.4%	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
(c)	Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	88.00	88.76	88.88	88.92	90.40	96.70	96.48	95.57	94.60	95.16
(d)	Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90%	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	83.00	95.00	87.00	88.79	90.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
(e)	Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	98%	93.00	95.00	96.00	97.00	98.00	93.00	95.00	96.00	97.00	81.00	100.00	100.00	100.00	00.00	82.65
(f)	Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	86.63	90.50	-	-	-	95.20	98.37	0.00	0.00	0.00
(g)	Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75	97.60	97.90	98.46	98.57	98.75
(h)	Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(i) Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(j) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke SMA	70	99%	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	01.28	96.53
3	SMA																	
	(a) Partisipasi Anak Bersekolah	90	92%	90.25	90.50	91.10	91.60	92.00	68.12	71.38	74.07	81.97	82.05	75.48	78.87	81.31	89.49	89.18
	(b) Angka Putus Sekolah	<1	0,6%	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	31.43	1.58
	© Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95%	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	37.30	100.00	100.00	100.00	100.00	39.26
	(d) Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90%	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(e)	Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
(f)	Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	98 %	92.00	94.00	95.00	97.00	98.00	92.61	92.61	-	-	-	100.66	98.52	0.00	0.00	0.00
(g)	Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
(h)	Jml Siswa per Kls	30-40	30-32	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	30-32	30-32	30-32	30-32	32-36	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
(i)	Jml Siswa dg Nilai Memuaskan Terhadap Uji sampai Mutu SPN	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	0.95	100.00	100.00	100.00	00.00	1.00
(j)	Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	25	27 %	22.00	25.00	30.00	31.00	35.00	25.52	25.97	26.05	37.00	41.32	116.00	103.88	86.83	19.35	118.06
4 SMK																		

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(a)	Angka Putus Sekolah	<1	0.6 %	0.90	0.80	0.70	0.65	0.01	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	110.00	127.14	41.54	9500.00
(b)	Jml Sklh Memiliki Sarpras sesuai Standar Teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	62.00	63.00	63.50	64.00	65.00	68.13	68.48	68.28	68.09	68.42
(c)	Kepemilikan Sklh terhadap TK Non Guru	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	80.00	81.50	82.00	82.40	83.00	97.56	97.02	95.35	93.64	92.22
(d)	Pemenuhan Jml Guru yg Diperlukan	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	89.00	90.00	90.60	91.00	93.60	97.80	97.83	97.42	96.81	98.53
(e)	Kualifikasi Guru yg Sesuai Kompetensi	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.95	92.95	-	-	-	101.04	101.03	0.00	0.00	0.00
(f)	Kelengkapan Buku Pelajaran Siswa	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00
(g)	Jml Siswa per Kls	30-40	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	32-36	100.00	100.00	100.00	00.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(h) Jml Lulusan yg Melanjutkan ke PT	20	20 %	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(i) Jml Lulusan yg diterima di Dunia Kerja sesuai Keahlian	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
B	PENDIDIKAN NON FORMAL																	
1	Pendidikan Kesetaraan																	
	(a) Bisa membaca dan menulis	100	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70	98.80	99.00	99.50	99.60	99.70
	(b) Orang buta aksara dalam kelompok usia 15-44 Th.	<7	4 %	5.00	4.80	4.60	4.40	4.00	1.50	1.78	0.83	0.65	0.41	30.00	37.08	18.04	14.77	10.25

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	© Orang buta aksara dalam kelompok usia diatas 44 Th.	<30	15 %	20.00	19.00	18.00	16.00	15.00	9.43	7.97	7.89	7.56	7.32	47.15	41.95	43.83	47.25	48.80
2	Program Paket A																	
	(a) Peserta Paket A bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	85	90 %	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	82.00	83.60	84.70	85.50	86.00	95.35	96.09	96.25	96.07	95.56
	(b) Peserta didik Paket A yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	8.00	7.00	5.70	4.50	77.78	100.00	100.00	95.00	90.00
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	96.00	97.30	98.20	93.00	94.67	100.79	101.34	101.35	95.53	96.60

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(d) Jml peserta paket A yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	95	98 %	95.25	96.01	96.89	97.35	98.00	84.60	86.00	86.70	87.90	89.55	88.82	89.57	89.48	90.29	91.38
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket A yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	98.90	98.91	98.92	99.47	99.68
3	Paket B																	
	(a) Pesrta Paket B bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	90	92 %	90.25	90.82	91.04	91.70	92.00	83.50	83.60	84.75	85.95	86.88	92.52	92.05	93.09	93.73	94.43

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(b)	Peserta didik Paket B yg tdk aktif	<10	5 %	9.00	8.00	7.00	6.00	5.00	7.00	6.50	6.70	5.60	4.00	77.78	81.25	95.71	93.33	80.00
©	Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	90 %	82.00	84.00	86.00	88.00	90.00	85.20	87.30	88.20	83.00	84.67	103.90	103.93	102.56	94.32	94.08
(d)	Jml peserta paket B yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	50	60 %	52.00	54.00	56.00	58.00	60.00	50.00	52.60	53.80	54.00	58.75	96.15	97.41	96.07	93.10	97.92
(e)	Pemenuhan jml tutar Paket B yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
(f)	Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4	Program Paket C																	
	(a) Peserta Paket C bagi penduduk usia sekolah yang belum bersekolah di SD	70	75 %	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00	70.00	72.30	73.50	73.60	74.89	98.59	100.42	100.68	99.46	99.85
	(b) Peserta didik Paket C yg tdk aktif	<5	3 %	4.70	4.20	3.90	3.30	3.00	4.00	4.10	3.60	3.15	2.95	85.11	97.62	92.31	95.45	98.33
	© Jml kelulusan peserta didik yg mengikuti ujian kesetaraan	80	85 %	81.00	82.00	83.00	84.00	85.00	80.20	81.60	82.00	82.50	80.37	99.01	99.51	98.80	98.21	94.55
	(d) Jml peserta paket C yg dapat melanjutkan ke jenjang yg lebih tinggi	10	15	11.00	12.00	13.00	14.00	15.00	7.50	8.76	9.00	8.80	10.50	68.18	73.00	69.23	62.86	70.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(e) Pemenuhan jml tutar Paket C yg dibutuhkan	100	100 %	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75	90.00	92.40	93.50	94.00	96.75
	(f) Jml PKBM yg memiliki sarpras minimal sesuai dg standar teknis	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	91.00	92.00	93.50	94.70	100.00	101.11	102.22	103.89	105.22
5	Pendidikan Taman Kanak-Kanak																	
	(a) Jml anak usia 4-6 yg mengikuti program TK	20	25 %	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	21.00	22.00	23.00	24.00	25.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	(b) Guru yg layak mendidik TK sesuai dg standar kompetensi Nasional	90	90 %	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	© TK yg memiliki sarpras bermain	90	95 %	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	91.00	92.00	93.00	94.00	95.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	(d) TK yg telah menerapkan manajemen berbasis sekolah	60	70 %	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	62.00	64.00	66.00	68.00	70.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	Indikator Kinerja Kunci (Permendagri 73 Th 2009)																	
1	Angka Rata-rata lama bersekolah	7.4	8.40	9.35	9.70	10.05	8.78	8.88	8.57	8.60	8.63	8.71	8.91	91.66	88.66	85.87	99.20	100.34
2	Angka melek huruf	100%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92	97.16	97.23	97.38	99.50	99.92
3	Pembinaan guru jenjang SD	35%	40.00	36.00	37.00	38.00	39.00	40.00	35.00	36.00	37.50	38.00	39.00	97.22	97.30	98.68	97.44	97.50
4	Pembinaan guru jenjang SMP	46%	50.00	47.00	48.00	49.00	49.50	50.00	46.00	46.70	47.00	48.76	49.67	97.87	97.29	95.92	98.51	99.34
5	Pembinaan guru jenjang SMA/SMK	37%	40.00	37.98	38.25	38.89	39.25	40.00	35.00	36.20	37.60	38.90	39.58	92.15	94.64	96.68	99.11	98.95

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6	APM SD/MI/Paket A	95%	98.00	99.67	99.75	100.00	100.00	100.00	94.46	94.49	94.48	99.56	99.57	94.77	94.73	94.48	99.56	99.57
7	APM SMP/MTs/Paket B	79%	80.00	78.80	80.35	82.90	83.45	85.00	75.43	80.90	80.95	81.12	81.15	95.72	100.68	97.65	97.21	95.47
8	APM SMA/SMK/MA/Paket C	72%	73.00	62.50	67.50	72.50	75.00	80.00	50.34	69.67	69.88	73.08	73.10	80.54	103.21	96.39	97.44	91.38
9	Angka Putus sekolah SD	<1	0.40	0.80	0.70	0.60	0.50	0.40	0.17	0.15	0.21	0.21	0.22	21.25	21.43	35.00	42.00	55.00
10	Angka Putus sekolah SMP	<1	0.40	0.90	0.80	0.60	0.50	0.40	0.49	0.45	0.37	0.44	0.46	54.44	56.25	61.67	88.00	115.00
11	Angka Putus sekolah SMA/SMK	<1	0.60	0.90	0.85	0.80	0.70	60.00	0.87	0.88	0.89	0.92	0.95	96.67	103.53	111.25	31.43	1.58
12	Angka kelulusan SD	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	99.53	96.72	97.99	97.99	96.07	104.49	100.74	101.14	00.66	97.04
13	Angka kelulusan SMP	98%	99.00	95.25	96.01	96.89	97.35	99.00	95.16	97.56	99.02	99.95	99.84	99.91	101.61	102.20	02.67	100.85
14	Angka kelulusan SMA/SMK	97%	98.00	97.21	97.32	97.49	97.78	98.00	95.25	99.40	85.39	99.60	99.95	97.98	102.14	87.59	01.86	101.99
15	Angka Melanjutkan dari SD ke SMP	95%	99.00	96.14	97.01	97.78	98.25	99.00	97.30	95.28	94.53	99.28	99.56	101.21	98.22	96.68	01.05	100.57

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM %/ org	Target IKK	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
16	Angka Melanjutkan dari SMP ka SMA/SMK	70%	99.00	90.49	93.12	95.11	97.25	99.00	88.90	90.81	99.13	98.49	95.56	98.24	97.52	104.23	01.28	96.53
17	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	92%	95.00	92.50	93.00	93.50	94.00	95.00	83.12	87.37	86.88	87.35	91.01	89.86	93.95	92.92	92.93	95.80

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas

Pendidikan

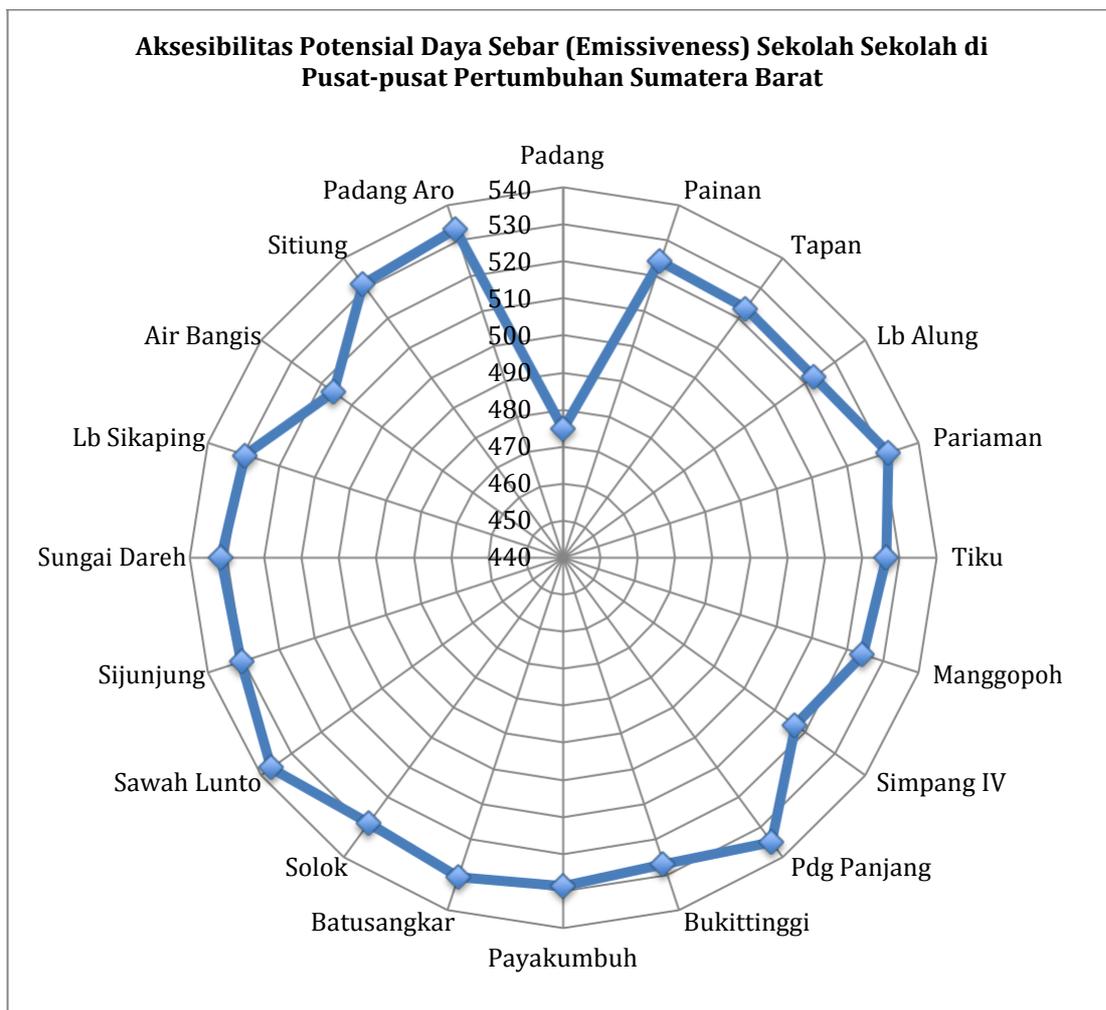
Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan berdasarkan pilar penyelenggaraan pendidikan yang telah dicanangkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan selama ini. Yakni pilar peningkatan akses dan pemerataan layanan pendidikan, tantangan dan peluang terhadap kondisi guru dan tenaga kependidikan. Tantangan terhadap kondisi efektifitas dan efisiensi pelayanan pendidikan, tantangan dan peluang penyelenggaraan pendidikan berkarakter dalam penyelenggaraan pendidikan Sumatera Barat.

2.5.1. Akses dan Pemerataan Layanan Pendidikan

Kondisi akses dan pemerataan layanan pendidikan berkaitan dengan keterjangkauan pendidikan SMA dan SMK oleh penduduk usia sekolah, termasuk juga oleh rumah tangga penduduk yang miskin. Dengan demikian aksesibilitas pendidikan adalah kemudahan dan kesamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pendidikan. Indikator yang digunakan untuk mengukur aksesibilitas pendidikan dengan pemerataan kesempatan memasuki sekolah/non diskriminasi, aksesibilitas fisik (kemudahan jangkauan secara geografis), aksesibilitas ekonomi, karakteristik system pelayanan, dan pemerataan kesempatan menikmati pendidikan dalam kehidupan masyarakat. Pada bagian ini akan ditemukan permasalahan yang dihadapi Sumatera Barat selama ini, dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan aksesibilitas fisik, ekonomi dan seterusnya itu.

Aksesibilitas potensial merupakan teknik analisis yang menggunakan jarak lokasi antar pusat pertumbuhan dalam satu wilayah dengan kegiatan atau pelayanan. Analisis ini

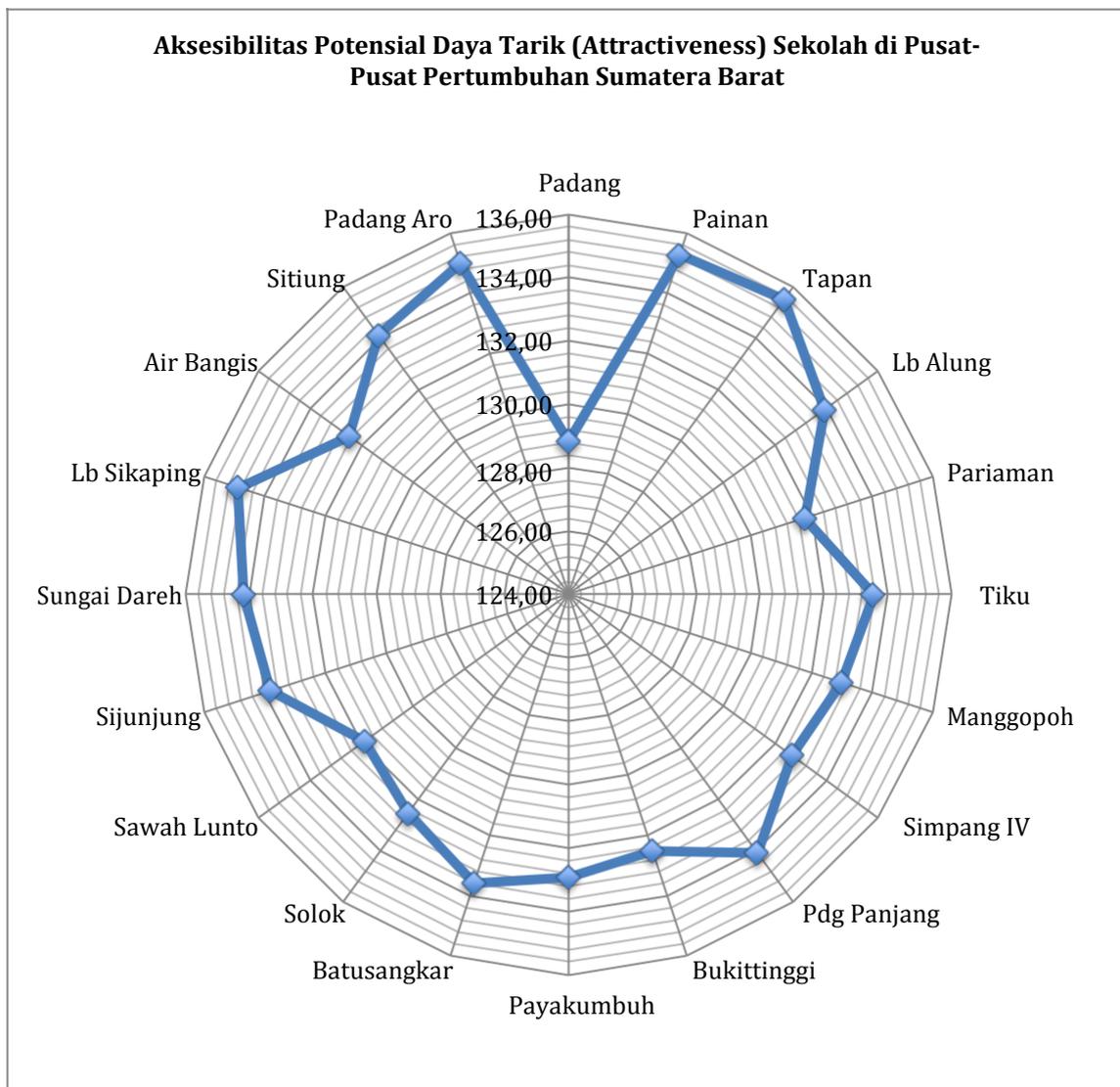
dikembangkan untuk mempertimbangkan kemampuan aktifitas suatu wilayah dalam hal ini fungsi pelayanan pendidikan yakni sekolah terhadap kebutuhan pendidikan bagi penduduk usia sekolah; dalam hal ini adalah penduduk usia sekolah SMA/SMK di pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Sumatera Barat, yang diindeks dengan jarak lokasi dari fungsi pelayanan itu dibangun. Semakin besar nilai matrik Aksesibilitas potensial (A(P), semakin sulit akses. Sebaliknya semakin rendah nilai matrik A(P) makin mudah akses. Nilai matrik aksesibilitas potensial menggambarkan kemampuan daya tarik fungsi pelayanan terhadap daerah sekitarnya sehubungan jarak lokasi dan kemampuan daya sebar fungsi pelayanan terhadap daerah hinterlandnya.



Gambar 2.5.1.1 Kondisi Aksesibilitas Potensial Sekolah –Sekolah di Pusat-pusat Pertumbuhan Wilayah Sumatera Barat

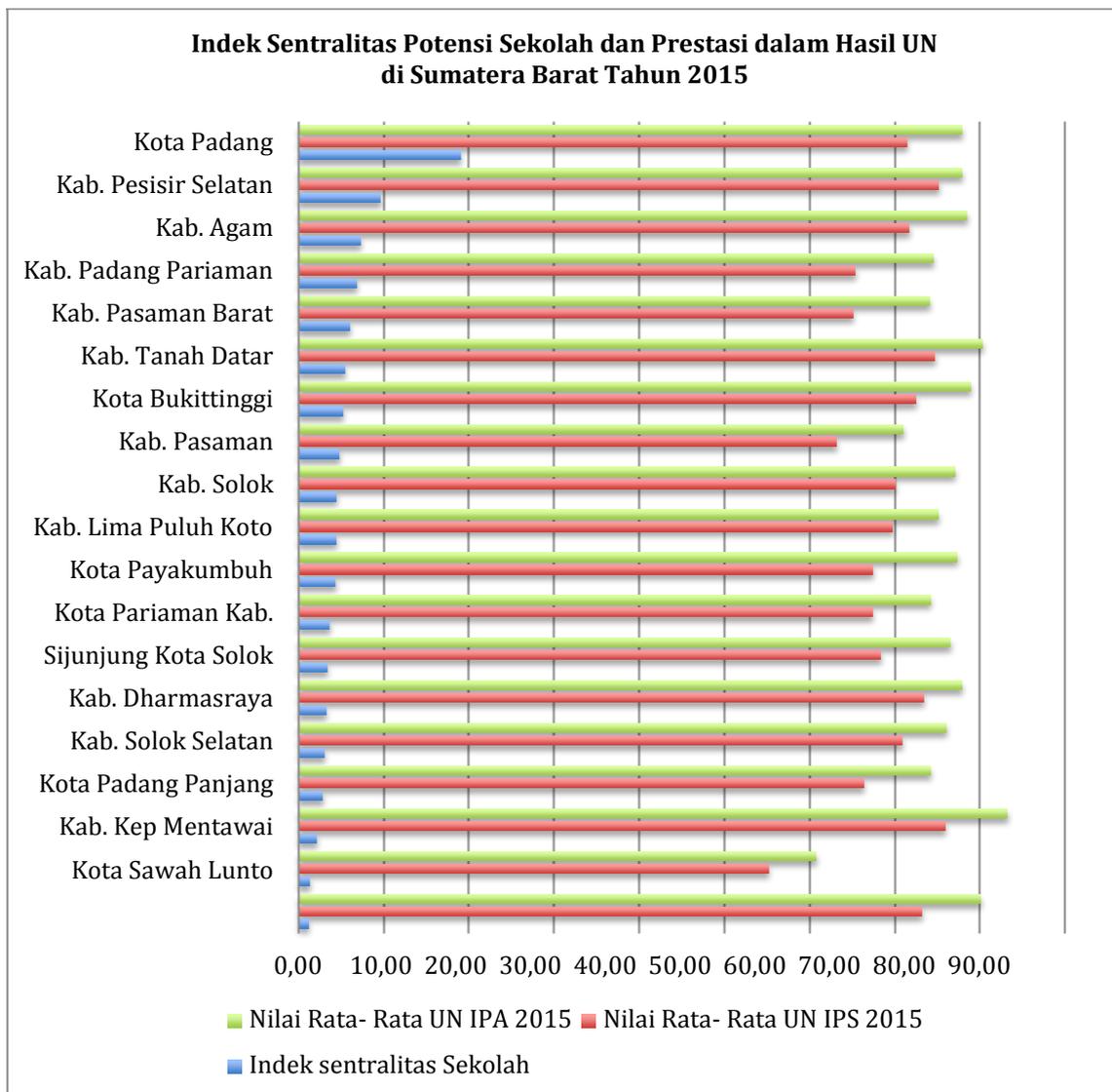
Pada gambar 2.5.1.1.dan 2.5.1.2. memberikan informasi bahwa sekolah-sekolah di Kota Padang memiliki daya sebar dan daya tarik yang lebih baik karena mampu menarik daerah-daerah hinterlandnya untuk dapat menikmati fungsi pelayanan sekolah-sekolah yang ada. Sedangkan sekolah-sekolah yang ada di pusat pertumbuhan Sawahlunto,

Padangpanjang, dan Padang Aro memiliki daya sebar pelayanan sekolah yang rendah, karena hanya melayani daerah sekitarnya saja.



Gambar 2.5.1.2. Kondisi aksesibilitas potensial daya tarik sekolah-sekolah pada pusat pertumbuhan wilayah Sumatera Barat

Gambar 2.5.1.3. melukiskan bahwa indeksentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang memberikan informasi tentang kondisi aksesibilitas karakteristik system pelayanan sekolah dalam pendidikan terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat pada setiap kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Indek yang paling tinggi menggambarkan semakin lengkapnya fungsi pelayanan sekolah yang dapat diakses oleh penduduk, diantara fungsi pelayanan itu adalah jumlah sekolah, jumlah local, jumlah guru, jumlah siswa, jumlah laboran, jumlah pustakawan, jumlah pengawas dan tenaga administrasi sekolah.



Gambar 2.5.1.3. Indek Sentralitas Potensi sekolah dan Hasil Capaian UN Tahun 2015

Berdasarkan kepada kompleksitas fungsi pelayanan pendidikan, yang mencerminkan aksesibilitas, maka Kota padang memiliki indek fungsi pelayanan sekolah yang paling tinggi sebesar 19.10, disusul oleh kabupaten Pesisir Selatan dengan indek sebesar 9,73 dan kabupaten Agam sebesar 7.40. indek sentralitas fungsi pelayanan pendidikan yang paling rendah adalah Kota Sawahlunto sebesar 1.26, kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 1.43 dan Kota Padangpanjang sebesar 2.22.

Apabila di sandingkan dengan prestasi dalam perolehan nilai ujian nasional dengan asumsi semakin lengkap fungsi pelayanan tentunya kualitas juga semakin lebih baik, tetapi ternyata belum terbukti, rangking nilai UN IPS yang paling tinggi itu diraih oleh sekolah SMA/SMK Kota Padangpanjang dengan nilai rata-rata sebesar 76.01 dan nilai UN IPA nya sebesar 83.34. demikian juga untuk ota Sawahlunto perolehan nilai rata-rata UNnya untuk IPS sebesar 73.3 dan UN IPA sebesar 80.18 yang merupakan rangking tiga tertinggi di

Sumatera Barat. Untuk Kota Padang sendiri yang memiliki kecukupan fungsi pelayanan pendidikan nilai UN IPSnya sebesar 71.56 dan UN IPA sebesar 78.01 berada di bawah Kota sawahlunto dan Padangpanjang.

Artinya, kecukupan fungsi pelayanan pendidikan dan keterjangkauan terhadap akses pendidikan ternyata belum linear dengan prestasi dan kualitas pendidikan yang diraih. Tentunya, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya upaya peningkatan suasana pembelajaran di sekolah yang mendukung kepada pencapaian hasil nilai UN yang lebih baik. Upaya peningkatan kualitas suasana pembelajaran ini, memiliki banyak factor yang mempengaruhinya, mulai dari ketersediaan fasilitas yang menunjang kepada suasana pembelajaran seperti perpustakaan, laboratorium, kualitas guru dan ketersediaan prasarana yang mendukung seperti akses kepada IPTEK pendidikan seperti internet, dan sumber media informasi lainnya sebagai sumber-sumber belajar selain dari guru dan sekolah. Tentunya factor yang dominan mempengaruhi pencapaian perolehan nilai UN yang terbaik ini memerlukan suatu kajian tersendiri pula, mengingat banyaknya factor yang akan mempengaruhinya.

2.5.2. Kondisi Guru dan Tenaga Kependidikan

Kondisi guru dan tenaga kependidikan berkaitan dengan jumlah dan kualifikasinya, sebarannya, dan tingkat kecukupannya. Permasalahan kondisi guru yang dilihat bukan saja jumlahnya tetapi sebarannya setiap sekolah dan keberimbangan bidang studi guru dengan bidang mata pelajaran yang diasuhnya. Terdapat indikasi bahwa guru banyak yang mengajar di luar kompetensi pokoknya, karena mengejar beban 24 jam pelajaran sebagai syarat memperoleh hak sertifikasi guru.

Jumlah guru di provinsi Sumatera Barat tahun 2016 adalah sebanyak 21.372 orang yang tersebar pada 489 sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta. Rata-rata jumlah guru pada setiap sekolah adalah sebanyak 43-44 orang. Apabila dibandingkan dengan jumlah mata pelajaran yang ada hal ini sudah mencukupi, tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah kelas dan rombongan belajar yang ada jumlah ini tentunya masih belum mencukupi. Terjadi penumpukan guru pada mata pelajaran tertentu, terutama pada mata pelajaran IPA dan IPS, Teknik, tetapi kekurangan pada guru bidang studi khusus seperti informatika dan keterampilan keprigelan dan kecakapan hidup seperti menggambar, menari, melukis, akuntan, statistic dan keterampilan lainnya yang relevan dengan dunia kerja.

Disamping ketidak seimbangan ketersediaan guru dalam kompetensi yang dilekatkan kepada lulusan SMA dan SMK juga ketidakseimbangan ketersediaan guru dalam sebaran setiap sekolah di wilayah kabupaten dan kota. Ketersediaan guru dan sekolah tertumpuk pada pusat pertumbuhan Kota Padang dengan jumlah sekolahnya sebanyak 2186 sekolah negeri dan swasta dengan jumlah guru 4057 orang dengan rata-rata

ketersediaan guru setiap sekolah adalah 45 orang ini berada jauh di atas rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah di provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.5.2.1. Ketersediaan Guru dan Tenaga Kependidikan di Sekolah –Sekolah Sumatera barat

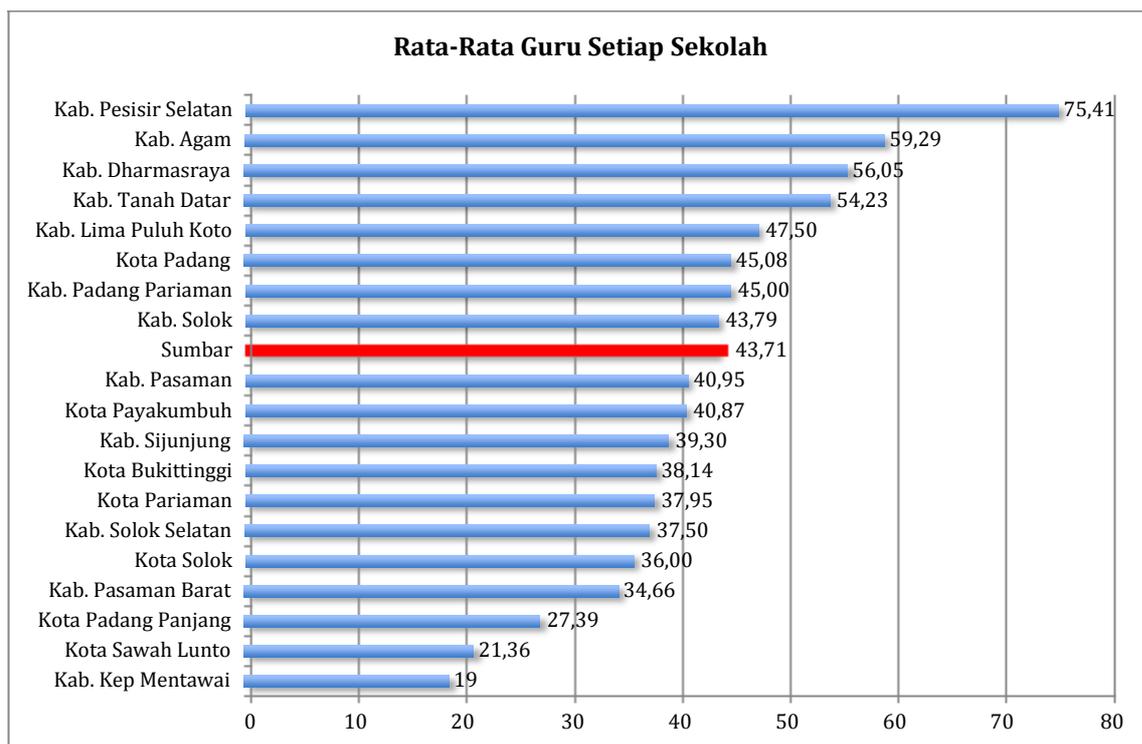
Kabupaten dan Kota	Jumlah guru	Persentase guru	Rata-Rata Ketersediaan guru per Sekolah	Jumlah Tenaga Kependidikan	Persentase	Rata-rata
Kab. Kep Mentawai	266	1.24	19	109	0.87	7.79
Kab. Pasaman	860	4.02	40.95	716	5.69	34.10
Kab. Sijunjung	786	3.68	39.30	632	5.02	31.60
Kab. Lima Puluh Koto	855	4.00	47.50	772	6.14	42.89
Kab. Pasaman Barat	1213	5.68	34.66	725	5.76	20.71
Kab. Dharmasraya	1065	4.98	56.05	297	2.36	15.63
Kab. Solok Selatan	600	2.81	37.50	509	4.05	31.81
Kota Padang	4057	18.98	45.08	2186	17.38	24.29
Kab. Solok	1051	4.92	43.79	922	7.33	38.42
Kab. Tanah Datar	1193	5.58	54.23	799	6.35	36.32
Kab. Pesisir Selatan	2036	9.53	75.41	1158	9.21	42.89
Kota Payakumbuh	940	4.40	40.87	303	2.41	13.17
Kota Padang Panjang	493	2.31	27.39	182	1.45	10.11
Kab. Agam	1660	7.77	59.29	1175	9.34	41.96
Kab. Padang Pariaman	1485	6.95	45.00	886	7.04	26.85

Kota Bukittinggi	1068	5.00	38.14	431	3.43	15.39
Kota Pariaman	797	3.73	37.95	269	2.14	12.81
Kota Solok	648	3.03	36.00	283	2.25	15.72
Kota Sawah Lunto	299	1.40	21.36	225	1.79	16.07
Sumbar	21372	100	43.71	12579	100	25.72

Tabel 2.5.2.1. menjelaskan juga bagaimana perbandingan ketersediaan guru dan sebarannya pada kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Persentase guru paling tinggi terdapat pada Kota Padang sebanyak 18,98 persen dari total guru di Sumatera Barat, disusul oleh Pesisir Selatan sebesar 9,53 persen dan kabupaten Agam sebesar 7.77 persen. Sedangkan porsi guru paling kecil itu terdapat pada kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya sebesar 1,24 persen dan Kota Sawahlunto sebesar 1,40 persen. Meskipun Kota Padang, dan Agam memiliki porsi terbesar ketersediaan guru, namun rata-rata ketersediaan guru setiap sekolah itu yang mencerminkan ratio guru setiap sekolah paling tinggi pada kabupaten Pesisir Selatan sebesar 75,41 persen, disusul oleh kabupaten Agam sebesar 59,29 persen. Sedangkan ratio guru setiap sekolah paling rendah terdapat pada kota Sawahlunto sebesar 21,36 dan Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

Tenaga kependidikan terdiri dari laboran, pustakawan dan administrator sekolah. Persentase jumlah rata rata tenaga kependidikan paling besar terdapat pada kabupaten Pesisir Selatan dan kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 42,89 persen disusul oleh kabupaten Agam sebesar 41,96 persen. Meskipun demikian porsi paling banyak itu untuk tenaga kependidikan paling besar tetap ada di Kota Padang sebesar 17,38 persen dan porsi terkecil itu ada di kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 0,87 persen, dan Kota Padangpanjang sebesar 1,45 persen.

Data – data ini memperlihatkan bahwa provinsi Sumatera Barat masih mengalami kekurangan tenaga kependidikan terutama untuk laboran dan pustakawan, serta guru bantu bengkel yang memiliki keahlian khusus pada sekolah-sekolah menengah kejuruan. Apabila dirinci ketersediaan guru dan tenaga kependidikan berdasarkan keahlian khususnya tentunya kekurangan ini semakin banyak terasa, apalagi jika dikaitkan dengan pencapaian keunggulan dan daya saing pendidikan di level regional , tentunya hal ini sangat mengkuatirkan sekali.



Gambar 2.5.2.1. Rata-Rata Guru Setiap Sekolah Menurut Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat

Gambar 2.5.2.1. menjelaskan bahwa terdapat 11 wilayah kabupaten dan kota yang rata-rata jumlah guru nya masih di bawah provinsi dan siasanya sebanyak 8 kabupaten dan Kota rata-rata ketersediaan gurunya sudah diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Pesisir Selatan, Agam dan Dharmasraya memiliki persentase ketersediaan guru setiap sekolah yang sudah cukup baik, berada diatas rata-rata provinsi yang mencapaia 43,79 persen, meskipun jika dibandingkan dengan ratio guru-siswanya sebesar 1:10,39. Terdapat 3 kabupaten dan Kota yang memiliki rata-rata ketersediaan gurunya paling rendah yakni kabupaten kepulauan Mentawai sebesar 19.00 dan Kota sawahlunto sebesar 21,36 persen, disusul Kota Padangpanjang sebesar 27,39 persen.

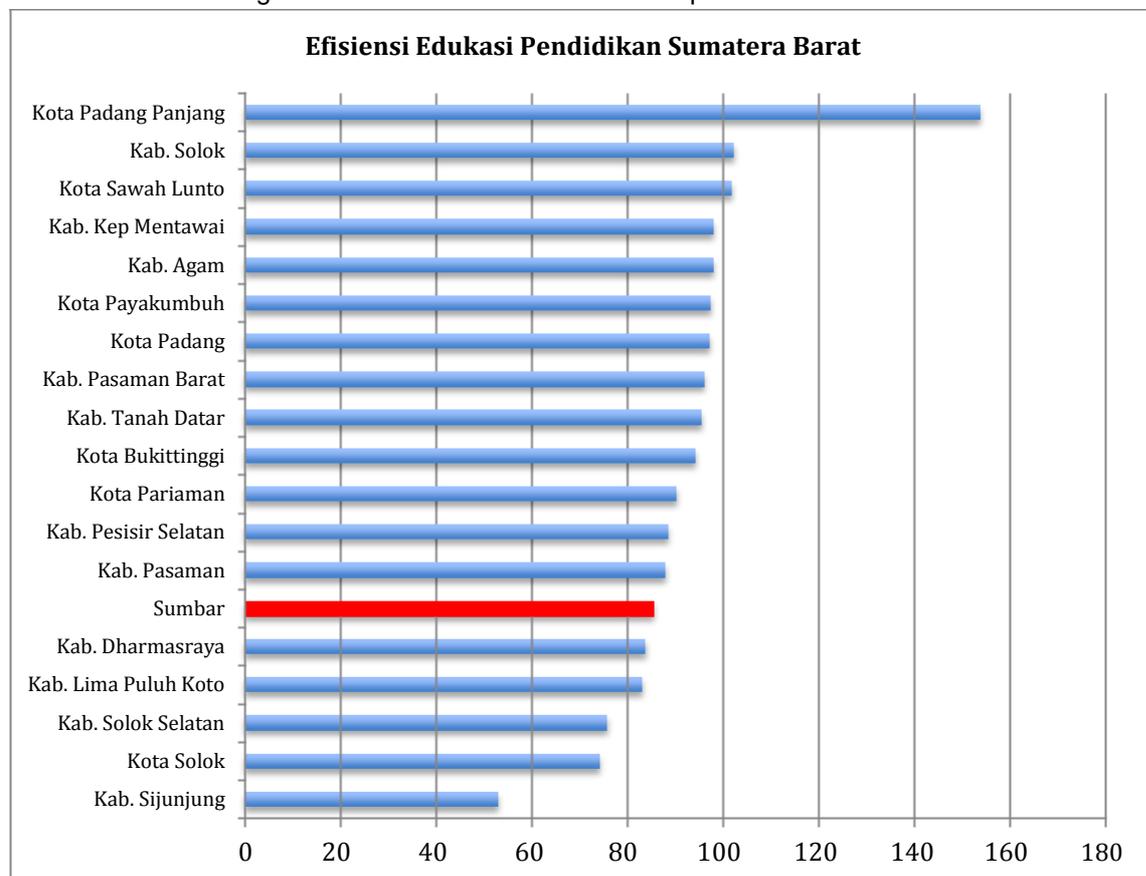
Data-data ketersediaan guru diatas memperlihatkan bahwa ketersediaan guru per kelas dan sekolah sudah sangat memadai. Namun ketersediaan guru per bidang studi dan keahlian khusus untuk mengembangkan kompetensi siswa untuk dapat bersaing di level regional ASEAN, tentunya sangat terasa belum memadai. Penyediaan guru untuk bidang keahlian khusus di SMA seperti guru laboran fisika, guru laboran kimia, dan guru laboran biologi, guru bengkel, guru studio yang memiliki keahlian secara khusus untuk melekatkan kemampuan khusus kepada siswa agar memiliki kecakapan khusus yang dibutuhkan di tengah masyarakat terutama juga bagi SMK tentunya sangat terasa belum disiapkan sejak sekarang. Kebanyak guru yang ada bidang keahliannya adalah bidang-bidang ilmu umum seperti IPS, IPA dengan variannya, tetapi guru dengan keahlian khusus atau keterampilan khusus sebagai bekal bagi life skill siswa untuk masuk ke perguruan tinggi dan ke dunia

kerja bagi SMK tentunya masih belum cukup tersedia dengan memadai. Oleh karena itu, pengadaan guru dan peningkatan kualitas guru, haruslah diarahkan kepada peningkatan keahlian khusus ini yang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja nasional maupun ASEAN. Hal ini dikemukakan bahwa bukankah tidak semua lulusan SMA di setting melanjutkan ke perguruan tinggi, sebahagian dari mereka akan terjun ke dunia kerja pada level operator dan petugas administrasi di sekolah. Sehingga bagi mereka juga diperlukan keterampilan khusus agar memudahkan pekerjaan mereka nantinya.

2.5.3. Kondisi Efisiensi dan Efektifitas Tata Kelola Layanan Pendidikan

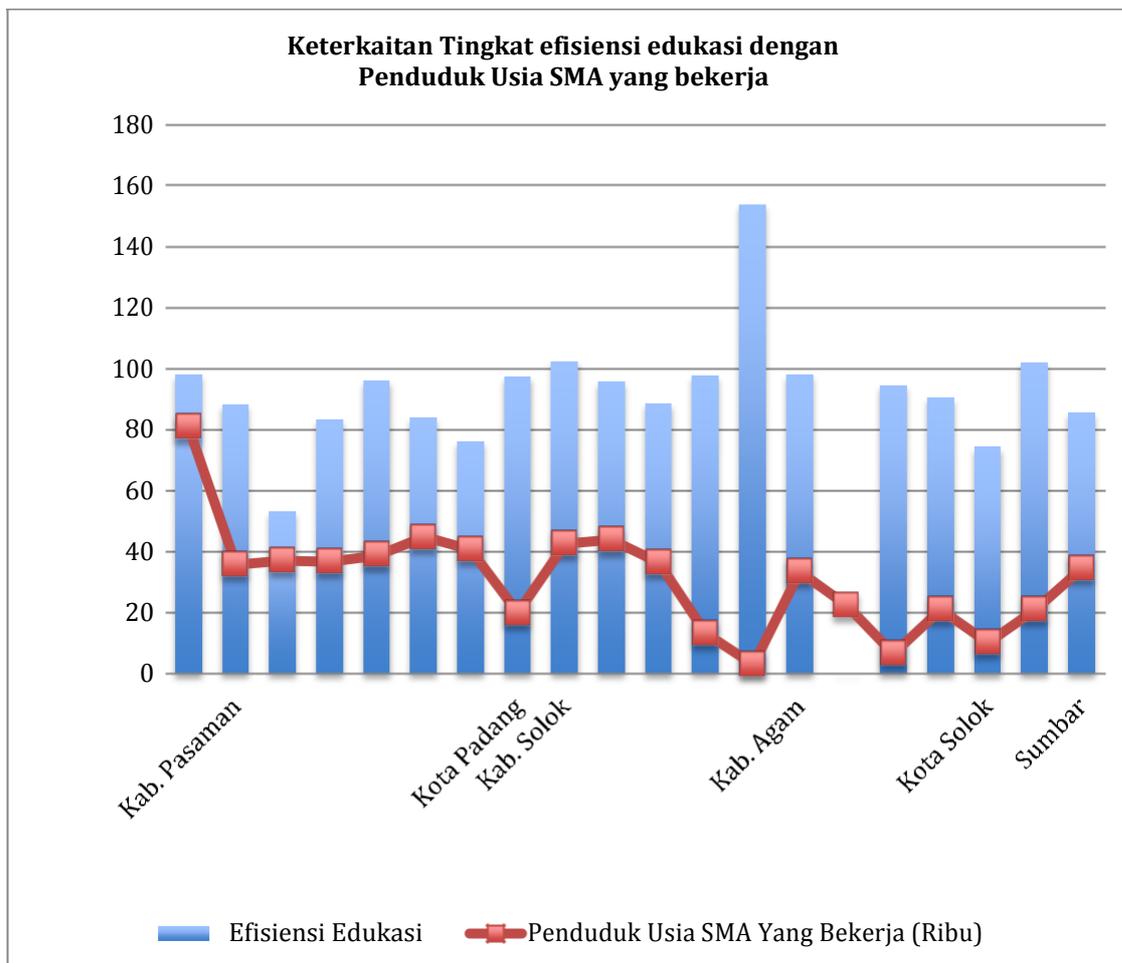
Kondisi efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan berkaitan dengan seberapa perolehan maksimum dari suatu kegiatan layanan pendidikan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan dalam tatakelola layanan pendidikan itu. Efektifitas tata kelola layanan pendidikan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Efisiensi edukasi merupakan ratio antara jumlah siswa baru dengan jumlah siswa yang tamat. Semakin mendekati angka seratus berarti semakin efisien. Artinya, jumlah siswa yang masuk sebanding dengan jumlah siswa yang keluar atau yang lulus. Table berikut menggambarkan tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah di kabupaten dan kota .

Tabel 2.5.3.1. Tingkat Efisiensi edukasi Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat



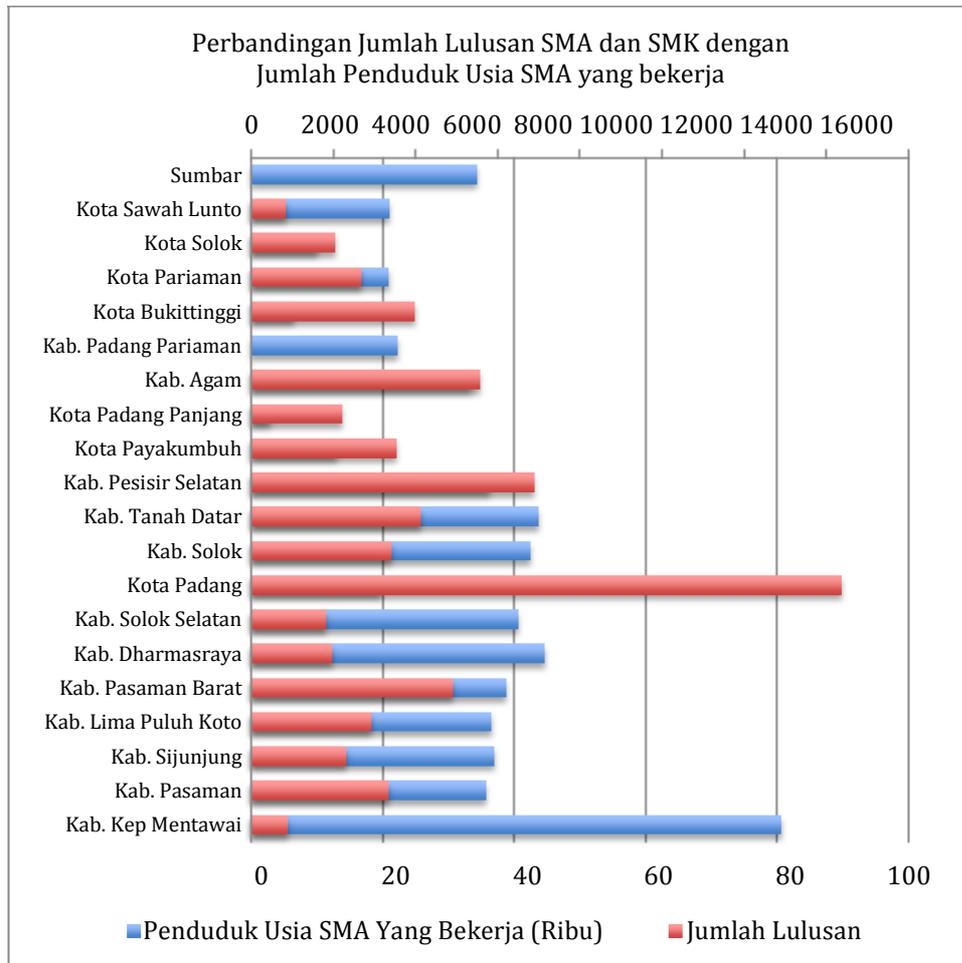
Tabel 2.5.3.1. di atas mengemukakan bahwa tingkat efisiensi edukasi sekolah-sekolah SMA dan SMK di provinsi Sumatera Barat baru mencapai 85,5%, masih terdapat sekitar 15 persen sisanya siswa belum tamat tepat waktu, sehingga angka ini menggambarkan tingkat kualitas pendidikan SMA dan SMK di Sumatera Barat. Diantara sembilanbelas kabupaten dan kota, maka masih terdapat 5 kabupaten dan kota yang tingkat efisiensi edukasinya berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni kabupaten Dharmasraya, Lima puluh kota, Sijunjung, Solok Selatan dan Kota solok.

Rendahnya angka efisiensi edukasi ini disamping menggambarkan tingkat kualitas pendidikan juga menggambarkan efisiensi tatakelola pendidikan dalam menerima dan menamatkan siswanya. Semakin tinggi tingkat efisiensi edukasi SMA dan SMK, maka semakin rendah pula jumlah penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja. Sebaliknya, apabila angka efisiensi edukasi pendidikan SMA dan SMK semakin rendah, maka semakin banyak pula penduduk usia SMA dan SMK yang berkerja.



Gambar 2.5.3.2. Gambar Grafik Perbandingan Tingkat Efisiensi Edukasi Pendidikan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang berkerja.

Gambar di atas memperlihatkan bahwa kota Padangpanjang memiliki tingkat efisiensi pendidikan paling tinggi yakni 153,79 namun juga memiliki jumlah penduduk usia sekolah SMA yang berkerja paling rendah. Berbeda dengan kabupaten kepulauan Mentawai, memiliki angka efisiensi edukasi sebesar 98,07 tetapi jumlah penduduk usia SMA yang berkerja juga tinggi pula.



Gambar 2.5.3.2. Perbandingan Jumlah Lulusan SMA dan SMK dengan Jumlah Penduduk Usia SMA yang Bekerja di Sumatera Barat

Gambar 2.5.3.2. di atas mengungkapkan bahwa Kabupaten dan kota yang memiliki jumlah lulusan SMA yang dominan yang berarti tingkat efektifitas tatakelola layanan pendidikannya lebih baik dibandingkan dengan kabupaten dan kota yang memiliki penduduk usia SMA yang berkerja sedangkan lulusan SMA dan SMKnya lebih kecil, seperti halnya kabupaten kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto. Sehingga terdapat dua kemungkinan penyebabnya; pertama karena jumlah penduduk usia SMA ini masih kecil persentasenya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi dan memilih untuk masuk ke dunia kerja. Kenyataannya APK PT di kedua wilayah ini memang masih rendah. Kedua, angka putus sekolah memang masih tinggi dan mereka memasuki lapangan pekerjaan dengan lebih

awal, walaupun belum memiliki ijazah SMA dan SMK. Wilayah kabupaten dan kota yang memiliki efektifitas tatakelola layanan pendidikan yang baik itu adalah yang lulusan SMA dan SMKnya lebih dominan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia SMA yang berkerja adalah terdapat pada kota Padang, Pesisir Selatan, Agam dan Kota Bukittinggi dan lainnya. Artinya semakin efektif tatakelola layanan pendidikan suatu daerah, maka semakin lebih besar jumlah lulusan SMAnya, dan semakin tinggi pula APK PTnya. Sebaliknya pada wilayah pendidikannya yang belum efektif, semakin kecil jumlah lulusan SMAnya semakin tinggi jumlah penduduk usia SMA yang berkerja dan semakin rendah pula APK PTnya.

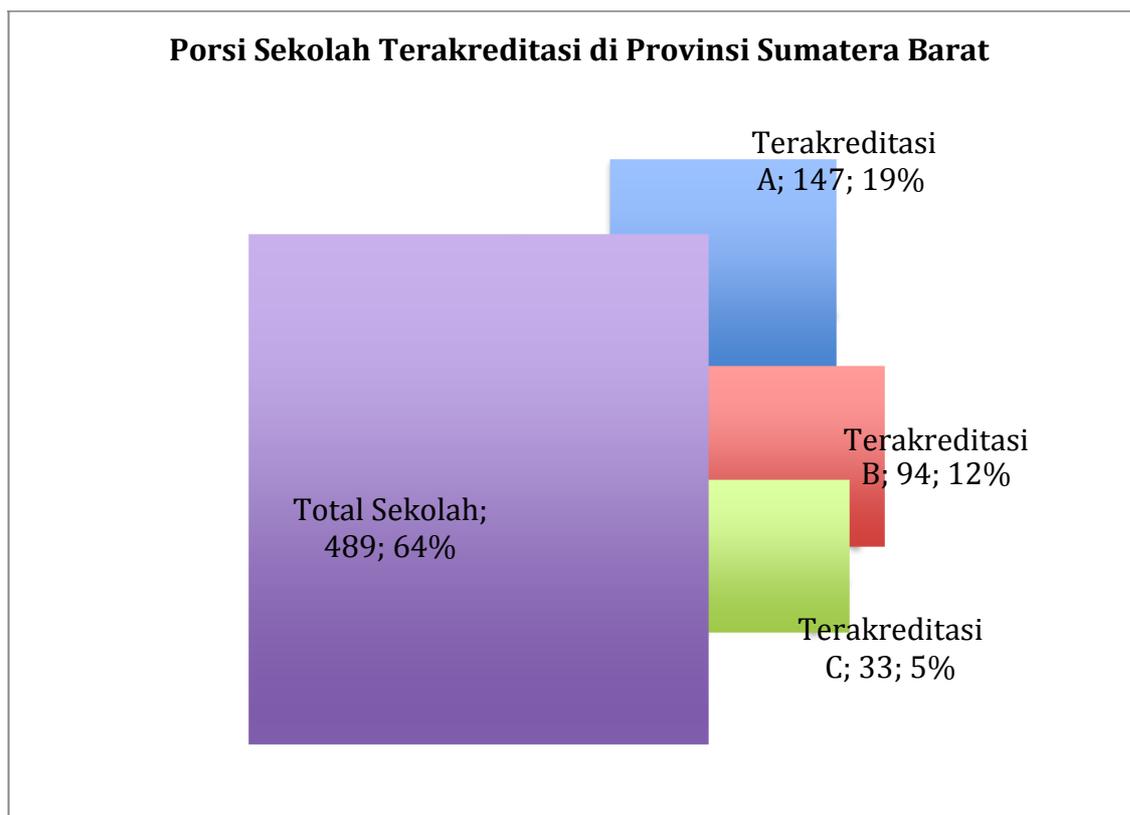
2.5.4. Kondisi Implementasi pendidikan karakter layanan pendidikan

Pendidikan karakter layanan pendidikan merupakan konsep pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki watak, tabiat, akhlak atau kepribadian yang terbentuk sebagai hasil dari proses internalisasi berbagai nilai-nilai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak peserta didik di lingkungan social dan alamiahnya (Direktorat Pembinaan SMA, Dirjen dikmen Kemendiknas, 2016). Sehingga dalam membangun budaya dan karakter bangsa Indonesia, maka dirumuskan 18 nilai dan sikap yang menjadi landasan karakter siswa sebagai luaran dari layanan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai itu adalah:

1. relegius
2. jujur
3. toleransi
4. disiplin
5. kerja keras
6. kreatif
7. mandiri
8. demokratis
9. rasa ingin tahu
10. semangat kebangsaan
11. cinta tanah air
12. menghargai prestasi
13. bersahabat/komunikatif
14. cinta damai
15. gemar membaca
16. peduli lingkungan
17. peduli social
18. tanggung jawab

Semua nilai karakter kepribadian bangsa ini harus tercermin dalam standar kelulusan (SKL) siswa di SMA dan SMK di Indonesia. Hal ini tentu saja dapat dilakukan apabila sekolah SMA dan SMK sudah mengimplementasikan kurikulum 2013 di setiap sekolahnya. Sehingga pada setiap mata pelajaran sudah mengintegrasikan nilai-nilai karakter unggul di atas pada system pembelajarannya, yang pada gilirannya akan membentuk dan melahirkan budaya sekolahnya sendiri. Setiap sekolah harus mampu mengembangkan karakternya dari ke delapan belas nilai-nilai inti budaya bangsa di atas dengan mengembangkan nilai-nilai karakter masing-masing melalui proses pembelajaran baik yang bersifat kurikulum maupun yang non kurikuler.

Data empiris untuk upaya sekolah mengimplementasikan pendidikan karakter akan terlihat dari usaha untuk memenuhi standar mutu pendidikan nasional (SNP) yang dibuktikan dengan terpenuhinya standar pendidikan nasional yang diawali dengan penetapan SKL, standar isi, standar proses, sarana dan prasarana, standar guru tenaga pendidik, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran di sekolah melalui pengajuan akreditasi sekolah, sehingga diyakini, apabila sekolah sudah mengajukan akreditasi dan memperoleh peringkat akreditasi A dan B bahkan C, berarti pendidikan karakter sudah mulai dibangun dan dikembangkan di sekolah ini melalui perumusan nilai-nilai inti yang dianut oleh warga sekolah menuju sekolah berkualitas dan unggul. Berikut gambaran sekolah sekolah yang telah melakukan akreditasi untuk standar mutu pendidikannya di Sumatera Barat.



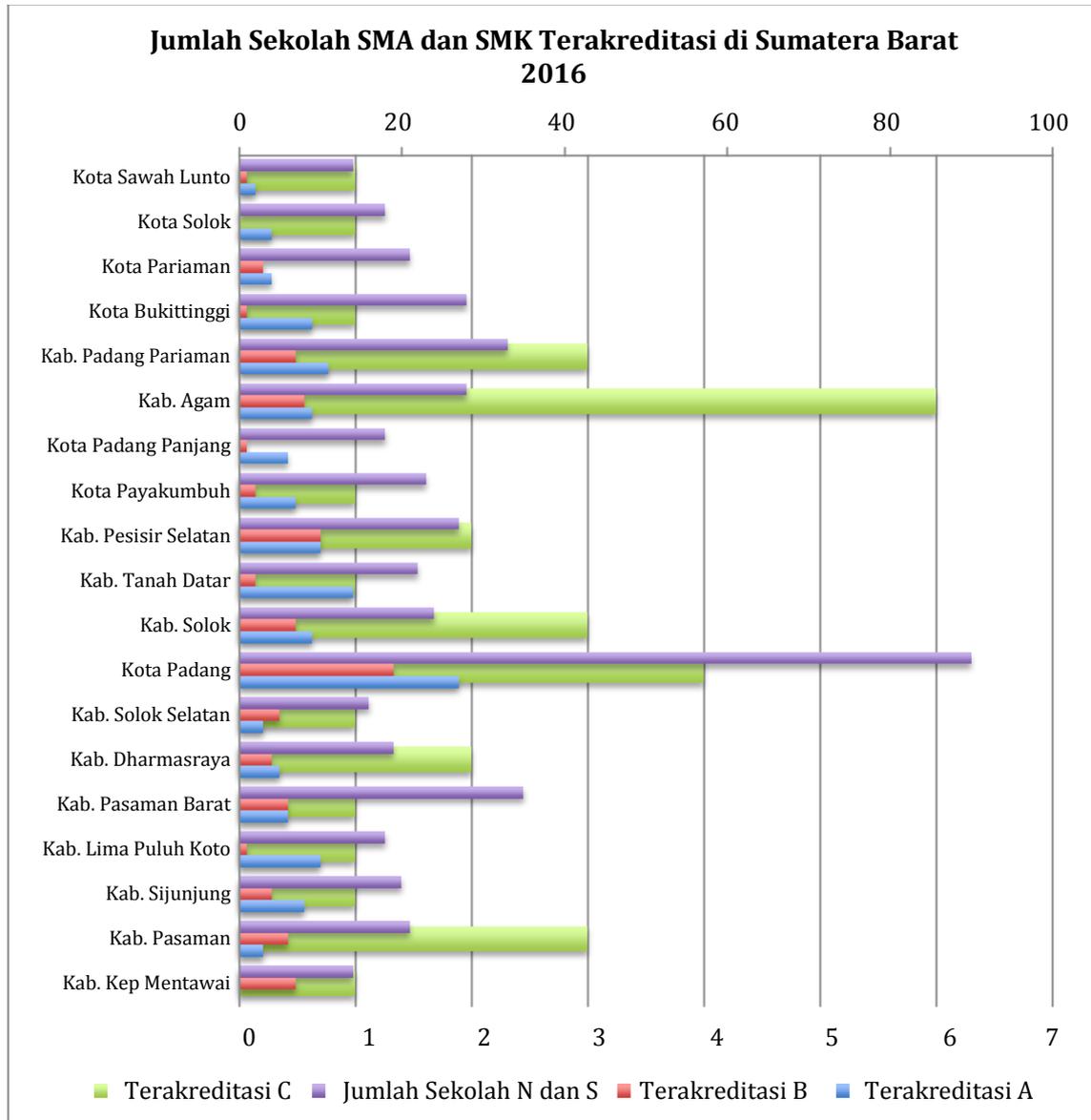
Gambar 2.5.4.1. Perbandingan Peringkat Akreditasi Sekolah SMA dan SMK di Sumatera Barat

Gambar 2.5.4.1. di atas memberikan informasi bahwa dari sebanyak 489 jumlah sekolah SMA dan SMK yang ada di Sumatera Barat tahun 2016 yang sudah memperoleh nilai akreditasi sekolah “A” adalah sebanyak 147 sekolah atau 19% dari sekolah yang ada. Sedangkan sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi “B” adalah sebanyak 94 sekolah SMA dan SMK atau sebesar 12% dari sekolah yang ada, dan terakhir jumlah sekolah yang memperoleh peringkat akreditasi “C” berjumlah 33 sekolah atau hanya 5 % dari total sekolah yang ada. Secara keseluruhan sekolah SMA dan SMK yang sudah memperoleh peringkat akreditasi sebesar 36 % sisanya sebanyak 64% sekolah di Sumatera Barat belum mengajukan dan memperoleh peringkat akreditasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengimplementasian pendidikan karakter di sekolah-sekolah yang belum mengajukan status akreditasi ini belum tersusun dan terencana dengan baik.

Alasan kenapa sekolah belum mengajukan akreditasi pada saat ditanya pada saat observasi dilapangan dikatakan karena mereka belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya. Penyebab utamanya belum mengimplementasikan kurikulum 2013 di sekolahnya disebabkan karena belum terpenuhinya standar pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama kemampuan guru untuk mengimplementasikan pelaksanaan kurikulum 2013 yang masih belum memadai, ketersediaan sarana dan

prasarana pendukung pembelajaran yang menggunakan pendekatan saintifik di sekolah seperti system informasi an teknologi yang belum siap, dan seterusnya.

Tabel 2.5.4.1. Jumlah Sekolah Terakreditasi menurut Peringkat akreditasi berdasarkan wilayah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2016



Tabel 2.5.4.1. di atas memberikan informasi bahwa Kota Padang memiliki jumlah sekolah yang terakreditasi “A” dan “B” paling banyak masing-masing adalah sebanyak 27 sekolah terakreditasi “A” dan 19 sekolah terakreditasi “B”. disusul oleh kabupaten Tanah Datar sekolah terakreditasi “A” sebanyak 14 sekolah dan terakreditasi “B: sebanyak 2 sekolah. Posisi ketiga jumlah sekolah terakreditasi “A” ditempati oleh kabupaten Pesisir Selatan bersama kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 10 sekolah., untuk kabupaten Tanah Datar terdapat 2 sekolah terakreditasi”B” dan 1 sekolah untuk kabupaten Lima Puluh

Kota. Sisanya yang paling banyak adalah sekolah dengan peringkat terakreditasi “C” dan belum terakreditasi.

Implementasi pendidikan karakter di sekolah tentunya akan mempengaruhi kesehatan lingkungan social di tengah masyarakat, karena sekolah merupakan bagian dari system kelembagaan social yang menjadi barometer bagi terjadinya proses internalisasi nilai-nilai budaya di tengah masyarakat. Apabila kejadian tindak pidana di tengah masyarakat masih terus meningkat, maka dapat dikatakan institusi pendidikan seperti sekolah ini menjadi kunci untuk mengontrol terjadinya kejadian tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk mengurangi tindak kejadian pidana di tengah masyarakat maka pendidikan karakter di sekolah yang pada gilirannya akan tertular dalam pergaulan di tengah masyarakat akan berdampak menjadi lebih baik, sehingga kejadian tindak pidana akan berkurang dengan sendirinya. Hal ini merupakan tanggungjawab lembaga pendidikan untuk mengarahkan perilaku masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, karena warga sekolah merupakan contoh perilaku tauladan di tengah masyarakat baik melekat pada diri guru dan siswanya di tengah lingkungan sosialnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pendidikan, telaahan visi, misi dan program dinas pendidikan, dan telaahan renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

3.1. Identifikasi permasalahan

Pembangunan pendidikan di Sumatera Barat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga Disdik Sumatera Barat dapat mendorong penguatan layanan pendidikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun bentuk permasalahan dan tantangan pembangunan yang terjadi di tingkat Nasional dan ada juga di tingkat daerah adalah sebagai berikut:

3.1.1. Belum optimalnya peran pelaku pembangunan pendidikan.

Sebaian besar pelaku sudah mengalami peningkatan peran yang cukup besar di erasebelumnya. Namun masih ada pelaku-pelaku pelaksana pendidikan yang masih kurang kuat peran dan keterlibatannya. Sebagai contoh: dalam pendidikandasar, peran orang tua sering masih terbatas pada urusan administrasi danpenyediaan sarana pribadi siswa saja; dalam pendidikan jenjang menengah,para siswa belum menjadi subjek pendidikan atau kurang dilibatkan aktifdalam proses pembelajaran; penguatan peran guru dan tenaga pendidikanmasih terlampau menekankan peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Di Sumatera Barat, pelaku-pelaku pendidikan sudah melakukan perannya masing-masing, tetapi belum seoptimal yang diharapkan. Seperti belum semua anak usia 16-18 tahun tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah, belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan dan contoh lain adalah belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan.

3.1.2. Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun yang Berkualitas belum Maksimal

Ketika Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun ditetapkan sebagai salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, sebenarnya masih ada beberapa masalah dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan. Di

Sumatera Barat, pelaksanaan wajib belajar belum terlayani dengan baik. Hal ini dikarenakan belum semua anak usia 16-18 tahun yang tertampung atau terlayani pada satuan pendidikan menengah.

Faktor kendala dan penyebab belum optimalnya pelayanan pendidikan pada anak usia 16-18 tahun yang tertampung dan terlayani adalah kapasitas sarana dan prasarana sekolah yang belum memungkinkan untuk menerima siswa sesuai dengan daya tampung yang ada, disamping kekurangan kapasitas lokal belajar, juga adalah karena kekurangan jumlah guru yang akan mendorong dan memfasilitasi proses pembelajaran di sekolah. Pada sekolah yang memiliki sarana dan prasarana dan fasilitas yang memadai, maka daya tampungnya menjadi berlebih. Sebaliknya pada sekolah yang kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, justru dengan daya tampung berlebih. Artinya terjadi ketidakmerataan sarana prasarana dan ketersediaan guru yang cukup di sekolah menengah ini.

3.1.3. Peningkatan Kualitas Pembelajaran belum Maksimal

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran ataupun hasil belajar siswa. Proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif sehingga tidak dapat menumbuhkan kreativitas dan daya kritis, dan kemampuan analisis siswa sehingga ketika selesai melaksanakan proses wajib belajar 12 tahun, peserta didik kesulitan menyesuaikan diri dengan dunia kerja. Di Sumatera Barat, sebagai contoh untuk tingkatan lulusan SMK ditemukan ketidakselarasan lulusan SMK dengan dunia kerja dan industri dan beberapa contoh lainnya.

3.1.4. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Peningkatan kualitas, kompetensi, dan profesionalisme guru masih harus ditingkatkan. Selain itu jumlah yang dimiliki Sumatera Barat dan distribusi guru di Sumatera Barat belum merata, terutama di daerah 3T. Lembaga-lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang terbatas terhadap kualitas layanan, berdampak pada belum adanya perbaikan yang signifikan pada peningkatan kualitas guru.

3.1.5. Gejala Memudarnya Karakter Siswa dan Jati Diri atau Disintegrasi Bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkoba, perkelahian antarpelajar, antarkelompok masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk menyiapkan generasi penerus Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter, bermadani serta berdaya saing, Disdik Sumatera Barat harus menyiapkan langkah strategis yang bersinergi dengan pola pendidikan yang diterapkan di sekolah, di lingkungan bahkan dalam berkeluarga. Selain dari

enam permasalahan yang sama antara nasional dan daerah tersebut, masih ada beberapa masalah yang berda di Sumatera Barat, yakni belum optimalnya kontribusi dana masyarakat dalam mendukung pembiayaan pendidikan, belum semua anak penyandang disabilitas terlayani di satuan pendidikan, tata kelola manajemen sekolah belum optimal dan sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai untuk pemenuhan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan terlihat keloresi antara Pembangunan Pendidikan Nasional (Renstra Kemendikbud 2015-2019) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sumatera Barat 2016-2021 dan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yakni terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, terwujudnya sumatera barat yang madani dan sejahtera dan terwujudnya sumberdaya manusia sumatera barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Gubernur Provinsi Sumatera Barat

Penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak akan terlepas dari rencana pembangunan pendidikan pada provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selain itu, juga sangat terkait erat dengan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional (2015-2019). Oleh karena itu dalam menyusun dokumen rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi oleh organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat tentu saja mempedomani kedua dokumen tersebut di atas.

Bentuk keterkaitan dalam rencana pembangunan pendidikan di Sumatera Barat sudah diawali dengan saat perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat. Visi pembangunan pendidikan nasional itu menurut renstra pembangunan pendidikan kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 (Kemendikbud RI) adalah sebagai berikut:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong”

visi pembangunan pendidikan nasional ini kemudian dicapai dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan nasional yang mencakup lima aspek pembangunan pendidikan nasional yakni:

1. mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat
2. mewujudkan akses yang meluas dan merata
3. mewujudkan pembelajaran yang bermutu

4. mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa
5. mewujudkan penguatan tatakelola serta peningkatan efektifitas birokrasi dan pelibatan public.

Tujuan pembangunan pendidikan nasional itu adalah tentunya sangat terkait dengan misi yang telah di rumuskan yakni:

1. peningkatan akses dan mutu pendidikan PAUD
2. perluasan akses pendidikan dasar bermutu
3. peningkatan kapasitas akses pendidikan menengah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
4. peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat
5. peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah yang berorientasi pada pendidikan karakter
6. peningkatan profesionalisme, pemerataan distribusi, serta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
7. peningkatan jati diri bangsamelalui pemakaian bahasan sebagai pengantar
8. peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntanbel dengan melibatkan public.

Visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat telah dirumuskan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan secara nasional ini, disamping yang tidak kalah pentingnya adalah sangat berpedoman juga kepada visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2016-2021 yang tentunya merupakan turunan dari visi, misi dan tujuan dari Gubernur Sumatera Barat terpilih pada periode 2016-2021. Visi pembangunan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam RPJMD tahun 2016-2021 itu adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”

Visi Gubernur Sumatera Barat yang terpilih ini telah dirumuskan ke dalam misinya sehingga mudah dilaksanakan dan menjadi arah pembangunan Sumatera Barat secara umum ke depan, tentunya tidak terlepas pula dengan pembangunan pendidikannya. Adapun misi pembangunan Sumatera Barat ke depan itu adalah:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi

4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah;
5. Meningkatkan Infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Misi yang sangat terkait dengan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini adalah misi Gubernur Sumatera Barat yang ketiga yakni meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi. Misi ini akan menjadi fokus bidang pembangunan pendidikan, kesehatan dan sosial budaya di Sumatera Barat. Sedangkan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat itu dalam RPJMD 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter
2. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat;
3. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna;
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini juga telah dikembangkan menjadi sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yakni:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan
5. pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar bekerja;
6. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca;
7. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta Ilmu Pengetahuan dan teknologi.

Sasaran pembangunan pendidikan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2016- 2021 ini telah menjadi landasan bagi organisasi perangkat daerah pendidikan di Sumatera Barat untuk menyusun target-target terukur yang hendak dicapai pada periode lima tahun ke depan.

Berdasarkan kepada visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan nasional dan kemudian ditambahkan pula oleh visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan

pendidikan provinsi Sumatera Barat, maka kemudian disusun pula visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam rencana strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tahun 2016- 2019. Adapun visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam Renstra OPD Pendidikan Nasional Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing”

Visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat ini telah memperhatikan tahapan pembangunan pendidikan nasional dalam rencana pembangunan pendidikan nasional jangka panjang, dimana pada RPJMN tahun 2015-2020 telah dinyatakan bahwa pembangunan pendidikan diarahkan kepada peningkatan daya saing regional dalam rangka menuju dan mempersiapkan peningkatan daya saing bangsa. Sehingga dalam visi pembangunan pendidikan Sumatera Barat mencantumkan kalimat terwujudnya sumberdaya manusia Sumatera Barat yang cerdas, berkarakter madani dan berdaya saing.

visi ini kemudian dikongkritkan dengan merumuskan misi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang berlandaskan kepada misi pembangunan pendidikan nasional dan provinsi Sumatera Barat yakni:

1. mewujudkan akses dan pemerataan layanan pendidikan
2. mewujudkan kompetensi, dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
3. mewujudkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
4. mewujudkan efektifitas dan efisiensi tata kelola layanan pendidikan
5. mewujudkan pendidikan berkarakter madani

Tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya sangat terkait dengan misi pembangunan pendidikan yang telah dikemukakan di atas, ini telah mencakup pilar pembangunan pendidikan nasional dan provinsi yakni pemerataan akses dan layanan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dan peningkatan profesionalisme guru. Adapun tujuan pembangunan pendidikan secara lengkap adalah sebagai berikut:

1. peningkatan akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat
2. peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan
3. peningkatan mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
4. peningkatan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
5. pengimplementasian pendidikan berkarakter madani

Adapun sasaran pembangunan pendidikan Sumatera Barat itu tentunya sangat terkait pula dengan tujuannya yakni:

1. meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan Sumatera Barat

2. meningkatnya kompetensi dan professionalism guru dan tenaga kependidikan
3. meningkatnya mutu, relevansi, daya saing pendidikan dan literasi teknologi informasi
4. meningkatnya efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan
5. terimplementasikannya pendidikan berkarakter madani

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di Sumatera Barat ini, maka terlihat jelas bahwa saling keterkaitan diantaranya baik keterkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pendidikan di tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga saling keterkaitan antara visi, misi dan tujuan serta sasaran itu sendiri sebagai satu kesatuan dalam menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan ke depannya. Visi yang dirumuskan sangat futuristik namun dengan perumusan misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, sehingga mudah diukur sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Untuk merumuskan visi dan misi yang sesuai dan tepat, maka dibutuhkan kesesuaian-kesesuaian antara unsur-unsur penting di dalam sebuah kesatuan atau institusi terkait. Penyesuaian ini berguna untuk menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan yang bermanfaat dan berdampak dalam masa tertentu baik dengan institusi yang membuat atau institusi yang ada di bawahnya. Untuk merumuskan kebijakan-kebijakan Disdik Sumatera Barat, maka perlu di sesuaikan kebijakan yang akan dibuat dengan kebijakan-kebijakan yang ada pada Renstra Kemendikbud. Pada masa perodesasi 2015-2019 ini, dalam Renstra Kemendikbud menyebutkan bahwa “pemerintah wajib memajukan pendidikan dengan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang, memprioritaskan anggaran pendidikan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan isi Renstra tersebut, maka jelaslah bahwa Disdik Sumatera Barat, sebagai pemerintah wajib memajukan pendidikan, pelayanan serta pengembangan-pengembangan keilmuan pada seluruh unsur terkait yang ada di dalam Disdik Sumatera Barat.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan renstra pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya memperhatikan rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia 2015-2019 dimana pembangunan pendidikan nasional itu didasarkan atas beberapa paradigma yaitu: Paradigma pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu

gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Selanjutnya, terdapat empat tema pembangunan pendidikan secara pendidikan nasional itu yaitu: peningkatan kapasitas dan modernisasi, penguatan pelayanan pendidikan, menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional, dan peningkatan daya saing internasional. Pada saat sekarang ini tahap pembangunan pendidikan nasional itu berada pada tahap ketiga yakni menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional.

Tema pembangunan pendidikan 2015-2019 adalah peningkatan daya saing regional ini tentunya berkaitan dengan peningkatan kualitas tata kelola manajemen sekolah, agar kualitas proses belajar mengajar menjadi bermutu, hanya lembaga pendidikan dan proses pendidikan yang bermutulah yang mampu mengungguli persaingan di wilayah regional ini. Oleh karena itu diperlukan penetapan kriteria dan indicator mutu pendidikan yang mampu bersaing secara regional paling tidak di wilayah ASEAN.

Penentuan konsep daya saing dalam pendidikan tentu merupakan kunci awal untuk merumuskan kriteria dan indicator daya saing pendidikan daerah secara regional itu. Menurut World Bank (2003) ada 3 factor penentu daya saing yakni: 1). factor driven yang mencakup kelembagaan pendidikan, terutama system manajemen sekolah yang dikembangkan, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi pendidikan yang mencakup kecukupan jumlah guru, kecukupan pendidikan dan pelatihan guru, kecukupan kompetensi guru dan keberadaan siswa. 2). Efficiency driven, mencakup ketersediaan system informasi dan teknologi pembelajaran, system pendidikan dan pelatihan guru yang regular dan kontinyu. 3). Innovation driven yang mencakup penciptaan lingkungan sekolah sekolah yang menyenangkan sesuai dengan usia pembelajar, dan inovasi layanan pendidikan untuk membentuk karakter madani yang unggul dan berdaya saing regional.

Capaian pembangunan pendidikan menengah dikenakan pada upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan relevansi lulusan pendidikan menengah terhadap dunia kerja. Partisipasi penduduk yang mengikuti pendidikan menengah meningkat cukup signifikan selama periode 2010—2014. Capaian APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sebesar 68,92% pada tahun 2014.

Dari segi peningkatan kualitas layanan pendidikan menengah, capaian ditunjukkan oleh 73,5% SMA/MA dan 48,2% kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B sampai dengan tahun 2013. Pemerintah juga telah berusaha secara terus-menerus untuk mendorong peningkatan layanan pendidikan menengah seperti peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, rehabilitasi prasarana pendidikan, pengembangan kurikulum dan adaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya juga berkaitan dengan pola dan struktur penggunaan ruang untuk kepentingan pembangunan. Rencana sistem perkotaan provinsi Sumatera Barat, telah menempatkan kota Padang sebagai pusat kegiatan nasional (PKN), yang harus didukung oleh wilayah sekitarnya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) seperti Kota Bukittinggi, Kota Solok, Aro Suka, Kota Pariaman, Kota Painan. Dimana PKW ini harus pula didukung oleh Pusat kegiatan lokal (PKL)nya. Kota Padang sebagai PKN merupakan pusat pengembangan ekonomi yang berbasis kepada industri pengolahan dan jasa, termasuk jasa pendidikan karena kota Padang juga dikenal dengan kota pendidikan.

Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Padang, meliputi :Kota Padang dan sekitarnya yang meliputi wilayah Lubuk Alung (Kabupaten Padang Pariaman), Kota Pariaman, Aro Suka (Kabupaten Solok), Kota Solok dan Painan (Kabupaten Pesisir Selatan) dapat dikembangkan sebagai Kota Metropolitan dengan peran masing- masing sebagai berikut :

- a. Kota Padang sebagai kawasan perkotaan inti,
- b. Lubuk Alung, Kota Pariaman, Kota Solok, Aro Suka dan Painan sebagai kawasan perkotaan satelit,
- c. Kota-kota kecamatan selain yang berfungsi sebagai ibu kota kabupaten berfungsi sebagai kota kecil

Sebagai pusat kegiatan nasional, dengan pusat aktifitas utama adalah industri dan jasa, termasuk jasa pendidikan, haruslah mampu mendukung kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan bagi pusat-pusat kegiatan di bawahnya. Pusat kegiatan pengembangan pendidikan mulai dari pendidikan dasar, menengah sampai kepada perguruan tinggi tentunya harus dimainkan oleh kota Padang, sehingga diperlukan pusat-pusat pelayanan pendidikan seperti pusat pelayan penelitian, pusat pelayanan sistem inovasi daerah (SIDA), pusat pengembangan entrepreneur.

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan untuk meningkatkan keterkaitan kebutuhan dan peningkatan transportasi antar wilayah dan antar kawasan permukiman yang dikembangkan dalam ruang Provinsi Sumatera Barat, serta keterkaitannya dengan sistem jaringan transportasi nasional. Selain itu pengembangannya juga untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antar pusat permukiman provinsi ini dengan sektor kegiatan ekonomi daerah. Pengembangan sistem transportasi dilakukan secara terintegrasi yang meliputi rencana pengembangan transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Jaringan transportasi tentunya dibutuhkan antar pusat layanan pendidikan dan penelitian yang ada.

Pengembangan jaringan prasarana energi di Provinsi Sumatera Barat terutama jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan. Penyediaan energi listrik di wilayah Sumatera Barat untuk jangka pendek, jika dilihat dari pembangkit yang ada sudah melebihi kapasitas dan digunakan untuk kebutuhan energi listrik di provinsi lain yang tergabung dalam sistem jaringan interkoneksi. Sampai tahun 2032 diperkirakan kebutuhan energi listrik di Provinsi Sumatera Barat mencapai 7.300 GWH. Kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Barat meningkat setiap tahunnya sebesar 6,3%. Arah pengembangan pasokan jaringan listrik untuk kebutuhan pelayanan pendidikan dan penelitian dan sistem inovasi diperlukan keterjaminannya, agar kegiatan pelayanan pendidikan tidak terganggu.

Jaringan sistem telekomunikasi merupakan prasarana penting dalam mendukung kegiatan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk pada pelayanan pendidikan, kegiatan pemerintahan serta kegiatan lainnya. Penyediaan telepon sampai saat ini masih didominasi oleh PT. Telkom Tbk melalui penyediaan beberapa sentral telepon otomatis (STO) yang tersebar pada seluruh kota dan kabupaten di provinsi ini. Prasarana telekomunikasi yang dikembangkan, meliputi sistem kabel, sistem seluler, dan sistem satelit. Prasarana telekomunikasi dikembangkan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi, sehingga kebutuhan telekomunikasi dapat dipenuhi kebutuhan pada pelayanan pendidikan juga.

Rencana pengembangan sumberdaya air di Provinsi Sumatera Barat hingga tahun 2032 dilakukan melalui upaya konservasi dan pengelolaan secara terpadu terutama bagi aliran sungai lintas provinsi secara sinergi dengan wilayah provinsi lain yang terkait. Ketersediaan air baku untuk kepentingan pelayanan pendidikan dan penelitian pada pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.

Prasarana lingkungan ini digunakan antar wilayah melalui berbagai mekanisme kerjasama. Pengembangan sistem prasarana lingkungan ini sebagai upaya bersama dalam menghadapi dampak lingkungan, maka perlu di kembangkan lokasi yang digunakan bersama antar kabupaten/kota dengan sistem pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Prasarana lingkungan terdiri atas :

- 1) Tempat pembuangan akhir (TPA) terpadu (regional).
- 2) Tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri B3 dan non B3.
- 3) Sistem drainase.
- 4) Sistem pengelolaan air minum (SPAM).
- 5) Sarana dan prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat, termasuk sarana dan prasarana pendidikan

Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya; kawasan perlindungan setempat; kawasan suaka alam,

pelestarian alam dan cagar budaya; kawasan rawan bencana alam; kawasan lindung geologi; dan kawasan lindung lainnya. Rencana pola ruang untuk pengaturan kawasan lindung dan kawasan budidaya ini berkaitan dengan penciptaan suasana sekolah yang menyenangkan dengan konsep sekolah hijau.

Kawasan strategis merupakan kawasan yang diprioritaskan pengembangannya. Kawasan strategis ini terdiri atas :

- a. Kawasan strategis yang didasari oleh penetapan melalui PP 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), di Sumatera Barat terdapat 4 Kawasan Strategis Nasional yang meliputi:
 - 1) Taman Nasional Kerinci Seblat dilihat dari sisi lingkungan hidup
 - 2) Bukit Batabuh dilihat dari sisi lingkungan hidup
 - 3) Koto Tabang dilihat dari sisi pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi
 - 4) Sibaru-baru dan Sinyanyau dilihat dari sisi pertahanan dan keamanan
- b. Kawasan strategis merupakan hasil perumusan dan kesepakatan Pemerintah Provinsi. Perwujudan Kawasan Strategis provinsi dilihat dari :
 - 1) Pertumbuhan Ekonomi yang terdapat 10 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat
 - 2) Sosial Budaya yang terdapat 1 Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Barat, yaitu Batusangkar

Pengembangan kawasan strategis ini, berkaitan dengan kepentingan upaya pelestarian lingkungan hidup yang dianggap penting mempengaruhi wilayah lainnya dan menjaga kawasan kota utama mampu menjalankan perannya dengan baik. Dalam kaitannya dalam pembangunan pendidikan kawasan strategis tentunya harus pula didukung oleh pelayanan pendidikan baik untuk penelitian dan konservasi maupun untuk kegiatan pembelajaran untuk pelestarian lingkungan.

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Renstra pendidikan Sumatera Barat. Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat perhatian khusus. Berikut diuraikan beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.

1. Trend pertumbuhan ekonomi yang cenderung terus menguat dan didukung oleh beberapa indikator makro perekonomian seperti peningkatan kelas menengah, peningkatan jumlah untuk kebutuhan tenaga kerja terampil untuk menjaga keseimbangan ekonomi
2. Peningkatan daya saing

3. Perkembangan demografi
4. Spektrum tenaga kerja terampil
5. Kondisi sosial masyarakat (role model)
6. Kondisi jati diri bangsa

Aspek lingkungan strategis diatas sangat mempengaruhi pada kebijakan pembangunan layanan pendidikan di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Pertumbuhan ekonomi yang terus meningkatkan diperlukan untuk serapan tenaga kerja terampil dan penciptaan peluang usahawan ekonomi sebagai hasil pendidikan kewirausahaan. Peningkatan daya saing berarti upaya badan layanan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas calon tenaga kerja yang dididik di lembaga pendidikan menengah dan tinggi. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkatkan dan bonus demografi yang dialami Indonesia, karena semakin besarnya penduduk usia muda atau usia sekolah dan semakin tingginya umur harapan hidup ini membawa konsekwensi yang penting untuk pembangunan sumberdaya manusia yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi dan mengambil peran penting dalam percaturan perdagangan di dunia global.

3.5. Penentuan Isu Isu strategis

Penentuan isu strategis di bidang pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat tentunya tidak akan jauh berbeda dengan isu yang berkembang dan beredar di kalangan nasional, diantaranya adalah penciptaan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan penciptaan pembelajar yang berdaya saing. Pengembangan lingkungan pendidikan yagn menghargai multikultural, pembentukan karakter madani melalui pendidikan. Semuanya diuraikan satu persatu berikut ini.

3.5.1. Penciptaan Lingkungan Sekolah yang Menyenangkan dan Menciptakan Pembelajar yang berdayasaing

Untuk menciptakan suasana yang kondusif, menyenangkan dan pembelajaran yang berdaya saing di lingkungan sekolah, diperlukan langkah-langkah kongkrit agar suasana tersebut bisa tercapai. Suasana kondusif di sekolah sangat diperlukan untuk membuat sekolah yang efektif. Sekolah adalah suatu tempat yang di dalamnya terjadi hubungan saling ketergantungan antara manusia dengan lingkungannya. Sekolah yang kondusif sebagai tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, orang tua siswa, dan pelaku lainnya akan menciptakan suasana yang baik, baik untuk siswa ataupun pengelola yang ada d dalamnya. Guru yang baik adalah guru yang mempunyai empat kompetensi yang mumpuni meliputi kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan berkepribadian. Selain itu seorang guru juga harus

punya naluri yang sensitif atau peka terhadap kemampuan dan perkembangan siswanya. Artinya sensitif terhadap kebutuhan siswa serta mampu memberikan semangat kepada siswa untuk aktif, kreatif, inovatif, dan sportif dalam mengikuti proses belajar mengajar sehingga setelah siswa menyelesaikan masa studi dan melanjutkan ke dua kerja, mereka akan bersaing dengan baik serta mampu menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang berasal dari sekolah menengah kejuruan.

Membicarakan lapangan kerja, sebagai industri untuk menghasilkan dan membina tenaga kerja profesional dan handal, maka dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara sekolah dan dunia kerja. Dunia industri dapat berfungsi sebagai tempat praktik, magang kerja, belajar manajemen industri dan tempat menambah wawasan dunia kerja bagi siswa. Kerjasama sekolah dan industri harus dibangun berdasarkan kemauan dan saling membutuhkan. Pihak dunia kerja dan industri seharusnya menyadari bahwa pihak industri tidak akan mendapatkan tenaga kerja siap pakai yang diperlukan sesuai kualifikasi yang diharapkan, tanpa membangun program pendidikan bersama.

3.5.2. Pengembangan Lingkungan Pendidikan yang Menghargai Multi Kultural dan Kebinekaan

Pemerintah daerah dituntut untuk berperan lebih daripada waktu sebelumnya. Sebagian besar penggunaan dana pendidikan dari APBN berada dibawah kontrol pemerintah daerah. Pemanfaatan dana pendidikan yang berasal dari APBN dan APBD dapat diupayakan semakin terkoordinasi, antara lain mengkaitkan besaran alokasi dana pemerintah dengan seberapa besar alokasi APBD daerah bersangkutan. Sesuai dengan visi Kemdikbud 2015-2019 yang berbunyi terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter dengan berlandaskan gotong, maka luaran dari misi ini juga mengharapkan lingkungan pendidikan yang saling menghargai multi kultural dan kebinekaan yang bergotong royong. Terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman;
2. Terbentuknya wawasan kebangsaan di kalangan anak-anak usia sekolah yang diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air;
3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;

4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*);
5. Terbentuknya karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkuat, dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia;
6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; dan
7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kemandirian dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas agar terciptanya suasana yang kondusif. Penguatan peran orang tua, masyarakat, industri dan organisasi sosial dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, mereka diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

3.5.3. Pembentukan Karakter Madani Melalui Layanan Pendidikan

Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani Dan Sejahtera, merupakan visi dari RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Dari visi itu Disdik Sumatera Barat berangkat dan memaknai bahwa karakter madani dapat diwujudkan melalui pendidikan. Madani berarti segala sesuatu yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yg ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yg berperadaban. Ilmu atau pendidikan yang madani akan membentuk karakter anak didik yang cerdas, baik cerdas spiritual (rohani dan bathin), cerdas emosional dan sosial, cerdas intelektual (cerdas, berakal, dan berpikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan), dan cerdas kinestetik.

Hal tersebut tidak akan terwujud dari peran sekolah, guru dan pelayan pendidikan saja, tetapi juga semua aspek pendukung yang ada di sekitar peserta didik tersebut seperti orang tua, masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kerja, organisasi sosial, pemerintah serta semua aspek pendukung untuk membentuk katakter madani melalui layanan

pendidikan ini. Oleh sebab itu, pendidikan merupakan komponen penting untuk mewujudkan Sumatera Barat yang madani.

3.6. Isu Isu strategis Pendidikan Sumatera Barat

Pengalihan isu-isu strategis pembangunan pendidikan di Sumatera Barat menggunakan kerangka berpikir faktor penentu daya saing pendidikan provinsi Sumatera Barat yakni: pertama faktor driven yang meliputi kelembagaan pendidikan, sistem manajemen sekolah, infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan guru, kecukupan kompetensi guru dan kecukupan pelatihan guru. Faktor penentu daya saing kedua adalah efisiensi driven meliputi kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran dan sistem pendidikan dan pelatihan guru. Sedangkan faktor penentu daya saing ketiga adalah innovation driven meliputi lingkungan sekolah yang menyenangkan dan inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter madani.

Pembangunan pendidikan Sumatera Barat selama ini tentu saja memiliki sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor internal dalam system pendidikan Sumatera Barat. Untuk mengidentifikasi sejumlah kelemahan dan tantangan yang merupakan factor dari dalam (internal), maka digunakan kerangka analisis SWOT (Lihat Rangkuti, F (2000)). Dalam menyusun matrik table SWOT untuk menemukan strategi pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang pada tahap ini berada di upaya peningkatan daya saing wilayah secara regional, maka dikemukakan dulu sejumlah factor strategis internal (IFAS) dan factor strategis eksternal (EFAS) dengan cara memberikan bobot masing-masing factor sebagai factor yang sangat penting dan kurang penting, lalu menghitung ratingnya dengan memberikan derajat kepentingannya dengan skala 1-4, sehingga di peroleh skor pembobotan., dengan demikian dapat dikemukakan factor yang menjadi kelemahan dan tantangan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dan disusun matrik SWOTnya untuk menentukan strategi peningkatan (SO, WO) dan strategi perbaikan (ST dan WT).

Kekuatan dan kelemahan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai factor internal dalam pembangunan pendidikan selama ini. Factor strategis diperoleh dari komponen yang membentuk daya saing pendidikan Sumatera Barat yang terdiri dari *factor driven*, *efisiensi driven* dan *innovation driven*, Sedangkan pembobotan dilakukan dengan memberikan derajat kepentingan factor ini dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat secara regional dengan skala sangat penting (1,0) sampai skala tidak penting (0,0), pembobotan ini murni didasarkan kepada keputusan kepakaran saja (*expert judgement*), sehingga akan berbeda diantara pakar yang menganalisisnya. Demikian pula untuk penentuan rating; merupakan skala pengaruh factor strategis ini terhadap kondisi daya saing pendidikan saat ini dengan memberikan skala 4

(sangat berpengaruh) sampai 1 (kurang berpengaruh). Skor total dari bobot dikalikan dengan rating memperlihatkan tingkat kekuatan dan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat saat ini. Semakin besar skor totalnya semakin besar pengaruh factor internal dan eksternal daya saing pendidikan ini.

Kekuatan daya saing pendidikan Sumatera Barat pertama terletak pada keberadaan lembaga pendidikan menengah yang terdiri dari SMA dan SMK yang sudah memadai apabila dilihat dari jumlah dan sebarannya di setiap kabupaten dan kota. Bahkan pada setiap kecamatan sudah terdapat SMA dan SMK di setiap wilayah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Menurut standar Unesco, satu sekolah akan melayani 500-1000 penduduk tentunya ini dapat dicapai. Factor yang menjadi kekuatan kedua untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah system manajemen sekolah yang didasarkan kepada kelayakan dan kepatutan dan berbasis merit system. Manajemen sekolah diarahkan kepada peningkatan system penjaminan mutu yang bermuara kepada pemenuhan standar nasional pendidikan sekolah menengah. Factor infrastruktur sekolah sangat memegang peranan penting dalam meningkatkan daya saing, melalui penggunaan dana bantuan operasional sekolah, sekolah memiliki sumber pendanaan untuk melengkapi infrastruktur sekolah, disamping sumbangan dari masyarakat dalam bentuk kepedulian komite sekolah untuk melengkapi semua infrastruktur sekolah akan terpenuhi syarat yang diharuskan oleh system penjaminan mutu sekolah. Factor internal terakhir yang memberikan potensi untuk mendorong kearah peningkatan daya saing regional pendidikan Sumatera Barat adalah kesehatan organisasi sekolah yang terlihat dari kecukupan jumlah guru dan pendidikan guru. Jumlah guru pada semua tingkatan sekolah sudah memadai, walaupun distribusinya belum merata. Namun jumlah guru yang memadai dan ditambah dengan banyaknya lembaga perguruan tinggi yang mencetak calon guru dan berkerja sama dengan sekolah di wilayah ini, merupakan suatu kekuatan yang akan mendorong kepada penciptaan kesehatan organisasi sekolah di Sumatera Barat.

Tabel 3.6.1. Faktor Strategis Internal Peningkatan Daya Saing Pendidikan Sumatera Barat

Factor Strategis Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Kekuatan:				
1 Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai	0,10	2	0.20	Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen dan infrastruktur
2 Sistem manajemen sekolah	0.10	3	0.30	sekolah yang sehat akan mendorong
3 Infrastruktur sekolah	0.15	3	0.45	kepada daya saing regional pendidikan
4 Kesehatan organisasi sekolah	0.15	4	0,60	
Kelemahan :				
1 Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai	0.10	4	0.40	Sistem informasi teknologi pembelajaran yang lamban, karena rendahnya kompetensi guru untuk mengadopsi teknologi informasi dan kecenderungan lingkungan sekolah yang mudah disusupi oleh nilai radikal karena belum terbentuknya karakter pendidikan
2 Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah (hasil UKG rendah)	0.15	4	0.60	
3 Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme	0.15	3	0.45	
4 Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah	0.10	3	0.30	
Total	1.00		3,30	

Berdasarkan kepada tabel di atas, terlihat bahwa faktor internal berupa kekuatan dari infrastruktur sekolah, kesehatan organisasi sekolah memiliki bobot yang lebih tinggi untuk menentukan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Sedangkan kelemahan daya saing pendidikan Sumatera Barat terletak paling tinggi bobotnya pada

kondisi sistem informasi dan teknologi pembelajaran yang masih jauh tertinggal dengan sistem informasi yang berkembang diluar, dan masih rendahnya kompetensi guru dalam penguasaan ICT pembelajaran ini telah memungkinkan mudahnya kecenderungan masuk paham radikal ke dalam lingkungan sekolah, sehingga inilah yang mengancam kepada pembentukan karakter siswa yang relegius, cerdas dan bertanggungjawab. Lembaga pendidikan menengah dengan system manajemen dan infrastruktur sekolah yang sehat akan mendorong kepada daya saing regional pendidikan.

Skor total untuk faktor internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan daya saing pembangunan pendidikan Sumatera Barat adalah mencapai 3,30 yang disumbang paling tinggi oleh bobot kesehatan organisasi sekolah yang ditunjukkan oleh kecukupan jumlah guru dan distribusinya dan kecukupan kompetensi dan hasil uji kompetensi guru yang masih rendah. Sistem informasi teknologi pembelajaran yang lamban, karena rendahnya kompetensi guru untuk mengadopsi teknologi informasi dan lingkungan sekolah yang cenderung dengan mudah disusupi oleh nilai radikal karena belum terbentuknya karakter pendidikan belum sejalan dengan kemajuan system informasi dari luar.

Tabel 3.6.2. di atas memperlihatkan bahwa faktor strategis eksternal berupa peluang peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat dengan bobot paling tinggi itu adalah terdapatnya sistem akreditasi sekolah untuk mendorong dan menjamin kepada pencapaian sekolah bermutu dan terdapatnya lembaga sertifikasi guru yang dikembangkan secara nasional dan daerah akan mendorong kepada penciptaan sekolah yang bermutu di Sumatera Barat. Sedangkan pada bobot yang paling tinggi pada sisi ancaman yang akan dihadapi dalam meningkatkan daya saing pendidikan Sumatera Barat adalah mudahnya masuk sistem informasi dan komunikasi dan teknologi yang menunjang sistem pembelajaran.

Tabel 3.6.2. Faktor strategis eksternal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat

Factor Strategis Eksternal	Bobot	Rating	Bobot x Rating	Keterangan
Peluang :				
1. Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu	0,10	4	0.40	Sistem kelayakan sekolah dan penilaian prestasi sekolah telah mendorong perlunya
2. Penilaian sekolah berprestasi nasional	0.10	3	0.30	kerjasama dengan sekolah mitra di LN
3. Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN	0.15	3	0.45	
4. Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional	0.15	4	0,60	
Ancaman :				
1. Mudah nya masuk informasi teknologi ke lingkungan sekolah secara bebas	0.10	4	0.40	Masuknya system informasi dan teknologi pembelajaran secara bebas menuntut kepada perbaikan mutu kompetensi guru di bidang
2. Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga	0.15	3	0.45	penguasaan ICT dan penguatan nilai-nilai kebangsaan dan local untuk membentengi nilai-nilai yang mengancam keutuhan NKRI
3. Standarisasi sekolah nasional dan internasional	0.15	3	0.45	
4. Kecenderungan akan terjadinya Disintegrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah	0.10	2	0.20	
Total	1.00		3,25	

Berdasarkan kepada nilai akhir dari faktor internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat, maka terlihat bahwa nilai faktor internal lebih tinggi dari faktor eksternal itu sendiri, sehingga hal ini dapat dijadikan momentum untuk meningkatkan daya saing pendidikan di Sumatera Barat.

Adapun strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (S-O) yang dapat dilakukan dalam selama periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan mutu dan daya saing sekolah melalui perbaikan infrastruktur sekolah dan penyehatan organisasi sekolah untuk mampu berprestasi unggul di level regional
2. Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan melalui sistem pendidikan dan pelatihan untuk penguasaan ICT dengan menjalin kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan dan mitra di luar negeri.

Strategi penguatan ini diharapkan mampu memayungi program-program peningkatan mutu pendidikan melalui kelayakan sekolah dan sertifikasi guru oleh lembaga sertifikasi pendidikan, mulai dari program peningkatan infrastruktur sekolah, peningkatan sistem tatakelola dan program peningkatan kesehatan organisasi sekolah yang semuanya harus bermuara kepada penciptaan sekolah yang layak, unggul, berprestasi nasional dan mampu menjalan kerja sama dengan sekolah mitra di luar negeri, atau paling tidak pada level ASEAN.

Sedangkan strategi perbaikan untuk peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat (W-T) yang dapat dilakukan dalam periode renstra ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan sistem tata kelola sekolah melalui perbaikan sistem informasi teknologi yang menunjang proses pembelajaran untuk menyaring informasi dan teknologi yang masuk secara bebas dalam lingkungan sekolah
2. Peningkatan pendidikan karakter melalui penyehatan lingkungan internal sekolah yang menyenangkan dengan menanamkan nilai –nilai kebangsaan dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran oleh guru dan warga sekolah.

Diharapkan keempat strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional diatas dapat menghasilkan dan memayungi program dan kegiatan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam lima tahun ke depan dengan sasaran utamanya adalah terciptanya daya saing kualitas pendidikan Sumatera Barat di level regional yang ditandai dengan terdapatnya sekolah yang berakreditasi internasional, terdapatnya sekolah yang menjalin kerjasama dengan sekolah mitra regional untuk peningkatan mutu pembelajaran, mutu guru dan mutu sistem tatakelola untuk meningkatkan kelayakan sekolah menengah di Sumatera Barat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PENDIDIKAN

Pada bab ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat. Tujuan yang dirumuskan tentunya telah diturunkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap tujuan yang dirumuskan pula sasaran yang hendak dicapai dan indikator tujuan dan sasaran, serta target kinerja sesuai dengan tujuan berdasarkan tahun perencanaan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RPJMD Provinsi Sumatera Barat

Mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Barat maka Visi yang ditetapkan adalah Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah:

TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang terkait dengan Urusan Pendidikan adalah Misi ke 3 yaitu Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.

Sedangkan Tujuan sesuai dengan Misi ke 3 yang terkait dengan Pendidikan tersebut adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas dan berkarakter serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya integritas peserta didik;
3. Meningkatnya pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Meningkatnya daya saing lulusan pendidikan menengah untuk masuk perguruan tinggi atau pasar kerja;

4.2. Tujuan dan Sasaran Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD maka Tujuan yang Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah “**Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat**” Sedangkan Indikator dan Target yang ditetapkan adalah sebagai berikut;

Tabel 4.1.1. Target Tahunan Capaian Tujuan Dinas Pendidikan Sumatera Barat.

Tujuan	Indikator	Target				
		2017	2018	2019	2020	2021
Terwujudnya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah	13,94	14,20	14,50	14,80	15,09
	2. Rata-rata lama Sekolah	8,46	8,49	8,56	8,63	8,66
Meningkatnya kinerja Organisasi	Nilai hasil Evaluasi Akuntabilitas	B	B	B	B	B

Selanjutnya untuk mencapai Tujuan Jangka Menengah tersebut maka sasaran yang ditetapkan adalah :

1. Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan
2. Meningkatkan Integritas Peserta Didik
3. Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan
4. Meningkatkan Daya Saing Lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan Pasar Kerja.
5. Meningkatkan tata kelola organisasi

Selanjutnya untuk Indikator dan Target sasaran dapat dilihat pada table dibawah ini ;

Tabel 4.1.2. Target Tahunan Capaian Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat.

: Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter							
Misi 3 Dan Berkualitas Tinggi							
Tujuan : Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat							
Indikator : Harapan lama sekolah dan rata - rata lama sekolah							
No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya akses dan pemerataan pendidikan	APM SMA/SMK/MA/SM ALB/Paket C	68.85	71.03	73.27	75.59	77.98
		APK SMA/SMK/MA/SM ALB/Paket C	86.20	86.58	86.96	87.34	87.72
		Angka Putus SMA	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001
		Angka Putus SMK	0.01	0.01	0	0	0
2.	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Indek integritas UN SMA/SMK	66.57	67.52	68.49	69.47	70.07
		Indek Integritas Peserta Didik	68.27	71.92	76.34	79.61	85
3.	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C	100.8 3	101.7 2	102.6 2	103.5 3	104.44
		Angka Kelulusan SMK	100.4 9	101.2 5	102.0 1	102.7 8	103.56
		Angka tidak lanjut ke SMA	4.86	5.31	5.81	6.36	6.96
		Kompetensi tenaga kependidikan/ UKG	74.02	75.80	77.62	79.48	81.39
		Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B	85.07	85.96	86.65	87.75	88.66

		Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B	61.32	65.82	71.15	75.79	79.74
4.	Meningkatnya Daya Saing lulusan Pendidikan Menengah untuk masuk Perguruan Tinggi dan pasar Kerja	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT	44.99	48.08	51.38	54.91	58.68
		Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)	27.71	28.79	29.92	31.10	32.32

Tujuan : Meningkatnya kinerja organisasi

Indikator : Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

5	Meningkatnya tata kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/Kegiatan	98%	98%	-	-	-

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Sumatera Barat yang diturunkan dari analisis SWOT dengan menelusuri faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan selama ini, sehingga ditemukan strategi yang tepat menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun ke depan.

Penyusunan rencana pembangunan pendidikan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Disdik Sumatera Barat mempunyai kekuatan atau keunggulan yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B 60,05%;
- b. Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi \geq S1 96,35%;
- c. UKG 61,63%;
- d. Lulusan SMA/SMK 99,85%;
- e. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- f. Budaya ABS-SBK (*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*) sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Dibalik kekuatan dan peluang, Disdik Sumatera Barat mempunyai gangguan yang bisa menghambat terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah distribusi guru yang belum merata secara spasial (3T) dan pusat pertumbuhan;
- b. Lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja masih rendah;
- c. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana pendidikan;
- d. Belum seimbang jumlah guru dengan kebutuhan;
- e. Belum optimalnya penerapan IPTEK; dan
- f. Masih belum dicabutnya moratorium pengangkatan GTK.

Disamping adanya gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Disdik Sumatera Barat, ada beberapa tantangan atau ancaman dari luar yang menyulitkan Disdik Sumatera Barat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yakni:

- a. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
- b. Pesatnya peningkatan kualitas pendidikan provinsi tetangga;
- c. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan

- d. isorientasi penggunaan teknologi informasi.

Untuk mengatasi tantangan atau ancaman tersebut, Disdik Sumatera Barat juga mempunyai peluang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga upaya-upaya yang telah dirumuskan dan direncanakan akan tercapai. Peluang-peluang tersebut adalah:

- a. Inpres No: 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK;
- b. PKG (pendidikan guru keahlian ganda) kompetensi tambahan. Contohnya Guru fisika selain mengajar sesuai dengan bida ilmunya, dia juga dapat mengajar tata boga;
- c. Pengadaan guru garis depan bagi daerah 3T;
- d. Peluang kerjasama dengan asosiasi dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan; dan
- e. Adanya Lembaga sertifikasi keahlian lulusan SMK. Terbukanya peluang bagi tamatan SMK untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.

Langkah pertama adalah merumuskan faktor strategis internal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat. faktor strategi internal yang mendorong kepada peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dapat dilihat dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan. Adapun faktor internal dari kekuatan peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat itu adalah 1). Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai, 2).Sistem manajemen sekolah yang sudah berjalan, 3).Infra struktur sekolah yang sudah ada, 4).Kesehatan organisasi sekolah. Sedangkan faktor internal yang merupakan kelemahan dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional adalah: 1). Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai, 2).Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah, 3).Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme, 4).Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah

Pada sisi lain faktor strategis eksternal yang mempengaruhi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat ke depan itu dari faktor peluang adalah: 1). Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu, 2). Penilaian sekolah berprestasi nasional, 3).Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN, 4).Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional.Sedangkan factor strategi sektornal berupa ancaman terhadap pencapaian daya saing pendidikan Sumatera Barat kedepan itu adalah: 1). Mudahnnya masuk informasi teknologi kelingkungan sekolah secara bebas, 2).Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga, 3).Standarisasi sekolah nasional dan

internasional, 4).Kecenderungan akan terjadidnya integrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah.

Berdasarkan kepada faktor strategis internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat diatas, kemudian dapat dirumuskan strategis peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Strategi ini tentunya akan memayungi program dan kegiatan dalam peningkatan daya saing di level regional dalam lima tahun ke depan. Berikut ini akan disajikan penyelarasan strategi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di lvel regional dengan program pembangunan pendidikan yang telah dituangkan dalam RPJMD Sumatera Barat 2016-2021.

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera			
Misi : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat, Beriman, Berkarakter dan Berkualitas Tinggi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Akses dan Pemerataan Pendidikan	Meningkatkan mutu dan daya saing sekolah menengah melalui perbaikan infrastruktur sekolah menengah	-Meningkatkan ketersediaan SMA, SMK dan SLB, melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB)
			-Meningkatkan ketersediaan SMK yang terkait dengan prioritas pembangunan daerah
			Meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) secara merata

	Meningkatnya Integritas Peserta Didik	Meningkatkan Pendidikan Karakter Melalui Penyehatan Lingkungan Internal Sekolah Menengah yang Menyenangkan dengan Menanamkan Nilai Nilai Kebangsaan dan Kearifan Budaya Lokal dalam Proses Pembelajaran Oleh Guru dan warga sekolah menengah	Menumbuhkan dan meningkatkan budi pekerti melalui pendidikan karakter berbasis nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal Minangkabau
	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Melalui Sistim Pendidikan dan Pelatihan untuk Penguasaan ICT dengan Menjalin Kerjasama dengan Sekolah Kejuruan dan Mitra di Luar Negeri	Memfasilitasi peningkatan kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan sekolah termasuk sekolah khusus dan layanan khusus
		Meningkatkan kualitas, kuantitas dan relevansi pendidikan	Penyediaan pendidikan inklusif dan layanan khusus pada pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti

	Meningkatnya Daya Saing Lulusan Pendidikan Menengah untuk Masuk Perguruan Tinggi atau Pasar Bekerja	Meningkatkan mutu, relevansi, daya saing pendidikan menengah dan literasi teknologi informasi	Penyediaan layanan dan kebutuhan operasional pendidikan bagi sekolah menengah
		Meningkatkan dan Mewujudkan Keterserapan Lulusan SMA dan SMK di Perguruan Tinggi dan di Dunia Usaha/Industri dan Kewirausahaan	Menjalin kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri dan luar negeri
	Meningkatnya Efisiensi dan Efektifitas Tatakelola Layanan Pendidikan	Meningkatkan efisiensi dan efektifitas tata kelola layanan pendidikan melalui penyehatan manajemen organisasi sekolah yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tatakelola Layanan Pendidikan

BAB VI
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021				Kendali Renstra pada 2020 Periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.
			DINAS PENDIDIKAN																	
Terwujudnya Peningkatan Tingkat Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1.01.01.1	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidikan (2019)	Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	438,33	0	170.005.000.000	6.820.782.900	582.199.201.401	7.947.647.890	75,68	11.220.110.706	7.416.340.674	617.032.705.300	8.157.974.741					
				Kompetensi Tenaga Pendidik (Guru SMA, SMK dan PLB)	432,98						75,68									
				Kompetensi Tenaga Kependidikan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah, Laboran, Pustakawan dan Pegawai TU Sekolah)	155,33						25,35									
		1.01.01.1.1	Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi SMK Tingkat Provinsi	Jumlah yang mengikuti Seleksi sebanyak 113 orang dan pembekalan sebanyak 6 orang Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas SMK ke tingkat Nasional untuk 6 jenis lomba	0,00	0					119 orang	320.476.400								
		1.01.01.1.2	Seleksi dan Pembekalan Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Tingkat SMA	Jumlah guru yang mengikuti Seleksi dan pembekalan guru dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat SMA	0,00	0					114 orang	329.923.500								
		1.01.01.1.3	Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keahlian	Pelatihan Kompetensi Sertifikasi Keahlian							66 orang	343.475.000								
		1.01.01.1.4	Pemberian Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMA	Duru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMA yang mendapatkan penghargaan		0		12 orang	157.346.440	18 orang	96.612.695	27 orang	202.657.620	27 orang	222.923.382					
		1.01.01.1.5	Pemberian Penghargaan Bagi Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMK	Duru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat Provinsi SMK yang mendapatkan penghargaan untuk 6 jenis lomba		0		12 orang	137.275.000	20 orang	202.437.945	30 Orang	202.437.945	30 Orang	222.681.740					
		1.01.01.1.6	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMA Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional, untuk seleksi 150 orang dan pembekalan sebanyak 15 orang		0	19 Kab/Kota	189.650.000	209 orang	448.888.000	8 mapel	405.974.100	11 MAPEL	360.000.000	11 MAPEL	396.000.000				
		1.01.01.1.7	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SMK Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional untuk 50 orang		0	19 Kab/Kota	189.650.000	171 orang	464.278.000	9 mapel	198.548.000	9 MAPEL	360.000.000	9 MAPEL	396.000.000				
		1.01.01.1.8	Diklat Calon Kepala Sekolah Tingkat Prov. Sumbang	Seleksi Akademik Calon Kepala Sekolah SMA dan SMK sebanyak 100 orang dan Diklat Calon Kepala SMA Tingkat Prov. Sumbang bekerjasama dengan LP2KS sebanyak 46 orang		0		60 orang	580.000.000	148 orang	445.210.014	seleksi akademik calon kepala sekolah SMA dan SMK sebanyak 100 orang	660.493.070	seleksi akademik calon kepala sekolah SMA dan SMK sebanyak 100 orang	726.542.377					
		1.01.01.1.9	Karya Ilmiah Peningkatan Kompetensi Supervisi Akademik dan Penelitian Pengembangan Pengawas SMK	Peningkatan Kompetensi Supervisi Akademik dan Penelitian Pengembangan Pengawas SMK melalui karya ilmiah yang dilaksanakan sebanyak 1 kali							50 orang	97.530.800								
		1.01.01.1.10	Workshop Pembinaan Kesiswaan SMK	Workshop Pembinaan Kesiswaan SMK yang dilaksanakan 2 angkatan							200 orang	563.310.000	200 Orang (2 angkatan)	241.736.400	200 Orang (2 angkatan)	265.910.040				
		1.01.01.1.11	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMA Tingkat Kab/Kota	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Tingkat Kab/Kota dilaksanakan 1 kali		0					670 orang	1.143.887.475								
		1.01.01.1.12	Bimtek Penulisan Naskah/Master Soal	Bimtingan Teknis Penulisan Naskah Soal untuk 6 Mata Pelajaran yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan							171 orang	345.197.550								
		1.01.01.1.13	Workshop Pengelolaan Penilaian Akademik SMK	Workshop Pengelolaan Penilaian Akademik SMK							200 orang	559.710.000	200 orang	309.710.000	200 orang	340.681.000				
		1.01.01.1.14	Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran dan Pustaka SMA	Kompetensi petugas Laboran dan Pustaka SMA yang ditingkatkan							110 orang	204.891.250	50 Orang	100.000.000	50 Orang	110.000.000				
		1.01.01.1.15	Peningkatan Kompetensi Operator SMA dan SMK	Operator SMA dan SMK yang ditingkatkan kompetensinya		0		367 orang	316.524.000	250 orang	327.637.000	250 Orang (2 angkatan)	419.695.500	250 Orang (2 angkatan)	461.665.050					
		1.01.01.1.16	Pelatihan Sertifikasi Asesor LSP1	Pelatihan Sertifikasi Asesor LSP1 yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan							150 orang	406.609.400	150 orang (3 angkatan)	300.000.000	150 orang (3 angkatan)	330.000.000				
		1.01.01.1.17	Pemberian Penghargaan bagi PTK Berprestasi tingkat TK, SD dan SMP	Duru, Kepala Sekolah dan Pengawas berprestasi Tingkat TK, SD dan SMP yang mendapatkan penghargaan							27 orang	230.588.070	27 orang	230.588.070	27 orang	253.646.877				
		1.01.01.1.18	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD dan SMP dilaksanakan 1 kali		0					171 orang	513.474.707								
		1.01.01.1.19	Bimtek dan Pembinaan Bagi Pengurus OSIS SMK se Sumatera Barat	Bimtek dan Pembinaan Bagi Pengurus OSIS SMK se Sumatera Barat dilaksanakan sebanyak 4 angkatan							400 orang	452.501.800								
		1.01.01.1.20	Bimtek Program Literasi di Sekolah Jenjang SMA	Bimtek Program Literasi di Sekolah untuk guru mapel di SMA		0		orang	450.000.000	228 orang	395.800.000									
		1.01.01.1.21	Bimtek Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P.1 bagi SMK se Sumbang	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P.1 bagi SMK se Sumbang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan		0					100 orang	690.447.000	150 orang (2 angkatan)	100.000.000	150 orang (2 angkatan)	110.000.000				
		1.01.01.1.22	Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran dan Pustaka SMK	Kompetensi Petugas Laboran dan Pustaka SMK yang ditingkatkan							108 orang	200.032.500	50 Orang	100.000.000	50 Orang	110.000.000				
		1.01.01.1.23	Peningkatan Kompetensi Profesional Guru SMK untuk Kompetensi Keahlian	Kompetensi Profesional Guru SMK untuk Kompetensi Keahlian yang ditingkatkan							240 orang	493.980.300	20 Orang	360.000.000	20 Orang	396.000.000				
		1.01.01.1.24	Bimtek Penulisan Karya Ilmiah Guru SMK	Bimbingan Teknis Penulisan Karya ilmiah Guru SMK yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan							108 orang	201.180.000								
		1.01.01.1.25	Workshop Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah	terlaksananya Workshop Pengembangan Kepemimpinan Kepala Sekolah							60 orang	360.000.000								
		1.01.01.1.26	Workshop Peningkatan Kompetensi Guru	terlaksananya Workshop Peningkatan Kompetensi Guru							60 orang	360.000.000	50 Orang	100.000.000	50 Orang	110.000.000				

		1.01.01.1.27	Bimbingan Teknis Pendekatan Andragogi dalam Pembelajaran	teraksanannya Bimbingan Teknis Pendekatan andragogi dalam pembelajaran							60 orang	360.000.000	60 orang	100.000.000	60 orang	110.000.000		
		1.01.01.1.28	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas SMK Tingkat Kab/Kota	Seleksi dan pembekalan Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Tingkat Kab/Kota dilaksanakan 1 kali	0						565 orang	970.675.200						
			Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMA pengawas ke Tingkat Nasional	Seleksi dan pembekalan guru dan kepala sekolah tingkat sma pengawas ke tingkat Nasional					120 orang	374.477.550								
			Seleksi dan Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Tingkat SMK, pengawas ke Tingkat Nasional	Seleksi dan pembekalan guru dan kepala sekolah tingkat smk pengawas ke tingkat Nasional					114 orang	269.445.200								
			Pemberdayaan MGMP SMA Sumbang	MGMP SMA se Sumbang yang ditingkatkan di Kab/Kota					5 Kelompok	236.250.000								
			Pemberdayaan MGMP SMK Sumbang	MGMP SMK se Sumbang yang ditingkatkan di Kab/Kota					10 Kelompok	444.300.000								
			Sertifikasi Asesor Guru SMK se Sumatera Barat	Asesor Guru SMK yang bersertifikasi se Sumatera Barat dilaksanakan 1 kali					60 orang	349.576.750								
			Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA Tingkat Provinsi	Bimtek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA Tingkat Provinsi dilaksanakan 1 kali					50 orang	280.946.500								
			Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMK Tingkat Provinsi	Bimtek Tindakan Kelas (PTK) Guru SMK tingkat Provinsi dilaksanakan 1 kali					50 orang	386.895.800								
			Rekrutmen dan Pembekalan Guru Inti SMA dan SMK Tingkat Prov. Sumbang	Guru Inti SMA dan SMK yang direkrut dan dibekali	320 orang	667.863.000		320 orang	659.093.500									
			Peningkatan Kompetensi Kepala SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Peningkatan Kompetensi Kepala SMA	50 orang	305.000.000		50 orang	213.500.000									
			Peningkatan Kompetensi Kepala SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Peningkatan Kompetensi Kepala SMK	50 orang	305.000.000		50 orang	298.414.950									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas laboran SMA Tingkat Provinsi	50 orang	305.000.000		50 orang	213.500.000									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Laboran SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas laboran SMK Tingkat Provinsi	50 orang	305.000.000		50 orang	211.036.200									
			Penguatan Kelembagaan dan Pelaksanaan upoksi Pengawas SMA dan SMK	Penelitian dan Kelembagaan dan Pelaksanaan Upoksi Pengawas SMA dan SMK	57 orang	239.400.000		57 orang	139.650.000									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Tata Usaha SMA Tingkat Provinsi	150 orang	262.500.000		150 orang	245.000.000									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Tata Usaha SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Tata Usaha SMK Tingkat Provinsi	100 orang	210.000.000		100 orang	211.036.200									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMA Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMA Tingkat Provinsi	55 orang	192.500.000		55 orang	204.375.000									
			Peningkatan Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMK Tingkat Provinsi	Meningkatnya Kompetensi Petugas Pengelola Perpustakaan SMK Tingkat Provinsi	50 orang	175.000.000		50 orang	204.375.000									
			Peningkatan Kompetensi Guru Pembina Olimpiade SMA	Guru Pembina Olimpiade SMA yang ditingkatkan kompetensinya					orang	238.803.900								
			Bimbingan Teknis Kompetensi Pembina UKS Tingkat SMA	Pembina UKS Tingkat SMA yang ditingkatkan kompetensinya					orang	213.659.900								
			Bimtek Asesor Penilaian Kinerja Guru	Jumlah Asesor Penilaian Kinerja Guru yang mengikuti Bimtek									30 Orang (3 angkatan)	50.000.000	30 Orang (3 angkatan)	55.000.000		
			Bimtek Pendidikan dan latihan Work Place Assesor (WPA) Bagi Guru Kejuruan SMK	Jumlah guru kejuruan SMK yang mengikuti Bimtek Pendidikan dan latihan Work Place Assesor (WPA)									60 Orang (2 angkatan)	50.000.000	60 Orang (2 angkatan)	55.000.000		
			Bimtek Penelitian Tindakan Kelas (PTK) Guru SMA dan SMK	Jumlah guru SMA/SMK yang mengikuti Bimtek Penelitian Tindakan Kelas									20 orang (3 angkatan)	50.000.000	20 orang (3 angkatan)	55.000.000		
			Bimtek Penelitian Tindakan Pengawas dan Kepala SMA dan SMK	Jumlah Pengawas dan Kepala Sekolah SMA dan SMK yang mengikuti Bimtek Penelitian Tindakan Sekolah									20 Orang (3 angkatan)	50.000.000	20 Orang (3 angkatan)	55.000.000		
			Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala Tenaga Administrasi SMA dan SMK	Jumlah Kepala Tenaga Administrasi SMA dan SMK yang mengikuti Bimbingan Teknis									20 orang (4 angkatan)	50.000.000	20 orang (4 angkatan)	55.000.000		
			Diklat Calon Pengawas Sekolah	Jumlah Calon Pengawas Sekolah yang mengikuti diklat									50 Orang	50.000.000	50 Orang	55.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (GTK) Tingkat SMA	Jumlah guru dan tenaga kependidikan tingkat SMA yang mengikuti lomba tingkat Provinsi									14 orang	850.000.000	14 orang	935.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi (GTK) Tingkat SMK	Jumlah guru dan tenaga kependidikan tingkat SMK yang mengikuti lomba									19 Orang	720.476.400	19 Orang	792.524.040		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Berprestasi Tingkat Kota Padang	Jumlah guru dan tenaga kependidikan tingkat SMA yang mengikuti lomba									30 orang	50.000.000	30 orang	55.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah IV (Payakumbuh, Tanah Datar, Lima Puluh Kota)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah IV Payakumbuh, Tanah Datar, Lima Puluh Kota yang mengikuti lomba									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah V (Sijunjung, Sawahlunto dan Dharmasraya)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah V (Sijunjung, Sawahlunto dan Dharmasraya)									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VI (Agam dan Pasaman Barat)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VI (Agam dan Pasaman Barat)									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VII (Pesisir Selatan)	Jumlah Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VII Pesisir Selatan yang mengikuti lomba									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VIII (Mentawai)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah VIII (Mentawai) yang mengikuti lomba									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah I (Bukittinggi, Padang Panjang dan Pasaman)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah I (Bukittinggi, Padang Panjang dan Pasaman) yang mengikuti lomba									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah II (Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah II (Pariaman dan Kab. Padang Pariaman) yang mengikuti lomba									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Solok Selatan)	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMA dan SMK Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Solok Selatan)									3 lomba	10.000.000	3 lomba	11.000.000		
			Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan SMK Berprestasi Tingkat Kota Padang	Jumlah Guru dan Tenaga Kependidikan SMK yang mengikuti lomba									30 orang	50.000.000	30 orang	55.000.000		

	1.01.01.3.33	Revitalisasi Gedung SLB	Gedung SLB yang direvitalisasi		0		2 SLB Negeri	783.442.727	4 SLB Negeri	881.707.400									
	1.01.01.3.34	Verifikasi Pendirian SLB Baru	SLB Baru yang didirikan		0		5 Sekolah	75.000.000	10 sekolah	58.616.050									
	1.01.01.3.35	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Penilaian K.13 Bagi Guru SLB	Pelatihan Teknis Pelaksanaan Penilaian K.13 Bagi Guru SLB dilaksanakan 1 kali		0		80 orang	305.565.000	100 orang	216.227.200	00 orang	216.227.200	00 orang	237.849.920					
	1.01.01.3.36	Penguatan Kurikulum 2013 bagi Kepala SLB	Penguatan Kurikulum 2013 bagi Kepala SLB yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan						150 orang	368.798.100	50 orang	343.178.000	50 orang	377.495.800					
	1.01.01.3.37	Peningkatan Kompetensi Guru SLB melalui SIMPKB	Peningkatan Kompetensi Guru SLB melalui SIMPKB yang dilaksanakan sebanyak 4 lokasi						150 orang	529.951.100	80 orang	414.587.765	80 orang	456.046.542					
	1.01.01.3.38	Penyediaan Sarana dan Prasarana SLB (DAK)	Sarana dan Prasarana DAK		0				72 paket	14.097.000.000									
	1.01.01.3.39	Pembangunan Fasilitas Gedung SLB	Fasilitas Gedung SLB yang dibangun		0				18 sekolah	5.192.061.400	7 sekolah	475.000.000	7 sekolah	522.500.000					
		Pengelolaan SLB Negeri di Sumatera Barat			30 sekolah	4.787.200.000	28 sekolah	4.163.349.250	29 sekolah	4.578.362.750	29 sekolah	4.803.278.635	29 sekolah	5.283.606.499					
		Pembinaan dan Pengembangan KKKs/ KKG, MKKS	KKKs/ KKG, MKKS yang dikembangkan dan diberikan pembinaan				36 Kelompok	503.216.840											
		Pengadaan Alat Praktek/ Peraga Pendidikan SLB	Alat Peraga Pendidikan SLB				15 Paket	472.594.360											
		Pengadaan Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Rias, Tata Rias) SLB	Penyediaan Alat Keterampilan (Tata Boga, Tata Rias, Tata Rias) SLB		15 Paket	150.000.000	15 Paket	472.594.360											
		Peningkatan Kompetensi Pengawas SLB	Pengawas SLB yang ditingkatkan kompetensinya				15 orang	52.651.000											
		Pembangunan Ruang Keterampilan Sekolah Luar Biasa (SLB)	Ruang Keterampilan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang dibangun				5 Sekolah	511.111.420											
		Pembuatan Pagar Sekolah Luar Biasa	Pagar Sekolah Luar Biasa yang dibuat				1 (satu) Sekolah	541.670.100											
		Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala/Tenaga Administrasi SLB	Jumlah Peserta Bimtek Peningkatan Kompetensi Kepala/Tenaga Administrasi SLB								20 orang	317.875.250	20 orang	349.662.775					
		Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)	Jumlah Peserta Seleksi GTK Berprestasi dan Berdedikasi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)								40 orang	60.000.000	40 orang	66.000.000					
		Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi SLB, Inklusi dan Daerah 3T)	Jumlah cabang lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi dan Berdedikasi Tingkat Provinsi (SLB, Inklusi dan Daerah 3T)								10 cabang	660.427.200	10 cabang	736.369.920					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah I (Bukittinggi, Padang Panjang dan Pasaman)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah I								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah II (Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah II								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Solok Selatan)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah III								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah IV (Payakumbuh, Tanah Datar, Lima Pulu Kota)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah IV								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah V (Sijunjung, Sawahlunto dan Dharmasraya)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah V								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah VI (Agam dan Pasaman Barat)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah VI								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah VII (Pesisir Selatan)	Jumlah Peserta Lomba Guru dan Tenaga KependidikanSLB Wilayah VII								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah I Bukittinggi, Padang Panjang dan Pasaman)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah I								20 siswa	11.039.600	20 siswa	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah II (Kab. Solok, Kota Solok, Solok Selatan)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah II								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah III (Kab. Solok, Kota Solok, Solok Selatan)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah III								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah IV Payakumbuh, Tanah Datar, Lima Pulu Kota)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah IV								20 siswa	11.039.600	20 siswa	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah V Sijunjung, Sawahlunto dan Dharmasraya)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah V								20 orang	11.039.600	20 orang	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah VI (Agam dan Pasaman Barat)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah VI								20 siswa	11.039.600	20 siswa	12.143.560					
		Lomba-lomba siswa SLB Wilayah VII (Pesisir Selatan)	Jumlah Peserta Lomba-lomba siswa SLB Wilayah VII								20 siswa	11.039.600	20 siswa	12.143.560					
		US SDLB dan UAS SLB Tahun Pelajaran 2016 / 2017	Erselenggaranya Ujian Sekolah di SLB Tahun Pelajaran 2016/2017		23 Mapel	665.000.000													
		Validasi dan Evaluasi KTSP SLB	Erselenggaranya dan Evaluasi KTSP SLB		138 Sekolah	207.000.000													
		JPTD Sekolah Keterbatasan Olahraga	Erselenggaranya PBM di Sekolah Keterbatasan Olahraga		12 Bulan	430.500.000													
		Pembinaan dan Pengembangan KKKs dan KKG SLB	Erselenggaranya kegiatan KKKs dan KKG SLB secara optimal		18 Kab/ Kota	450.000.000													
		Peralatan Kelembagaan SLB Negeri	Erselenggaranya Kelembagaan SLB Negeri		30 Sekolah	208.125.000													
		Pengadaan Alat Peraga Pendidikan SLB	Erselenggaranya Alat Peraga Pendidikan SLB		15 Paket	75.000.000													
		Rekrutmen dan Pelatihan Calon Kepala SLB	Erselenggaranya Calon Kepala SLB		20 Org	195.000.000													
		Rekrutmen dan Pelatihan Calon Pengawas SLB	Erselenggaranya Calon Pengawas SLB		20 Org	195.000.000													
		Pemantapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	Erselenggaranya Pemantapan Pendidikan Inklusi		9 Kab/ Kota	392.000.000													
	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	1.01.01.4	Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan (2017-2018)	Sekolah Menengah/SLB Terakreditasi Minimal B	454,75	0	2.557.625.000	16.161.276.561	76,65	20.407.234.690	17.218.327.838	18.940.160.622							
				RPK PAUD	438,88														
				APM SD/SLB/Paket A/MI	536,00														
				NPM SMP/MTs/ SMP/ B/ Paket B	488,15														
				Erselenggaranya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA dan SMK	0	7 Kota	483.500.000	18 Kab/Kota	820.000.000	341 orang	928.328.400	aplikasi	728.328.400	aplikasi	801.161.240				
				Gebyar Pendidikan dan Sumber Expo	0			2 kali	1.027.414.000	112 sekolah	1.059.453.700	12 sekolah	844.509.800	12 sekolah	928.960.780				
				Pemberdayaan Dewan Pendidikan	0			12 bulan	680.648.050	126 orang	615.466.050	kegiatan	600.802.750	kegiatan	660.883.025				

1.01.01.4.4	Penyusunan Data Base Pendidikan	Terusunya Data Pokok dan Profil Dinas Pendidikan dan Terfithnya Operator Dapodik SMA, SMK, SLB dan Dinas Kabupaten di Sumatera Barat	0	1 Dok	264.000.000	1 dok	278.720.400	219 orang	331.379.000	88 buku, 239 orang	288.063.500	88 buku, 239 orang	316.869.850						
1.01.01.4.5	Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Penemuan SNP Pada Sekolah Yang Terakreditasi	Eraksananya Bimtek Pemetaan Mutu dan Perencanaan Penemuan pada sekolah SMA dan SMK yang terakreditasi	0					360 orang	394.857.150	860 orang	194.857.150	860 orang	214.342.865						
1.01.01.4.6	Perjamin Mutu Pendidikan	Eraksananya pembinaan penjaminan mutu pendidikan bagi sekolah yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi				100 Sekolah	215.000.000	1 kegiatan	354.917.700										
1.01.01.4.7	Olimpiade Dan Raga Siswa Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Eraksananya Pambinaan Lomba-Lomba Siswa SD dan SMP dibidang Diatraga	0			16 cab SD dan SMP	1.152.522.490	4 cab SMP	1.440.211.545	6 cab SD dan 5 cab SMP	1.142.768.500	6 cab SD dan 5 cab SMP	1.257.045.350						
1.01.01.4.8	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FL2SN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Eraksananya FL2SN SD dan SMP Prov. Sumatera Barat dan terdapatnya Jusuan FL2SN SD dan SMP ke Tingkat Nasional	0			21 cab SD dan SMP	753.520.500	9 cab SMP	798.803.300	1 cab SD dan 9 cab SMP	855.199.000	1 cab SD dan 9 cab SMP	940.718.900						
1.01.01.4.9	Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Eraksananya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD dan SMP untuk mewakili Sumatera Barat ke tingkat Nasional	0			5 cab SD dan SMP	457.454.990	2mapel SD	402.132.145	2 mapel SD dan 3 mapel SMP 114 orang	402.132.188	2 mapel SD dan 3 mapel SMP 114 orang	442.345.407						
1.01.01.4.10	Lomba Olimpiade Guru Nasional (OGN) SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional	Lomba Olimpiade Sain Guru SD dan SMP Tingkat Provinsi dan Persiapan Tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali dan tingkat Nasional dilaksanakan 1 kali	0			171 orang	263.462.500	3 mapel SMP	257.684.400	2 mapel SD dan 3 mapel SMP	284.903.600	2 mapel SD dan 3 mapel SMP	313.393.960						
1.01.01.4.11	Sosialisasi Penerimaan, Pendistribusian, Pelaporan, Penghapusan Blanko Ijazah SMA, SMK dan SLB	erossialisasinya penulisan Ijazah dan penghapusan Ijazah SMA, SMK, dan SLB	0					171 orang	236.263.900	71 orang	156.457.350	71 orang	172.103.085						
1.01.01.4.12	Lomba Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	Perfithnya Sekolah Sehat (UKS) Tk. Provinsi	0	1 Keg	124.100.000	1 Keg	337.575.900	72 sekolah	383.506.900	72 sekolah	383.506.900	72 sekolah	421.857.590						
1.01.01.4.13	Pra UN SMA dan SMK	Penyusunan, Cetak Naskah dan distribusi ke sekolah SMA dan SMK se Sumbar	0			75000 orang	2.130.162.500	72802 orang siswa	1.268.104.200	2.802 orang siswa	894.211.800	2.802 orang siswa	983.632.980						
1.01.01.4.14	Penyeban Informasi Pendidikan melalui WEB	Informasi Pendidikan yang disebarakan melalui WEB	0	1 Keg	232.500.000	1 Keg	232.500.000	12 bulan	373.675.000	2 bin	392.881.400	2 bin	432.169.540						
1.01.01.4.15	Penilaian Angka Kredit Guru dan Pengawas	1. Teraksananya Penilaian Angka Kredit bagi Kepala Sekolah/Guru SMA SMK SLB dan Pengawas prdide Oktober 2019 dan April 2020 Se Sumatera Barat; 2. Eraksananya Pelatihan Angka Kredit Dulu SMA/SMK/SLB dan Pengawas se Sumatera Barat	0	3500 guru	269.500.000	3500 guru	259.063.000	150 orang	693.962.600	200 orang	788.359.600	200 orang	867.195.560						
1.01.01.4.16	Seleksi Apresiasi GTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi	DTK PAUD dan DIKMAS Berprestasi Tingkat Provinsi yang mengikuti seleksi	0			16 cabang	320.000.000	16 lomba	614.041.300	804 orang 16 cabang lomba	324.269.500	804 orang 16 cabang lomba	356.696.450						
1.01.01.4.17	Evaluasi Dan Validasi Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB	Implementasi KTSP SMA, SMK dan SLB yang di evaluasi dan divalidasi sebanyak 1.160 KTSP	0			SMA, SMK dan SLB	766.067.000	859 orang	671.671.300	160 KTSP	424.564.950	160 KTSP	467.021.445						
1.01.01.4.18	Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB	Eraksananya Bimtek Pengelola Penatausahaan Keuangan SMA/SMK/SLB Negeri Se Sumatera Barat	0			381 orang	651.519.700	750 orang	361.942.150	740 orang	439.342.250	740 orang	483.276.475						
1.01.01.4.19	Peningkatan Kompetensi Pengurus Barang dan Aset SMA, SMK dan SLB	Pengurus Barang dan Aset yang ditingkatkan kompetensinya dilaksanakan sebanyak 4 angkatan	0			362 sekolah + 7 Cabdin	651.519.700	371 orang	617.105.500	371 orang	206.915.500	371 orang	227.607.050						
1.01.01.4.20	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah PNS Hingungan Dinas Pendidikan	PNS yang dilantik sekaligus pengambilan sumpah PNS dilingkungan Dinas Pendidikan						750 orang	22.500.000	2 bin	54.900.000	2 bin	60.390.000						
1.01.01.4.21	Bimtek Manajemen Perundang-undangan Bidang Kepegawaian	Eraksananya Biatek PP No. 11 Tahun 2017 dan Pergub Bidang Kepegawaian	0					374 orang	505.476.800	374 orang	125.000.000	374 orang	137.500.000						
1.01.01.4.22	Pengembangan Duta Rumah Belajar Sumatera Barat	Duta Rumah Belajar yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 3 angkatan	0					171 orang	134.177.000	50 orang (1 angkatan)	50.000.000	50 orang (1 angkatan)	55.000.000						
1.01.01.4.23	Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA dan SMK	Pengembangan Sistem Ujian Semester Berbasis Komputer (USBK) SMA sebanyak 325 sekolah dan SMK sebanyak 211 sekolah						636 sekolah	638.773.300										
1.01.01.4.24	Pengadaan Server dan Jaringan pada UPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan	Pengadaan Server dan Jaringan pada JPTD Baltekomdik Dinas Pendidikan sebanyak 2 unit	0					2 unit	867.452.600										
1.01.01.4.25	Perataan Kelembagaan SMK se Sumatera Barat	Kelembagaan SMK se Sumatera Barat yang tertata dengan baik	217 sekolah		162.000.000			210 sekolah	229.100.000										
1.01.01.4.26	Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK	Festival Bahasa dan Budaya Jepang Tingkat SMA dan SMK yang dilaksanakan 1 kali	0					7 cabang	196.845.750	5 Cabang	196.845.750	5 Cabang	216.530.325						
1.01.01.4.27	Pengembangan Bahan Ajar Digital (Animasi) bagi Guru SMA dan SMK	Bahan ajar digital (animasi) bagi guru SMA dan SMK yang dikembangkan yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan						110 orang	298.664.550										
1.01.01.4.28	Peningkatan Kompetensi GTK Jenjang Pendidikan Dasar	Kompetensi GTK jenjang Pendidikan Dasar yang ditingkatkan untuk 4 Mapel SMP dan 3 Mapel SD						7 mapel	941.825.000	7 Mapel	10.000.000	7 Mapel	11.000.000						
1.01.01.4.29	Simbingan Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga	erjalannya Kemitraan dengan Komite Sekolah dalam meningkatkan kesadaran prang tua dalam memajukan pendidikan	0					60 orang	122.473.650	75 Orang	122.473.650	75 Orang	134.721.015						
1.01.01.4.30	Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Urusan Pendidikan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional program pendidikan antar kabupaten Kota	0	108 orang	349.500.000	2 Kali	1.364.750.400	1146 orang	1.364.750.400	107 orang	1.024.451.200	107 orang	1.126.896.320						
1.01.01.4.31	Pengelolaan Dana BOS	Dana BOS yang dikelola dengan baik sebanyak 325 SMA, 211 SMK dan 147 SLB	0		267.525.000	679 Sekolah	2.082.512.231	680 sekolah	2.098.767.900	880 Sekolah, 19 Kab/Kota	1.731.203.900	880 Sekolah, 19 Kab/Kota	1.904.324.290						
1.01.01.4.32	Pengadaan Blangko Rapor Siswa SMA, SMK dan SLB	Siswa SMA, SMK dan SLB yang mendapatkan rapor	0	81000 sekolah	405.000.000	70.000 siswa	1.014.350.000	83500 eks	1.182.901.500	32.330	1.239.033.300	32.330	1.362.936.630						
	Membangun Aplikasi Online Data Base Pengelolaan Keuangan Sekolah	Jumlah aplikasi database keuangan sekolah yang terbangun								aplikasi	50.000.000	aplikasi	55.000.000						
	Pembinaan dan Pembekalan Kuis Kita Harus Belajar (Khajar) tingkat Provinsi	Jumlah siswa yang dibina untuk mengikuti kuis Khajar tingkat nasional								76 orang	50.000.000	76 orang	55.000.000						
	Pengelolaan UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan (Baltekomdik) Dinas Pendidikan Prov. Sumbar	Erasedianya operasional UPTD Baltekomdik								2 bulan	50.000.000	2 bulan	55.000.000						
	Pengembangan Bahan Ajar Digital (Animasi) bagi Guru SMA dan SMK	Jumlah guru SMA dan SMK yang mendapat pelatihan								10 Orang (2 angkatan)	50.000.000	10 Orang (2 angkatan)	55.000.000						
	Penjaminan Keberlanjutan Pendidikan	Jumlah siswa SMA, SMK dan SLB yang diberi beasiswa								1.000 Orang	50.000.000	1.000 Orang	55.000.000						

1.01.01.6.16	Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat	Siswa SMA yang akan mewakili Sumatera Barat pada NSDC dan LDBI Tingkat Provinsi dan Nasional	0	57 Orang	257.000.000	57 Orang	373.790.490	114 peserta	307.604.090	6 Orang	475.370.000	6 Orang	522.907.000		
1.01.01.6.17	Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA Kelas X Baru	Siswa SMA Kelas X Baru	0			110 sekolah	400.000.000	60 orang	133.414.000	80 orang	205.414.000	80 orang	225.955.400		
1.01.01.6.18	Lomba Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Tingkat SMA Kabupaten/Kota	Siswa SMA yang akan mewakili sekolah di tingkat Kab/Kota pada lomba NSDC dan LDBI	0					19 kab/kota	784.077.700						
1.01.01.6.19	Lomba Cerdas Cermat TAP MPR RI SMA/SMK/MA ke tingkat Nasional	Lomba Cerdas Cermat TAP MPR RI SMA/SMK/MA ke tingkat Nasional	0	228 orang	220.500.000	228 orang	244.180.490	190 orang	417.960.390	209 orang	595.764.000	209 orang	655.340.400		
1.01.01.6.20	Workshop guru Bahasa Inggris SMA (ECAFE Learning)	Workshop guru Bahasa Inggris SMA (ECAFE Learning)	0	19 Kab/Kota	235.500.000	60 orang	200.000.000	120 orang	225.829.600	20 orang	250.000.000	20 orang	275.000.000		
1.01.01.6.22	Lomba Best Practise Kepala SMA	Lomba Best Practise Kepala SMA se jember	0			20 orang	200.000.000	100 orang	236.353.400	100 orang	136.353.400	100 orang	149.988.740		
1.01.01.6.23	Rapat Teknis dan Bimbingan pada Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SMA	Erfeksananya Rapat Teknis dan Bimbingan pada Tim Pengembangan Kurikulum Tingkat SMA	0			35 orang	438.040.600	228 orang	362.110.000						
1.01.01.6.24	Pengadaan Mobiler/Furniture Laboratorium SMA	Mobiler/Furniture Laboratorium SMA yang rusak	0					1 paket	300.000.000	0 sekolah (0 paket)	200.000.000	0 sekolah (0 paket)	220.000.000		
1.01.01.6.25	Pengadaan Moubiler Ruang Kelas SMA	Moubiler Ruang Kelas SMA yang rusak	0					1 paket	250.000.000	0 sekolah (0 paket)	2.680.626.500	0 sekolah (0 paket)	2.948.689.150		
1.01.01.6.26	Rehabilitasi Gedung SMA	gedung SMA yang akan di rehabilitasi	0		25 lokasi	5.472.798.500	2 paket	446.000.000	ruang	500.000.000	ruang	550.000.000			
1.01.01.6.27	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMA	Komputer dan Jaringan SMA yang rusak	0					1 paket	300.000.000	0 sekolah (0 paket)	3.113.001.603	0 sekolah (0 paket)	3.424.301.763		
1.01.01.6.28	Penyediaan Bahan Praktek Pendidikan Bagi Siswa di BLPT	Erfeksananya Bahan praktek Siswa Jurusan Bangunan, elektronika, listrik, mesin, otomotif	0	3 paket	235.000.000	3 paket	358.500.000	5 jurusan	430.200.000						
1.01.01.6.29	Pengadaan Alat Kesenian dan Olahraga SMA	Erfeksananya pengadaan alat Kesenian SMA	0			3 paket	457.500.000	1 paket	250.000.000	sekolah	200.000.000	sekolah	220.000.000		
1.01.01.6.30	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMA	Erfeksananya Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif	0					1 paket	350.000.000	23 sekolah (23 paket)	2.680.626.500	23 sekolah (23 paket)	2.948.689.150		
1.01.01.6.31	Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui SP	Erfeksananya Uji Kompetensi Keahlian siswa SMK melalui LSP	0	400 orang	270.000.000	320 siswa	143.087.200	320 siswa	226.239.400	820 siswa	288.726.790	820 siswa	317.599.469		
1.01.01.6.32	Perbaikan Peralatan Praktek/Peraga Siswa di BLPT	Erfeksananya perbaikan peralatan praktek peraga siswa di BLPT	0	5 Jurusan	62.500.000	5 jurusan	68.750.000	6 jurusan	75.625.000						
1.01.01.6.33	Pengelolaan Asrama BLPT	Erfeksananya kelengkapan asrama yang persentatif di BLPT	0	12 Bulan	54.655.450	12 bulan	60.130.800	5 unit asrama	106.850.000						
1.01.01.6.34	Pengadaan Buku Pustaka dan Buku Referensi SMA	Erfeksananya Pengadaan Buku Pustaka dan Buku Referensi SMA	0					1 paket	350.000.000						
1.01.01.6.35	Pemeliharaan Gedung Praktek (Workshop) BLPT dan Asrama BLPT	pereliharaan Gedung praktek workshop BLPT dan Asrama BLPT	0			1 paket	192.500.000	2 unit	199.136.700						
1.01.01.6.235	Praktek Kompetensi Keahlian Siswa SMK	Erfeksananya Praktek Kompetensi Keahlian Siswa SMK	0	400 siswa	431.994.100	320 siswa	533.724.700	320 siswa	708.615.150	820 siswa	722.602.650	820 siswa	794.862.915		
1.01.01.6.259	Pengadaan Alat Praktek Siswa SMK (Workshop BLPT)	Erfeksananya Pengadaan alat praktek siswa 5 workshop (Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin dan Otomotif) di BLPT	0	6 set	183.460.000			5 paket	3.891.518.350						
1.01.01.6.264	Pembinaan dan Pelaksanaan FIKSI SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Erfeksananya Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa (FIKSI) SMK Tingkat Provinsi	0					342 orang	308.083.900						
1.01.01.6.271	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional	Erfeksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS)	0	32 Cabang	883.021.845	589 orang	324.125.700	36 cabang	785.354.800	84 cabang	784.077.700	84 cabang	862.485.470		
1.01.01.6.262	Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Kabupaten/Kota	Erfeksananya Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Kab/Kota	0					19 kab/kota	784.077.700						
1.01.01.6.266	Pembinaan dan Pelaksanaan FLS2N SMK Tingkat Kabupaten/Kota	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional SMK Tingkat Kabupaten/Kota	0					19 kab/kota	1.071.486.500						
1.01.01.6.288	Pembinaan dan Pelaksanaan FLS2N SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMK Tingkat Provinsi	0	10 Cabang	433.200.000	10 Cabang	462.878.200	323 orang	626.667.400	823 orang	626.667.400	823 orang	689.334.140		
1.01.01.6.297	Pembinaan dan Pelaksanaan O2SN SMK Tingkat Provinsi Sumatera Barat	O2SN SMK Tingkat Provinsi yang dilaksanakan sebanyak 10 cabang	0	10 Cabang	564.100.000	10 Cabang	350.370.500	190 orang	379.900.200	90 orang	379.900.200	90 orang	417.890.220		
1.01.01.6.340	Verifikasi Tempat Ujian Kompetensi Keahlian SMK	Erfeksananya Tempat Uji Kompetensi Keahlian SMK se Sumatera Barat	0	106 sekolah	94.100.000	106 sekolah	94.100.000	207 SMK	292.543.500	807 orang	110.383.500	807 orang	121.421.850		
1.01.01.6.368	Pembinaan dan Pelaksanaan O2SN SMK Tingkat Kab/Kota	Erfeksananya Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMK Tingkat Kabupaten/Kota	0					19 kab/kota	784.077.700						
1.01.01.6.369	Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECAFE Learning)	Workshop guru Bahasa Inggris SMK (ECAFE Learning)	0	19 Kab/Kota	175.500.000	orang	239.308.000	108 orang	227.957.900	108 orang	227.957.900	108 orang	250.753.690		
1.01.01.6.370	Penelusuran tulusana SMA dan SMK yang berurusan dengan Dunia Usaha/ Dunia Industri	Jumlah siswa yang diterima di Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha/ Dunia Industri	0	19 Kab/Kota	60.000.000	2 Jenis Dok	100.000.000	2 Dok (SMA dan SMK)	68.471.600	750 orang	68.471.600	750 orang	75.318.760		
1.01.01.6.371	Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA Kelas X Baru	Erfeksananya kegiatan Bridging Course Pemantapan Sains Siswa SMA Kelas X Baru	0	52 sekolah	150.000.000	207 orang	150.000.000	207 orang	228.136.250	207 orang	132.214.000	207 orang	145.435.400		
1.01.01.6.372	Rapat Koordinasi Kemitraan dengan Instansi Pasangan	Pelaksanaan Rakor kemitraan dengan instansi pasangan	0			250.000.000	217 orang	237.277.800	217 orang	235.904.800	217 orang	259.495.280			
1.01.01.6.373	Pengadaan Alat Kesenian SMK	Erfeksananya Alat Kesenian untuk SMK	0	1 Paket	157.500.000	1 paket	250.000.000	0 sekolah	200.000.000	0 sekolah	200.000.000	0 sekolah	220.000.000		
1.01.01.6.374	Pengadaan Alat Praktek/ Peraga Siswa SMK	Erfeksananya Alat Praktek untuk siswa SMK	0	6 paket	1.867.500.000	1 paket	350.000.000	0 sekolah	200.000.000	0 sekolah	200.000.000	0 sekolah	220.000.000		
1.01.01.6.375	Pengadaan Komputer dan Jaringan SMK	Erfeksananya komputer dan jaringannya	0					1 paket	300.000.000	23 Sekolah (23 Paket)	2.680.626.500	23 Sekolah (23 Paket)	2.948.689.150		
1.01.01.6.376	Pengadaan Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK	Sarana Pembelajaran Multimedia Interaktif SMK yang disediakan	0					1 paket	300.000.000	23 sekolah (23 paket)	200.000.000	23 sekolah (23 paket)	220.000.000		
1.01.01.6.377	Pengadaan Buku Pustaka dan Buku Referensi SMK	Erfeksananya Pengadaan Buku Teks Pelajaran dan Buku Referensi/Pustaka SMK	0					1 paket	350.000.000						
1.01.01.6.378	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) di kelola	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) di kelola	0	229 Sekolah	177.926.000.000	233 sekolah	180.163.200.300		182.015.400.000				200.216.940.000		
1.01.01.6.379	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru SMK	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru SMK yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan	0					108 orang	155.750.000						
1.01.01.6.380	Gebyar Literasi SMK Tingkat Provinsi	Gebyar Literasi SMK Tingkat Provinsi yang dilaksanakan sebanyak 1 kali	0					152 orang	414.690.600	kali	397.590.600	kali	437.349.660		
1.01.01.6.381	Gebyar Literasi SMK Tingkat Kabupaten/Kota	Gebyar Literasi SMK Tingkat Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sebanyak 1 kali	0					3 cabang	1.058.674.300						
1.01.01.6.382	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) di kelola	Dana BOS SMK Negeri (DAK Non Fisik) di kelola	0	105 Sekolah	89.360.600.000	109 sekolah	95.464.600.000		108.398.400.000				119.238.240.000		
1.01.01.6.383	Lomba Best Practise Pengawas SMA se jember	Lomba Best Practise Pengawas SMA se jember	0					135 orang	312.863.050	35 orang	112.863.000	35 orang	124.149.300		
1.01.01.6.384	Pengadaan Alat Laboratorium SMA	Alat Laboratorium SMA yang disediakan	0					1 paket	350.000.000	0 sekolah	200.000.000	0 sekolah	220.000.000		
1.01.01.6.385	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru SMA	Sosialisasi Tunjangan Profesi Guru SMA yang dilaksanakan sebanyak 2 angkatan	0					233 orang	255.750.000						

			Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bagi SMK se Sumbang	Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Bagi SMK se Sumbang			sekolah	300.000.000												
			Workplace Asesor Sertifikasi Kompetensi Bidang Keahlian Pariwisata dan Bisnis Manajemen	Workshop Asesor Sertifikasi Kompetensi Bidang Keahlian Pariwisata dan Bisnis Manajemen			orang	300.000.000												
			lanjutan Pembangunan RKB, Laboratorium dan Pustaka SMKN 1 Sumatera Barat	erlaksananya Pembangunan 2 unit RKB, 2 unit Laboratorium dan 1 unit Pustaka di SMKN 1 Sumatera Barat		3 paket	1.800.000.000													
			Pemeliharaan Gedung Praktek (workshop) dan Asrama BLPT	erlaksananya pemeliharaan gedung praktek(workshop) dan asrama BLPT		1 Paket	198.500.000													
			Pembangunan Asrama BLPT Tahap III	erlaksananya pembangunan asrama tahap III di BLPT		1 unit	460.950.000													
			Lomba Debat Bahasa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	erpilinya pemenang Lomba Debat Bahasa SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		160 orang	320.000.000													
			Bimtek Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian SMK Teknologi Se Sumatera Barat (In and On Service)	erlaksananya Bimtek Guru Mata Pelajaran Kompetensi Keahlian SMK Teknologi Se Sumatera Barat (In and On Service)		60 orang	189.871.300													
			Pelaksanaan FIKSI SMK Tingkat Provinsi dan Nasional	erpilinya pemenang FIKSI SMK Tingkat Provinsi dan Nasional		108 Sekolah	144.000.000													
			Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMK	erlaksananya Buku Pelajaran dan Buku Pustaka SMK		1 Paket	192.530.000													
			Pra UN SMK Tahun Pelajaran 2016/2017	erlaksananya Pra UN SMK (25077 siswa)		25.077 Siswa	626.925.000													
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	1.01.01.01.1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	600,00	0	4.478.394.700	4.861.517.562	100	6.025.753.517		4.664.439.844		5.130.883.828						
		1.01.01.01.1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Listrik, Air dan Telekomunikasi OPD yang terpenuhi		0	12 bulan	957.888.000	12 bulan	1.266.336.000	12 bulan	955.956.000	2 BULAN	1.112.714.376	2 BULAN	1.223.985.814			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
		1.01.01.01.1.2	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan dan Sopir Kantor	Jasa pengamanan; Jasa Kebersihan IPTD Ballekomdik; dan Jasa sopir kantor.		0	12 bulan	1.104.095.000	12 bulan	1.104.095.000	12 bulan	738.785.689	2 BULAN	704.464.525	2 BULAN	774.910.978				
		1.01.01.01.1.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor		0	12 bulan	861.699.500	12 bulan	131.078.000	52 unit	413.275.000	2 BULAN	27.100.000	2 BULAN	29.810.000				
		1.01.01.01.1.4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	ersedianya Barang cetakan dan penggandaan yang menunjang operasional kantor		0	12 bulan	232.000.000	12 bulan	184.093.500	12 bulan	151.009.400	2 BULAN	151.009.400	2 BULAN	166.110.340				
		1.01.01.01.1.5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		0	12 bulan	65.200.500	12 bulan	94.269.782	12 bulan	36.487.548	2 BULAN	36.487.548	2 BULAN	40.136.303				
		1.01.01.01.1.6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kebutuhan kantor terhadap Bahan Bacaan sebanyak 7 surat kabar dan 3 majalah serta Peraturan Perundang-undangan		0	12 bulan	116.000.000	12 bulan	54.248.000	12 bulan	123.204.000	2 BULAN	132.516.000	2 BULAN	145.767.600				
		1.01.01.01.1.7	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Rapat koordinasi luar daerah dan dalam daerah yang diikuti		0	12 bulan	980.000.000	12 bulan	1.067.940.000	12 bulan	2.843.460.000	2 BULAN	1.619.522.095	2 BULAN	1.781.474.305				
		1.01.01.01.1.8	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi dan Publikasi	Ersedianya Dokumentasi dan Informasi		0	12 bulan	95.800.000	75 keg	112.100.000	12 bulan	61.900.000	2 BULAN	61.900.000	2 BULAN	68.090.000				
		1.01.01.01.1.9	Penyediaan Jasa Pembinaan Mental dan Fisik Aparatur	Wirid Kantor sebanyak 64 minggu dan Kegiatan Senam di Kantor sebanyak 48 minggu		0	12 bulan	49.600.000	12 bulan	55.200.000	12 bulan	67.400.000	2 BULAN	68.600.000	2 BULAN	75.460.000				
		1.01.01.01.1.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor		0	12 bulan	214.900.000	12 bulan	271.064.780	12 bulan	243.533.400	2 BULAN	243.533.400	2 BULAN	267.886.740				
		1.01.01.01.1.11	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Sedung kantor dan kendaraan dinas abatan/operasional roda empat		0	12 bulan	6.500.000	2 unit	46.100.000	2 unit	59.100.000	00%	59.100.000	00%	65.010.000				
		1.01.01.01.1.12	Penyediaan Makanan dan Minuman	Ersedianya Makan dan Minum rapat dan kegiatan		0	12 bulan	200.000.000	12 bulan	403.625.000	12 bulan	265.200.000	2 Bulan	374.400.000	2 Bulan	411.840.000				
		1.01.01.01.1.13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ersedianya surat menyurat		0	12 bulan	72.000.000	12 bulan	71.367.500	12 bulan	68.442.500	2 Bulan	73.092.500	2 Bulan	80.401.750				
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Ersedianya Jasa dan bahan kebersihan kantor			12 bulan	196.053.390												
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	ersedianya Jasa Pengaman Kantor			12 bulan	278.722.730												
			Penyediaan Jasa Sopir Kantor	ersedianya Jasa Sopir Kantor			12 bulan	152.030.580												
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Internal Organisasi	1.01.01.01.2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase berfungsi sarana dan prasarana aparatur	600,00	0	2.759.262.200	1.986.466.500	100	1.743.700.400		3.755.657.116		4.131.222.828						
				Kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (zona hijau=3); kuning=2; merah=1	18,00					3,00										
		1.01.01.01.2.1	Pengadaan Mebeleur	Meja dan kursi yang diadakan untuk kebutuhan Kantor		0	15 unit	196.000.000	30 unit	169.700.000	6 set	80.500.000	6 set	685.000.000	6 set	753.500.000				
		1.01.01.01.2.2	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputensasi	komputer/PC yang dibeli sebanyak 30 unit, printer yang dibeli sebanyak 35 unit		0	15 unit	193.000.000			65 unit	676.000.000	65 unit	405.000.000	65 unit	445.500.000				
		1.01.01.01.2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung Kantor yang terpelihara		0	3 unit	644.939.500	3 unit	390.000.000	4 kegiatan	197.500.000	2 BULAN	197.500.000	2 BULAN	217.250.000				
		1.01.01.01.2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	kendaraan dinas/operasional yang terpelihara		0	12 bulan	222.250.000	9 unit	179.751.000	13 unit	211.800.400	2 BULAN	211.800.400	2 BULAN	232.980.440				
		1.01.01.01.2.5	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor terpelihara antara lain Komputer, AC, Printer		0	12 bulan	291.115.500	12 bulan	274.515.500	12 bulan	202.900.000	2 BULAN	202.900.000	2 BULAN	223.190.000				
		1.01.01.01.2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas/Mess	Rumah Dinas yang terpelihara		0	2 unit	218.000.000	3 unit	210.000.000	1 unit	175.000.000	2 unit	175.000.000	2 unit	192.500.000				
		1.01.01.01.2.7	Pengadaan Desain Interior Gedung Kantor	Design Interior Gedung Kantor yang bdkan sebanyak 1 set							1 set	200.000.000								
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan	instalasi dan Jaringan Kantor yang terpelihara			12 bulan	100.000.000												
			Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Kantor	empat Ibadah yang akan direhab sebanyak 1 unit dan Pos Satuan Pengamanan 1 unit			2 unit	500.000.000												
			Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor	komputer, laptop/printer yang dibeli sebanyak 4 unit			10 unit	142.500.000						73.456.716	1 unit	80.802.388				

